



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KOTA PONTIANAK TAHUN 2022

5M CEGAH COVID-19



RENCANA KERJA TAHUN 2022

Dinas Kesehatan Kota Pontianak



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022 perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2022;
 - b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 18);

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
19. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 101);
20. Peraturan Walikota Nomor 14.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 14.1);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
5. Walikota adalah Walikota Pontianak.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. terwujudnya perencanaan tahunan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam upaya terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2019-2024;
- b. tercapainya pemanfaatan potensi Dinas Kesehatan Kota Pontianak secara maksimal, efisien dan efektif;
- c. menjadi kerangka acuan bagi Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan perangkatnya dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya visi misi yang telah ditetapkan RPJMD; dan
- d. sebagai instrumen penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah Renja Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

- a. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
- b. Penjabaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
- c. Ketentuan Penutup

BAB III

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2022

Pasal 5

- (1) Renja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022.
- (2) Renja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022 memuat program, kegiatan dan pagu Indikatif.
- (3) Renja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022 berpedoman pada RKPD Tahun 2022.
- (4) Renja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022 menjadi pedoman dalam menyusun RKA.

Pasal 6

(1) Penjabaran Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- c. BAB III : TUJUAN
- d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- e. BAB V : PENUTUP.

(2) Penjabaran Renja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal ~~26~~ 26 Juli 2021

WALIKOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal ~~26~~ 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



MULYADI



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PONTIANAK

NOMOR 96 /D-KES/2021

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Tahunan Kota Pontianak, perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022 sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa Rencana Kerja yang dimaksud huruf a di atas merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang perlu diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171);

22. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK TENTANG RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Pontianak
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
- f. Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
- g. Rencana Kerja adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan
- h. Rencana Kerja Anggaran adalah Dokumen Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan

BAB II

RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan.

Pasal 3

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022 menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022

Pasal 4

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 28 Juli 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PONTIANAK

The image shows a circular official stamp of the Health Office of Pontianak City. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA PONTIANAK" around the perimeter and "DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

SIDIG HANDANU WIDOYONO



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya semata, penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Kerja tahun 2022 ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang memuat rencana kerja, indikator kinerja dan pendanaannya periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang ikut andil menyumbangkan pemikiran, ide dan tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnnya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya.

Semoga Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022 ini dapat memberikan gambaran rencana pembangunan kesehatan di Kota Pontianak, dan menjadi masukan bagi semua pihak terkait dan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pontianak



dr. Sidig Handanu Widoyono, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19660516 199603 1 003



DAFTAR ISI

	Hal
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK	
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN	
KATA PENGANTAR KEPALA DINAS KESEHATAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	62
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.....	89
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	108
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	135
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN	
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	137
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan	146
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD	
4.1 Program dan Kegiatan.....	154
BAB V PENUTUP.....	198



DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2020.....	30
2.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020.....	67
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2020	74
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Pontianak	109
2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2022 Kota Pontianak	135
3.1 Keterkaitan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi.....	138
3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024.....	150
3.3 Keterkaitan (interpelasi) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024.....	152
4.1 Rumusan Program dan Kegiatan PD Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	173



DAFTAR GAMBAR

	Hal
1.1 Bagan Alur Tahap Penyusunan Rencana Kerja	3



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah terkait langsung dengan pelayanan publik pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan dan pengumpulan data, informasi, menganalisa data dan gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk mengerucutkannya pada penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan, didasarkan pada review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang sesuai dengan rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Selanjutnya rancangan awal dimaksud juga akan dirumuskan berdasarkan usulan kegiatan



prioritas masyarakat yang diperoleh melalui proses musyawarah pembangunan masyarakat dari tingkat desa hingga kota.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

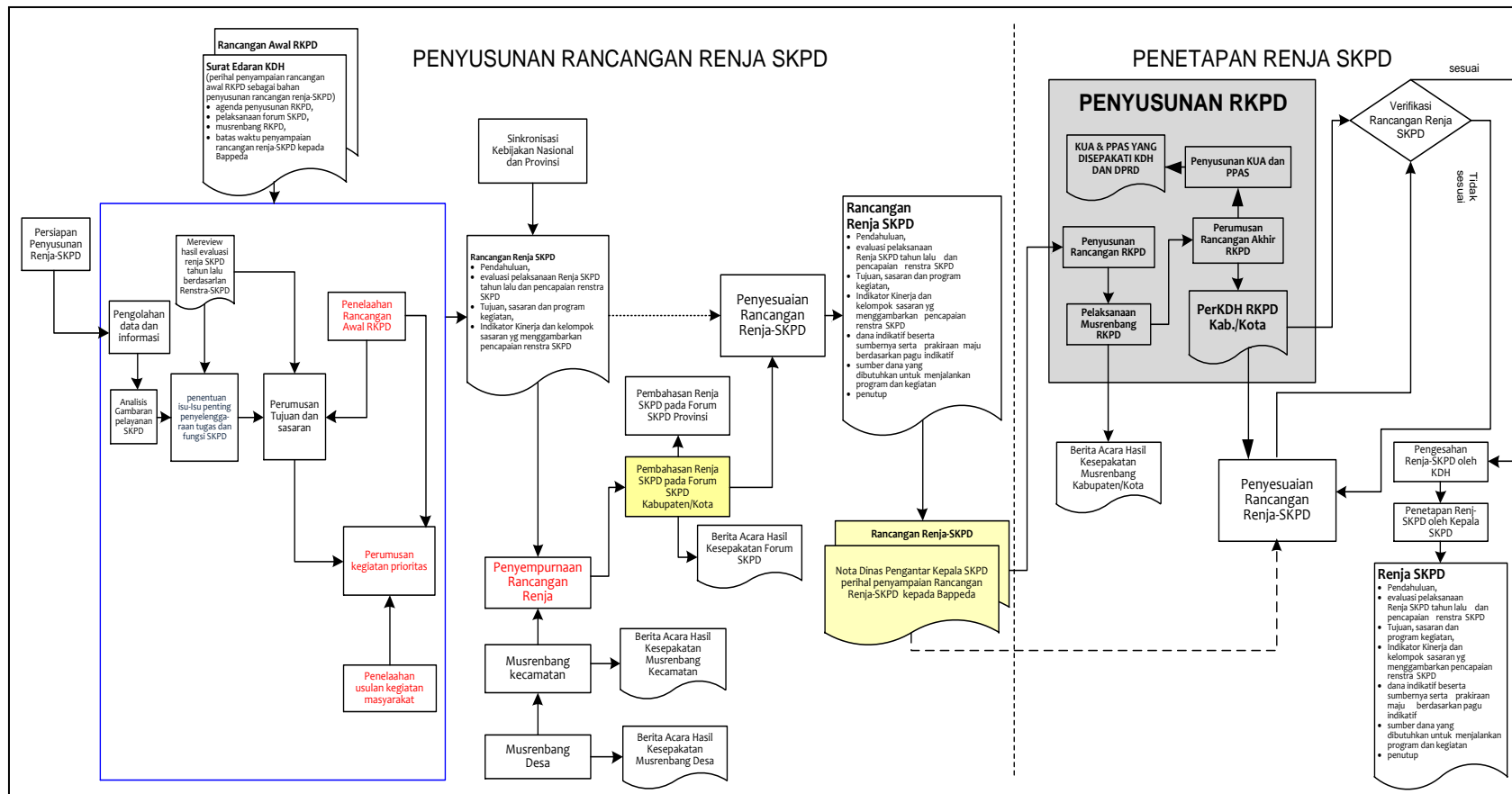
- a. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2022;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
- c. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program / kegiatan di dalam renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif PD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dokumen Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra yang memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah yang lainnya baik RPJMD, maupun RKPD. Renja PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra PD, dan RPJMD, bagi RKA PD, KUA, PPAS, dan RAPBD.



Adapun bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Bagan Alur Tahap Penyusunan Rencana Kerja





1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322)
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
 26. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
 27. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
 28. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah
-



- (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 133);
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);
 30. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ; (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 129);
 31. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
 32. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 66);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja PD (Renja Perangkat Daerah) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi Dinas Kesehatan dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi Dinas Kesehatan dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi Dinas Kesehatan dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;



- d. Memberikan acuan bagi Dinas Kesehatan dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi Dinas Kesehatan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun yang akan datang sesuai dengan target Renstra.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini memuat uraian terkait tujuan dan Renja Dinas Kesehatan sesuai dengan visi misi Walikota Pontianak, juga menguraikan arah kebijakan kesehatan, jenis program dan kegiatan Dinas Kesehatan.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan berikut pendanaannya.



BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Tahun 2020 telah dilaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2020. Adapun sasaran yang ditetapkan berikut program dan kegiatan yang dilaksanakan serta capaian kinerjanya sampai dengan tahun lalu sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar

Sasaran ini terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja dengan target kinerja masing-masing yaitu :

1) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

Pada Tahun 2020 Indikator Kinerja Utama Angka Kematian Ibu realisasinya sebesar 72,12 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2019 yakni 42,09 per 100.000 KH. Peningkatan angka indikator tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, sehingga jika dibandingkan dengan target maksimal di tahun 2020 yakni 49,50 per 100.000 KH maka dapat diinterpretasikan bahwa Indikator Kinerja Utama dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu di Tahun 2020 belum mencapai target maksimal yang ditentukan. Peningkatan angka realisasi tersebut juga berarti, bahwa terjadi peningkatan angka kematian ibu, dimana pada tahun sebelumnya (2019) jumlah kematian ibu sebanyak 5 (lima) orang, dan di tahun 2020 terdapat 8 (delapan) kasus kematian ibu dari 11.093 Kelahiran Hidup.



Adapun program yang mendukung Pencapaian Indikator Angka Kematian Ibu adalah:

- a. Kegiatan Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil dengan indikator kegiatan sebagai berikut :
 - ✓ Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar.
 - ✓ Persentase Bayi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar.
 - ✓ Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK).
- b. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita dan Pra Sekolah. Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:
 - ✓ Persentase Pelayanan Kesehatan Anak sesuai Standar
- c. Program Bantuan Operasional Kesehatan. Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :
 - ✓ Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Management Bantuan Operasional Kesehatan dengan baik.

- 2) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup
Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Angka Kematian Bayi di Tahun 2020 sebesar 2,16 per 1000 KH, angka realisasi ini lebih kecil dibandingkan dengan Target maksimal angka kematian bayi sebesar 2,40 per 1000 KH. Penurunan angka realisasi tersebut juga menjelaskan bahwa jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran hidup masih berada dibawah angka maksimal kematian bayi yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama. Dalam konteks capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama pada Angka Kematian Bayi di Tahun 2020 dikatakan berhasil menekan angka kematian bayi. Capaian ini berbanding terbalik dengan capaian indikator



kematian ibu, hal tersebut disebabkan karena kematian ibu Sebagian besar terjadi pada masa nifas / pasca persalinan dimana bayi telah dilahirkan dengan selamat.

Adapun Program yang mendukung Capaian Indikator Utama Angka Kematian Bayi, adalah:

- a. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :
 - ✓ Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar.
 - ✓ Persentase Bayi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar.
 - ✓ Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK).
 - b. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita dan Pra Sekolah. Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:
 - ✓ Persentase Pelayanan Kesehatan Anak sesuai Standar
 - c. Program Bantuan Operasional Kesehatan. Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :
 - ✓ Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Management BOK dengan baik.
- 3) Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita
Indikator Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita Tahun 2020 realisasinya sebesar 7,06 %, nilai realisasi ini lebih rendah dibandingkan dengan Target sebesar 14%. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita dikategorikan kurang Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 149,56 % (PSG Kota).



Adapun Program yang masuk kedalam Indikator Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita adalah :

a. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- ✓ Persentase Balita Kurus yang mendapatkan pelayanan
- ✓ Persentase Balita Sangat Kurus yang mendapatkan Pelayanan sesuai Standar
- ✓ Persentase Balita Bawah Garis Merah (BGM) yang mendapatkan Pelayanan sesuai Standar.

4) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada anak bawah dua Tahun

Realisasi Indikator Utama Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak bawah Dua tahun di Tahun 2020 sebesar 8,73%, angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan Target sebesar 21%. Pada target persentase prevalensi stunting, di definisikan bahwa angka target 21% adalah angka maksimal prevalensi stunting, oleh karenanya upaya yang dilakukan adalah menekan angka persentase prevalensi tersebut semaksimal mungkin, sehingga jika angka realisasi dapat lebih rendah dari target prevalensi tersebut maka di interpretasikan bahwa upaya program Gizi yang dilakukan berhasil menekan prevalensi kejadian stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Usia Dua Tahun.

Adapun Program yang masuk kedalam Indikator Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak bawah dua tahun adalah:

a. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- ✓ Persentase Balita Kurus yang mendapatkan pelayanan



- ✓ Persentase Balita Sangat Kurus yang mendapatkan Pelayanan sesuai Standar
 - ✓ Persentase Balita Bawah Garis Merah (BGM) yang mendapatkan Pelayanan sesuai Standar
- 5) Persentase FKTP yang memenuhi Persyaratan sesuai standar Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Persentase FKTP yang memenuhi Persyaratan sesuai standar di Tahun 2020 sebesar 100%, realisasi ini telah sesuai dengan Target yang ditetapkan sebesar 100%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama pada Persentase FKTP yang memenuhi Persyaratan sesuai standar di Tahun 2020 dikategorikan sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100% fasilitas kesehatan terakreditasi. Indikator ini berbeda cara pengukuran capaian Indikator dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita, dan Prevalensi Stunting (Pendek atau Sangat Pendek) pada Anak Bawah Dua Tahun, dimana pada Indikator standar akreditasi, capaian dikatakan berhasil jika realisasinya melebihi atau sama dari target yang diharapkan.
- Adapun Program yang mendukung Capaian Indikator Utama Persentase FKTP yang memenuhi Persyaratan sesuai standar, adalah :
- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Dengan Indikator Program yaitu :
 - ✓ Jumlah UPTD/ UPK yang memberikan Pelayanan sesuai Standar.



- b. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya. Dengan Indikator Program yaitu :
 - ✓ Persentase Sarana Bangunan UPTD/ UPK dan Jaringannya yang memenuhi syarat.
- c. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. Dengan Indikator Program yaitu :
 - ✓ Persentase Puskesmas yang Terakreditasi
- d. Program Pengembangan Data/ Informasi. Dengan Indikator Program yaitu :
 - ✓ Persentase Kecukupan Data dan Informasi Kesehatan dan RSUD Kota Pontianak
- e. Program Pengembangan Sistem Informasi. Dengan Indikator Program yaitu :
 - ✓ Persentase Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Puskesmas yang berfungsi dengan baik.
- f. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Dengan Indikator Program yaitu :
 - ✓ Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat, Vaksin, dan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar
- g. Program Pengawasan Obat dan Makanan. Dengan Indikator Program yaitu :
 - ✓ Persentase Fasilitas Kesehatan di Bidang Kefarmasian sesuai Standar
- h. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Dengan Indikator Program yaitu :
 - ✓ Cakupan Masyarakat miskin dan kelompok tertentu yang mendapat Jaminan Kesehatan



- i. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan Indikator Program yaitu :
 - ✓ Persentase RT yang melaksanakan PHBS
 - ✓ Persentase Sekolah yang melaksanakan PHBS
- 6) Menurunnya Kesakitan Penderita DBD

Capaian Indikator Menurunnya Kesakitan Penderita DBD Tahun 2020 realisasinya sebesar 4,12 per 100.000 Penduduk, nilai realisasi sasarnya lebih rendah dibandingkan dengan Target sebesar <49 per 100.000 Penduduk. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama menurunnya Kesakitan Penderita DBD dikategorikan Sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 191,60%, dan Realisasi tidak melebihi dari Target Indikator. Pada Indikator ini menggunakan pengukuran capaian yang sama seperti Indikator Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita, dan Prevalensi stunting (Pendek atau sangat pendek) pada Anak usia Dua Tahun.

Adapun Program yang mendukung Capaian Indikator Utama Menurunnya Kesakitan Penderita DBD, adalah :

 - a. Kegiatan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Dengan Indikator Program yaitu :
 - ✓ Terkendalinya Angka Kesakitan Penyakit Menular (DBD)
 - ✓ Terkendalinya Angka Kesakitan Penyakit Menular (Kusta)
 - ✓ Terkendalinya Angka Kesakitan Penyakit Menular (AFP)
 - ✓ Angka Kesembuhan Penderita TB
 - ✓ Terkendalinya Angka Kesakitan Penyakit Menular (Diare)



- ✓ Menurunnya Kesakitan Penderita HIV
- b. Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. Dengan Indikator Program yaitu :
 - ✓ Terkendalinya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular (Hipertensi)
 - ✓ Terkendalinya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular (Diabetes Melitus)
 - ✓ Persentase Masyarakat yang mendapatkan Screening Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim
- c. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. Dengan Indikator Program yaitu :
 - ✓ Persentase Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)
 - ✓ Persentase Sarana Air Minum yang memenuhi Standar
- d. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat Umum dan Makanan. Dengan Indikator Program yaitu :
 - ✓ Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi Syarat Kesehatan (Laik Sehat)
 - ✓ Persentase Tempat Fasilitas Umum yang memenuhi Syarat Kesehatan.

7) Menurunnya Kesakitan Penderita HIV

Pada upaya menurunkan angka kesakitan penderita HIV, target indikator yang digunakan adalah Insiden Rate. Insiden rate adalah jumlah rata – rata kasus baru suatu penyakit. Target indikatornya di tahun 2020 adalah dibawah 0,015 per % penduduk. Adapun realisasi Capaian Indikator dalam upaya menurunkan insiden baru kasus HIV di tahun 2020 adalah sebesar 0,017 Per % Penduduk, nilai realisasi ini lebih kecil



dibandingkan dengan Target yang ditentukan ($<0,015$ Per % Penduduk). Hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama dalam penurunan angka Kesakitan baru Penderita HIV berhasil menekan angka kasus baru dibawah target maksimal insidensi yang ditetapkan. Adapun Pencapaian Indikator Sasaran adalah 86,16%. Program yang dilakukan guna mendukung Capaian Indikator Utama Menurunnya Kesakitan Penderita HIV, adalah :

- a. Kegiatan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Dengan Indikator kegiatan yaitu :
 - ✓ Terkendalinya Angka Kesakitan Penyakit Menular (DBD)
 - ✓ Terkendalinya Angka Kesakitan Penyakit Menular (Kusta)
 - ✓ Terkendalinya Angka Kesakitan Penyakit Menular (AFP)
 - ✓ Angka Kesembuhan Penderita TB
 - ✓ Terkendalinya Angka Kesakitan Penyakit Menular (Diare)
 - ✓ Menurunnya Kesakitan Penderita HIV.
- b. Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. Dengan Indikator Program yaitu :
 - ✓ Terkendalinya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular (Hipertensi)
 - ✓ Terkendalinya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular (Diabetes Melitus)
 - ✓ Persentase Masyarakat yang mendapatkan Screening Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim
- c. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. Dengan Indikator Program yaitu :



- ✓ Persentase Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)
 - ✓ Persentase Sarana Air Minum yang memenuhi Standar
- d. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat Umum dan Makanan. Dengan Indikator Program yaitu :
- ✓ Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi Syarat Kesehatan (Laik Sehat)
 - ✓ Persentase Tempat Fasilitas Umum yang memenuhi Syarat Kesehatan.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sasaran ini terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan target kinerja yaitu :

- 1) Persentase Rumah Sakit di Kota Pontianak yang Terakreditasi
Indikator Persentase Rumah Sakit di Kota Pontianak yang Terakreditasi Tahun 2020 masih sebagaimana angka realisasinya di tahun 2019 yakni sebesar 92,31%, nilai realisasinya lebih besar dibandingkan dengan Target sebesar 75%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama berupa Persentase Rumah Sakit di Kota Pontianak yang Terakreditasi dikategorikan sangat Berhasil karena melebihi target yang ditetapkan. Namun untuk tahun 2020 tidak dilakukan survei akreditasi dikarenakan pandemic covid-19. Adapun Pencapaian Indikator Sasarannya adalah 123,08%, Realisasi tersebut juga melebihi dari Target Indikator dan pada Indikator ini menggunakan pengukuran capaian yang sama dengan Persentase FKTP yang memenuhi Persyaratan sesuai standar.



Adapun Program yang mendukung Capaian Indikator Utama Persentase Rumah Sakit di Kota Pontianak yang Terakreditasi adalah :

- a. Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan.
Dengan Indikator Program yaitu :
 - ✓ Persentase Rumah Sakit yang sudah melakukan simulasi Akreditasi Nasional
 - ✓ Tercapainya tingkat/ level Rumah Sakit Akreditasi RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie
 - ✓ Angka Hunian Rata-rata (BOR)
 - ✓ Jumlah Lama Hari Rawat (LOS)
 - ✓ Perputaran Pemanfaatan kembali tempat tidur (TOI)
 - ✓ Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit
 - ✓ Angka Kematian Kasar (GDR)
 - ✓ Angka Kematian Bersih (NDR)
 - ✓ Persentase Kelengkapan Dokumen Mutu
- b. Program Promosi dan Sistem Informasi Rumah Sakit.
Dengan Indikator Program yaitu :
 - ✓ Sistem Informasi Rumah Sakit sesuai Standar
- c. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
 - ✓ Persentase Sarana dan Prasarana RSUD sesuai Standar
- d. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
 - ✓ Persentase Sarana dan Prasarana RSUD berfungsi dengan baik



3. Program dan Kegiatan Penunjang Pada OPD Dinas Kesehatan

Selain melaksanakan program wajib dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2020, Dinas Kesehatan juga melaksanakan Program Penunjang sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme SDM. Program Penunjang yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan khususnya dibawah Kesekretariatan Dinas Kesehatan yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan melaksanakan program ini, harapan yang ingin dicapai adalah pelayanan administrasi di Dinas Kesehatan Kota Pontianak dapat berjalan dengan baik dan transparan. Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Kesehatan
2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat RSUD
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor RSUD
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Kesehatan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor RSUD
7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas kesehatan
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RSUD
9. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan
10. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD



11. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Dinas Kesehatan
12. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS RSUD
13. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Dinas kesehatan
14. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah RSUD
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas kesehatan
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional RSUD
17. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan
18. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran RSUD
19. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas kesehatan
20. Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan
21. Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan RSUD
22. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Pengamanan Kantor Dinas kesehatan
23. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Pengamanan Kantor RSUD
24. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dinas Kesehatan
25. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja RSUD
26. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Kesehatan
27. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan RSUD
28. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan
29. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga RSUD
30. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Dinas Kesehatan



31. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan RSUD
32. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dinas Kesehatan
33. Penyediaan Bahan Logistik Kantor RSUD
34. Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan
35. Penyediaan Makanan dan Minuman RSUD
36. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dinas Kesehatan
37. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah RSUD
38. Pelayanan Kesehatan Walikota, Wakil Walikota, dan DPRD Kota Pontianak

Capaian kinerja yang menjadi tolak ukur pencapaian sasaran adalah :

- ✓ Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan target 100% terealisasi 95,60%.

Capaian indikator ini didapat dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak sehingga Dinas Kesehatan Kota Pontianak dapat berjalan dengan baik dengan dukungan dari pelayanan administrasi perkantoran dari Sub Bagian Umum dan Aparatur.

2) Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor

Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor mencakup kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan sarana dan prasarana baik di Dinas Kesehatan Kota Pontianak maupun di tingkat jaringannya yaitu RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, UPTD/UPK Puskesmas sampai



Puskesmas pembantu yang ada di Kota Pontianak. Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan
3. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional RSUD
4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Kesehatan
5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional RSUD
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Kesehatan
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor RSUD
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor RSUD
14. Pemeliharaan Lingkungan Gedung Kantor
15. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
16. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
17. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
18. Renovasi, Restorasi dan Revitalisasi Lingkungan Gedung Kantor
19. Renovasi, Restorasi dan Revitalisasi Rumah Dinas
20. Renovasi, Restorasi dan Revitalisasi Gedung Kantor
21. Pengelolaan Aset dan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset



Capaian kinerja yang menjadi tolak ukur pencapaian sasaran adalah :

- ✓ Persentase terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan target 100% terealisasi 95,03% dengan capaian kinerja 100%.

Capaian ini diukur dengan pelaksanaan kegiatan yang ada. Dari enam kegiatan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) keseluruhannya dilaksanakan (100%). Ini menandakan bahwa penyediaan sarana dan prasarana aparatur di Dinas Kesehatan Kota Pontianak sudah berjalan maksimal pada anggaran 2020. Walaupun masih ada beberapa sarana prasarana yang masih diperlukan untuk diadakan pada tahun berikutnya.

3) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang kuat dan terawasi dengan baik. Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran RSUD
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja RSUD

Capaian kinerja yang menjadi tolak ukur pencapaian sasaran adalah :

- ✓ Persentase terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dengan target 100% terealisasi 68,61%.

Laporan yang dimaksud sendiri adalah laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



Keseluruhan laporan yang dibuat merupakan capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2020

4) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan

Dinas Kesehatan Kota Pontianak setiap tahunnya melakukan proses berkesinambungan untuk penyusunan anggaran agar pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan Kota Pontianak dapat terlaksana dengan baik. Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan
2. Pengelolaan BLUD Puskesmas
3. Peningkatan Penatausahaan Keuangan

Capaian kinerja yang menjadi tolak ukur pencapaian sasaran adalah :

- ✓ Persentase terlaksananya laporan keuangan yang akuntabel dengan target 100% terealisasi 89,19%.

Hasil dari laporan keuangan dari indikator ini adalah Catatan Akhir Laporan Keuangan (CaLK), Neraca SKPD, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di mana dari lima laporan keuangan Dinas Kesehatan telah menyusun empat laporan yaitu CaLK, Neraca SKPD, LO, LPE dan LRA sehingga capaian dari indikator ini adalah 100%.

5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini adalah upaya untuk penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Dari tahun ke tahun banyak inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah baik itu dari pemerintah pusat maupun



pemerintah daerah tentu harus sejalan dengan pelatihan yang dilaksanakan agar hasil yang didapat maksimal. Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Dinas Kesehatan
2. Pendidikan dan Pelatihan Formal RSUD Kota Pontianak
3. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas kesehatan
4. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur RSUD Kota Pontianak
5. Kredensialisasi Tenaga Medis Rumah Sakit RSUD Kota Pontianak
6. Kredensialisasi Tenaga Penunjang Medis RSUD Kota Pontianak
7. Kredensialisasi Tenaga Perawat RSUD Kota Pontianak
8. Pertemuan Rutin Komite Medik dan Komite Farmasi RSUD Kota Pontianak
9. Penilaian Angka Kredit Dinas Kesehatan
10. Penilaian Angka Kredit RSUD Kota Pontianak
11. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12. Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan

Capaian kinerja yang menjadi tolak ukur pencapaian sasaran adalah :

- ✓ Persentase terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dengan target 100% terealisasi 90,81%.

Capaian indikator ini didapat dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi (100%).



6) Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur

Dinas Kesehatan kota Pontianak sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Pontianak mematuhi peraturan yang berlaku tentang kedisiplinan. Peraturan tentang kedisiplinan dapat berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yang memuat kewajiban serta larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Negara Kesatuan Republik Indonesia. PNS berkewajiban untuk bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara. Maka, untuk mendukung peraturan tersebut, Subbag Umum dan Aparatur melakukan beberapa kegiatan.

Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur mengakomodir peraturan pemerintah tersebut dengan melakukan beberapa kegiatan pada tahun 2019 yaitu:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Dinas kesehatan dan RSUD
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tahun 2020 tidak dilakukan kegiatan pengadaan pakaian dinas. Namun Capaian indikator dihitung dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung penerapan penilaian kinerja individu. Indikator tersebut untuk mengukur pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan mengukur kinerja setiap individu pegawai yang bersangkutan.

7) Program Peningkatan Pelayanan Prima

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara negara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dilaksanakan program pelayanan prima. Dengan kegiatan sebagai berikut :



1. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas kesehatan
2. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Pontianak
3. Pengembangan Standar Pelayanan Dinas Kesehatan
4. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan
5. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat RSUD Kota Pontianak
6. Pengembangan SOP Dinas Kesehatan
7. Pengembangan Pelayanan Publik Dinas Kesehatan
8. Pengembangan Pelayanan Publik RSUD Kota Pontianak
9. Pengembangan Budaya Kerja Dinas Kesehatan
10. Pengelolaan Website Dinas Kesehatan
11. Pengelolaan Website RSUD Kota Pontianak

Capaian kinerja yang menjadi tolok ukur pencapaian sasaran adalah :

- ✓ Persentase pelayanan publik dengan kategori baik dengan target 100% terealisasi 94,48%.

Capaian indikator ini didapat dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Capaian kinerja dari indikator ini adalah 100% dengan kategori Sangat berhasil.



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja PD Dinas Kesehatan dan Pencapaian Rencana Strategis PD Dinas Kesehatan Tahun 2020 Kota Pontianak

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)								Tingkat Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan						
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)										
							Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV												
1	3	4	5		6	7		8		9		10		1	3		4	5		6		
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																					
	BIDANG KESEHATAN																					
01	1.02.1.02.01.00 .01-PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60	21.816.509.363,96	0,00	12	7.064.848.641	3	875.936.098,00	3	2.123.504.654	3	1.594.646.693	3	2.164.567.089	12	6.758.654.534,00	95,67	12	6.758.654.534,00	20	30,98
252	1.02.1.02.01.00 .01.252	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60	38.679.418,75		12	7.000.000	3	6.368.000,00	0		3	340.000,00	3	290.000	9	6.998.000,00	99,97	9	6.998.000,00	15	18,09
373	1.02.1.02.01.00 .01.373	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Pontianak	60	1.110.679.509,41		12	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-	0	-
379	1.02.1.02.01.00 .01.379	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undangan - Undangan Dinas Kesehatan	60	27.628.156,25		12	5.000.000	3	110.000,00	3	2.500.000	3	580.000,00	3	910.000	12	4.100.000,00	82,00	12	4.100.000,00	20	14,84



Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022

196	1.02.1.02.01.00.02.196-	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan	60	2.679.047.055,25	12	481.000.000	3	103.355.375,00	3	109.569.000	3	83.794.100,00	3	145.082.900	12	441.801.375,00	91,85	12	441.801.375,00	20,00	16,49
203	1.02.1.02.01.00.02.203	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan	60	386.794.187,50	12	65.080.000	3	15.000.000,00	3	9.563.000	3	10.248.000,00	3	10.129.000	12	44.940.000,00	69,05	12	44.940.000,00	20,00	11,62
204	1.02.1.02.01.00.02.204	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor- Dinas Kesehatan	60	7.929.632.820,93	12	396.400.000	0	-	3	84.567.000	3	7.900.000,00	3	299.681.985	9	392.148.985,00	98,93	9	392.148.985,00	15,00	4,95
236	1.02.1.02.01.00.02.236	Terselenggaranya Kegiatan pemusnahan Aset serta Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Aset	60	460.008.801,56	12	87.250.000	3	2.750.000,00	0	-	3	40.694.000,00	3	38.778.000	9	82.222.000,00	94,24	9	82.222.000,00	15,00	17,87
05	1.02.1.02.01.00.05	Persentase Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60	3.080.680.325,47	12	176.350.000	3	9.484.500,00	3	150.415.000	3	6.250.000	3	10.200.000	12	176.349.500,00	100,00	12	176.349.500,00	20,00	5,72
05	1.02.1.02.01.00.05.005	Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit	60	474.624.096,22	12	935.000	3	934.750,00	0	-	0	-	0	-	3	934.750,00	99,97	3	934.750,00	5,00	0,20
05	1.02.1.02.01.00.05.015	Terselenggaranya Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan	60	590.084.924,00	12	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-
08	1.02.1.02.01.00.05.018	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Kesehatan	60	133.222.969,44	12	1.620.000	0	-	3	1.620.000	0	-	0	-	3	1.620.000,00	100,00	3	1.620.000,00	5,00	1,22



018	1.02.1.02.01.00.08.018	Jumlah Peserta Sosialisasi Penatausahaan Keuangan	60	313.399.658,88			12	33.357.440	3	18.759.000,00	3	3.640.000	0	-	3	8.065.000	9	30.464.000,00	91,33	9	30.464.000,00	15,00	9,72
019	1.02.1.02.01.00.08.019	Jumlah Laporan Keuangan	60	615.266.220,22			12	54.267.680	3	8.250.000,00	3	13.405.000	3	14.395.000,00	3	9.698.000	12	45.748.000,00	84,30	12	45.748.000,00	20,00	7,44
021	1.02.1.02.01.00.08.021	Jumlah Peserta Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas	60	1.424.000.030,20			12	168.651.118	3	24.279.000,00	3	14.016.500	3	9.240.000,00	3	104.844.000	12	152.379.500,00	90,35	12	152.379.500,00	20,00	10,70
09	102102010009	Persentase Peningkatan Pelayanan Prima	60	958.840.688,29	0,00		12	80.423.500	0	0	0	0	0	0	3	75.988.800	3	75.988.800,00	94,49	3	75.988.800,00	5,00	7,93
005	1.02.1.02.01.00.09.005	Terselenggaranya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	60	757.260.134,66			12	61.922.500	0	0	0	0	0	-	3	58.746.400	3	58.746.400,00	94,87	3	58.746.400,00	5,00	7,76
095	1.02.1.02.01.00.09.095	Terselenggaranya Pengembangan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Dinas Kesehatan	60	121.751.758,96			12	8.854.000	0	0	0	-	0	-	3	7.851.400	3	7.851.400,00	88,68	3	7.851.400,00	5,00	6,45
098	1.02.1.02.01.00.09.098	Terselenggaranya Pengembangan Pelayanan Publik	60	79.828.794,67			12	9.647.000	0	-	0	-	0	-	3	9.391.000	3	9.391.000,00	97,35	3	9.391.000,00	5,00	11,76
16	1.02.1.02.01.00.16-Program Peningkatan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Terselenggaranya fungsi manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	60	10.407.498.831,23	0,00		12	11.556.150.362	3	50.618.556,00	3	21.803.944	3	2.733.888.247	3	8.252.743.846	12	11.059.054.593,00	95,70	12	11.059.054.593,00	20,00	106,26
002	1.02.1.02.01.00.16.002	Persentase terlaksananya kegiatan manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal tingkat Kabupaten/Kota	60	3.977.100.720,35			12	10.506.506.362	3	16.085.000,00	3	5.457.236	3	2.378.255.000,00	3	7.908.060.127	12	10.307.857.363,00	98,11	12	10.307.857.363,00	20,00	259,18



21	1.02.1.02.01.00 .21 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pu skesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Sarana bangunan UPTD/UPK dan jaringannya yang memenuhi syarat	6 0	47.891.831 .992,56	0, 00	1 2	2.979.413.0 00	3	8.436.500,00	0	0	3	252.554.000	3	2.685.618.24 8	9	2.946.608.748 ,00	98,90	9	2.946.608.74 8,00	15,00	6,15
001	1.02.1.02.01.00 .21.001 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Progr am Pengadaan, Pe ningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Terselenggaranya Monev dan Pelaporan	6 0	385.355.46 1,46		1 2	3.450.000	3	3.450.000,00	0	-	0	-	0	-	3	3.450.000,00	100,0 0	3	3.450.000,00	5,00	1
002	1.02.1.02.01.00 .21.002 Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang di bangun	6 0	40.888.013 .560,63		1 2	1.336.275.0 00	3	4.986.500,00	0	-	3	34.440.000, 00	3	1.270.675.24 8	9	1.310.101.748 ,00	98,04	9	1.310.101.74 8,00	15,00	3,20
003	1.02.1.02.01.00 .21.003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	6 0	2.685.456. 787,50		1 2	59.400.000	0	-	0	-	3	57.024.000, 00	3	1.000.000	6	58.024.000,00	97,68	6	58.024.000,0 0	10,00	2,16
004	1.02.1.02.01.00 .21.004 Renovasi dan Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas dan Jaringannya yang di lakukan Renovasi dan Revitalisasi	6 0	3.933.006. 182,97		1 2	1.580.288.0 00	0	-	0	-	3	161.090.000 ,00	3	1.413.943.00 0	6	1.575.033.000 ,00	99,67	6	1.575.033.00 0,00	10,00	40,05
22	1.02.1.02.01.00 .22 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RumahSakit	Persentase Sarana dan Prasarana RSUD sesuai standar	6 0	58.396.673 .488,11	0, 00	1 2	30.423.379. 114	3	21.876.273,0 0	3	5.197.072. 061	3	17.428.502. 788	3	2.012.439.50 0	12	24.659.890.62 1,54	81,06	1 2	24.659.890.6 21,54	20,00	42,23
002	1.02.1.02.01.00 .22.002 Pengadaan Alat-alat	Jenis alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang diadakan	6 0	32.615.524 .708,68		1 2	20.856.095. 211	0		3	4.030.585. 361	3	16.506.871. 648,00	3	17.600.000	9	20.555.057.00 9,00	98,56	9	20.555.057.0 09,00	15,00	63,02



0 0 2	1.02.1.02.01.00 .23.002 Pembinaan dan Pengawasan Tempat- Tempat Umum	Jumlah Tempat-tempat Umum yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Jumlah pertemuan dan sosialisasi Tempat-tempat umum	6 0	2.904.630. 951,04	1 2	494.765.00 0	3	3.700.000,00	3	1.500.000	0	-	3	486.054.750	9	491.254.750,0 0	99,29	9	491.254.750, 00	15,00	16,91
2 4	1.02.1.02.01.00 .24 Program Pengawasan Obat dan Makanan	1)Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar, 2)Penggunaan obat rasional di Puskesmas, 3)Persentase sarana farmasi sesuai standar, 4)Jumlah industri pangan rumah tangga sesuai standar	6 0	653.593.21 4	0 1 2	194.291.70 0	0	-	3	4.189.000	3	20.637.500	3	143.371.000	9	168.197.500,0 0	86,57	9	168.197.500, 00	15,00	25,73
0 0 2	1.02.1.02.01.00 .24.002 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Terselenggaranya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	6 0	187.528.87 3,36	1 2	186.251.00 0	0	-	3		3	18.676.500, 00	3	139.917.000	9	160.222.500,0 0	86,03	9	160.222.500, 00	15,00	85,44
0 0 3	1.02.1.02.01.00 .24.003 Pengawasan dan Pembinaan Sarana Kefarmasian	Terselenggaranya pengawasan dan pembinaan sarana kefarmasian	6 0	466.064.34 0,85	1 2	8.040.700	0	-	3		3	1.961.000,0 0	3	3.454.000	9	7.975.000,00	99,18	9	7.975.000,00	15,00	1,71
2 5	1.02.1.02.01.00 .25 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Kelurahan ODF	6 0	905.819.49 4	0 1 2	2.015.507.9 80	3	5.428.200,00	3	7.393.800	3	10.750.000	3	1.969.192.20 0	12	1.992.764.200 ,00	98,87	1 2	1.992.764.20 0,00	20,00	220,0 0
0 0 1	1.02.1.02.01.00 .25.001 Kemitraan Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Kelurahan Yang dilakukan verifikasi ODF.Jumlah Kader yang mendapatkan peningkatan kapasitas	6 0	511.098.78 8,10	1 2	14.300.000	0	-	0		3	8.000.000,0 0	3	5.820.000	6	13.820.000,00	96,64	6	13.820.000,0 0	10,00	2,70
0 0 4	1.02.1.02.01.00 .25.004 Pembinaan dan Pengawasan lingkungan Sehat	Jumlah Sarana Air Minum Yang dilakukan Pengawasan Jumlah Petugas Sanitarian Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Jumlah Pertemuan / sosialisasi Program Kesehatan lingkungan	6 0	394.720.70 5,53	1 2	2.001.207.9 80	3	5.428.200,00	3	7.393.800	3	2.750.000,0 0	3	1.963.372.20 0	12	1.978.944.200 ,00	98,89	1 2	1.978.944.20 0,00	20,00	501,3 5
2 6	1.02.1.02.01.00 .26 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil,Melahirkan	1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai	6 0	10.994.343 .801,35	0, 00 4 8	1.498.242.9 50	3	175.114.850, 00	3	355.440.45 0	3	685.459.100	3	70.383.000	12	1.286.397.400 ,00	85,86	1 2	1.286.397.40 0,00	20,00	11,70



	an dan Bayi Baru Lahir	standar 3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) 5. Cakupan komplikasi neonatus yang ditangani 6. Cakupan komplikasi kebidanan ditangani																		
004	1.02.1.02.01.00.26.004 Standarisasi Puskesmas Dengan Fasilitas Persalinan	Jumlah Puskesmas dengan Fasilitas Persalinan terstandar	60	142.670.417,47	12	23.194.750	3	23.194.750,00	0	-	0	-	0	3	23.194.750,00	100,00	3	23.194.750,00	5,00	16,26
005	1.02.1.02.01.00.26.005 Koordinasi Pelayanan Kesehatan Maternal, Neonatal dan Bayi	1. Terpenuhinya pendukung kegiatan pelayanan kesehatan maternal, Neonatal, Bayi 2. Jumlah Fasilitas kesehatan yang dilakukan evaluasi Program KIA 3. Persentase Ibu hamil yang dilakukan pendampingan 4. Jumlah Jejaring KIA yang memberikan pelayanan nifas dan neonatus sesuai standar 5. Jumlah kasus Kematian Ibu maternal dan Neonatal yang dilakukan audit 6. Jumlah Fasilitas kesehatan yang dilakukan Pembinaan teknis	60	1.260.393.172,75	12	49.864.400	3	18.460.200,00	3	31.404.200	0	-	0	6	49.864.400,00	100,00	6	49.864.400,00	10,00	3,96
006	1.02.1.02.01.00.26.006 Pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan pelayanan kesehatan Maternal, Neonatal, Bayi	1. Jumlah Petugas yang mendapatkan pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Maternal dan Neonatal, Bayi 2. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan, orientasi dan Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Maternal dan Neonatal, Bayi	60	1.277.636.457,63	12	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	-	-
007	1.02.1.02.01.00.26.007 Pelayanan Jaminan Persalinan	Jumlah Ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan jaminan persalinan	60	8.313.643.753,50	12	1.425.183.800	3	133.459.900,00	3	324.036.250	3	685.459.100,00	3	70.383.000	12	1.213.338.250,00	85,14	1.213.338.250,00	20,00	14,59



27	1.02.1.02.01.00.27 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita, Anak Usia Sekolah, dan Remaja	1. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 2. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3. Persentase Anak Usia 60 -72 bulan mendapatkan Pelayanan Kesehatan Anak Prasekolah sesuai standar	60	1.855.949.024,25	0,00	12	135.780.000	0	-	3	135.724.500,00	0	0	0	0	3	135.724.500,00	99,96	3	135.724.500,00	5,00	7,31
013	1.02.1.02.01.00.27.013 Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Anak Balita, Anak Usia Sekolah, dan Remaja	1. Jumlah Petugas yang mendapatkan pelatihan, orientasi dan Bimbingan Teknis Pelayanan Anak Balita, Anak Usia Sekolah dan Remaja 2. Jumlah kader yang mendapatkan pelatihan , orientasi dan bimbingan teknis peningkatan pelayanan anak balita dan pra sekolah dan remaja	60	1.855.949.024,25		12	135.780.000	0	-	3	135.724.500,00	0	-	0	-	3	135.724.500,00	99,96	3	135.724.500,00	5,00	7,31
28	1.02.1.02.01.00.28 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Persentase Balita Dengan Masalah Gizi yang Mendapatkan Pelayanan	60	8.347.640.345,19	0,00	12	619.008.355	3	114.675.850,00	3	46.985.880	3	411.470.263	3	42.481.000	12	615.612.993,00	99,45	12	615.612.993,00	20,00	7,37
001	1.02.1.02.01.00.28.001 Kewaspadaan Gizi	Jumlah Penyelenggaraan Survey Pemantauan Status Gizi Balita	60	1.055.752.248,25		12	-	3	-	0	-	0	-	0	-	3	-	#DIV/0!	3	-	5,00	-
002	1.02.1.02.01.00.28.002 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Jumlah Puskesmas yang dilakukan Pembinaan Program Gizi 2. Jumlah Kegiatan Evaluasi Program Gizi	60	55.023.000,00		12	70.953.000	3	27.653.000,00	0	-	3	5.000.000,00	3	38.300.000	9	70.953.000,00	100,00	9	70.953.000,00	15,00	128,95
003	1.02.1.02.01.00.28.003 Pelatihan dan bimbingan Teknis Perbaikan gizi Masyarakat	Jumlah Petugas Puskesmas yang Mendapatkan peningkatan Kapasitas	60	58.703.753,84		12	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	0	-	-	-
004	1.02.1.02.01.00.28.004 Penanggulangan Masalah Gizi dan Pengelolaan Konsumsi Gizi	1. Tersediannya Alat dan Bahan Peningkatan Gizi Masyarakat 2. Jumlah Kegiatan Sosialisasi atau Pertemuan Program Gizi Masyarakat	60	7.178.161.343,10		12	548.055.355	3	87.022.850,00	3	46.985.880	3	406.470.263,00	3	4.181.000	12	544.659.993,00	99,38	12	544.659.993,00	20,00	7,59



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

29	1.02.1.02.01.00.29 Program Promosi dan Sistem Informasi Rumah Sakit	Persentase Sistem informasi RS dan Media Promosi Penyuluhan sesuai standar	60	2.167.433.002,05	0,00	12	228.350.000	3	1.000.000,00	3	800.000	3	45.185.250	3	177.536.835	12	224.522.085,00	98,32	12	224.522.085,00	20,00	10,36
001	1.02.1.02.01.00.29.001 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	60	1.797.547.246,17		12	195.340.000	3	1.000.000,00	3	800.000	3	15.265.250,00	3	174.530.935	12	191.596.185,00	98,08	12	191.596.185,00	20,00	10,66
003	1.02.1.02.01.00.29.003 Peningkatan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit	Jumlah modul SIMRS yang tersedia / terupdate	60	369.885.755,88		12	33.010.000	0	-	0	0	3	29.920.000,00	3	3.005.900	6	32.925.900,00	99,75	6	32.925.900,00	10,00	8,90
30	1.02.1.02.01.00.30 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1)Cakupan keluarga yang ber PHBS, 2)Persentase sekolah yang melaksanakan promosi kesehatan, 3)Persentase sekolah yang melaksanakan PHBS, 4)Persentase Posyandu purnama mandiri, 5)Indeks keluarga sehat	60	6.733.263.485,34	0,00	12	558.248.000	3	91.943.000,00	3	54.500.000	3	111.850.000	3	272.889.000	12	531.182.000,00	95,15	12	531.182.000,00	20,00	7,89
001	1.02.1.02.01.00.30.001 Kemitraan Pengembangan Promosi Kesehatan Sekolah	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan di Sekolah	60	618.760.187,38		12	3.000.000	0	-	0	0	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000,00	100,00	3	3.000.000,00	5,00	0,48
002	1.02.1.02.01.00.30.002 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Jumlah Puskesmas yang dilakukannya Monitoring dan Evaluasi (Monev)	60	293.372.339,96		12	20.523.000	3	8.893.000,00	3	1.500.000	3	1.000.000,00	3	9.100.000	12	20.493.000,00	99,85	12	20.493.000,00	20,00	6,99
003	1.02.1.02.01.00.30.003 Pengembangan Media promosi dan Informasi dan Edukasi	1)Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, 2)Jumlah jenis media dalam pengembangan promosi, informasi, dan edukasi kesehatan, 3)Jumlah event promosi kesehatan yang diikuti	60	3.493.442.217,04		12	426.925.000	3	75.700.000,00	3	44.250.000	3	50.400.000,00	3	229.539.000	12	399.889.000,00	93,67	12	399.889.000,00	20,00	11,45



Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022

004	1.02.1.02.01.00.30.004	Jumlah penyelenggaraan kader Posyandu dan kaji banding	60	2.327.688.740,96		12	107.800.000	3	7.350.000,00	3	8.750.000	3	60.450.000,00	3	31.250.000	12	107.800.000,00	100,00	12	107.800.000,00	20,00	4,63
31	1.02.1.02.01.00.31	Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	60	3.837.563.358,63	0,00	12	1.432.338.500	3	277.262.000,00	3	11.486.225	3	216.632.500	3	223.806.700	12	729.187.425,00	50,91	12	729.187.425,00	20,00	19,00
001	1.02.1.02.01.00.31.001	Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan	60	366.106.224,10		12	35.731.500	3	5.094.500,00	0	0	3	3.307.500,00	3	23.419.000	9	31.821.000,00	89,06	9	31.821.000,00	15,00	8,69
003	1.02.1.02.01.00.31.003	Terselenggaranya Pengawasan dan Pembinaan Sarana Kesehatan Dasar	60	820.252.330,91		12	42.542.000	3	6.662.500,00	3	6000000	3	5.094.000,00	3	24.785.000	12	42.541.500,00	100,00	12	42.541.500,00	20,00	5,19
006	1.02.1.02.01.00.31.006	1) Terlaksananya Survei Verifikasi RSUD 2) Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang direview	60	1.190.405.803,62		12	8.525.000	3	375.000,00	3	5.486.225	0	-	3	2.625.700	9	8.486.925,00	99,55	9	8.486.925,00	15,00	0,71
008	1.02.1.02.01.00.31.008	Jumlah FKTP yang di Survey Akreditasi	60	1.460.799.000,00		12	1.345.540.000	3	265.130.000,00	0	-	3	208.231.000,00	3	172.977.000	9	646.338.000,00	48,04	9	646.338.000,00	15,00	44,25
32	1.02.1.02.01.00.32	Jumlah UPTD/UPK yang memberikan pelayanan sesuai standar	60	262.111.797.993,42	0,00	12	53.332.384.942	3	4.851.581.633,00	3	11.208.083.519	3	12.373.334.572	3	20.427.776.219	12	48.860.775.943,00	91,62	12	48.860.775.943,00	20,00	18,64
002	1.02.1.02.01.00.32.002	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	60	19.215.951.552,19		12	9.868.909.125	3	12.113.000,00	3	65.390.000	3	2.508.613.652,00	3	6.650.692.994	12	9.236.809.646,00	93,60	12	9.236.809.646,00	20,00	48,07
003	1.02.1.02.01.00.32.003	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan BLUD Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)	60	10.499.976.900,95		12	2.359.942.084	3	449.463.325,00	3	504.862.463	3	505.687.085,00	3	623.064.867	12	2.083.077.740,00	88,27	12	2.083.077.740,00	20,00	19,84



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

009	1.02.1.02.01.00 .32.009 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan APBD (Puskesmas Banjar Serasan)	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan APBD Puskesmas Banjar Serasan	3 6	1.511.702. 197,38	1 2	245.380.00 0	3	48.904.886,0 0	3	60.930.537	3	66.266.172. 00	3	64.011.931	12	240.113.526,0 0	97,85	1 2	240.113.526, 00	33,33	15,88
010	1.02.1.02.01.00 .32.010 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Gang Sehat	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Gang Sehat	6 0	4.397.902. 223,03	1 2	781.606.40 5	3	26.657.888,0 0	3	268.684.85 2	3	157.243.872 ,00	3	259.351.897	12	711.938.509,0 0	91,09	1 2	711.938.509, 00	20,00	16,19
011	1.02.1.02.01.00 .32.011 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan APBD (Puskesmas Gang Sehat)	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan APBD Puskesmas Gang Sehat	6 0	3.662.459. 120,58	1 2	592.437.80 0	3	88.436.118,0 0	3	122.747.50 5	3	121.726.434 ,00	3	207.548.989	12	540.459.046,0 0	91,23	1 2	540.459.046, 00	20,00	14,76
012	1.02.1.02.01.00 .32.012 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Puskesmas Kampung Bali (BLUD))	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan BLUD Puskesmas Kampung Bali	6 0	4.087.581. 059,08	1 2	889.135.06 0	3	111.030.216, 00	3	182.608.14 6,00	3	189.354.638 ,00	3	330.363.853	12	813.356.853,0 0	91,48	1 2	813.356.853, 00	20,00	19,90
013	1.02.1.02.01.00 .32.013 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Kampung Bali	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Kampung Bali	6 0	3.360.613. 727,94	1 2	491.351.58 4	3	6.539.472,00	3	154.730.21 8	3	121.778.208 ,00	3	113.561.494	12	396.609.392,0 0	80,72	1 2	396.609.392, 00	20,00	11,80
014	1.02.1.02.01.00 .32.014 - Penyediaan Biaya Operasional	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan APBD Puskesmas Kampung Bali	6 0	1.598.029. 134,40	1 2	264.603.00 0	3	39.059.895,0 0	3	61.254.454	3	66.053.700, 00	3	63.855.463	12	230.223.512,0 0	87,01	1 2	230.223.512, 00	20,00	14,41



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

0 2 5	Komyos Sudarso)	1.02.1.02.01.00 .32.025 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Pal Lima	6 0	2.240.440. 758,57	1 2	347.380.62 5	3	13.078.944,0 0	3	149.237.38 9	3	79.057.337, 00	3	93.389.438	12	334.763.108,0 0	96,37	1 2	334.763.108, 00	20,00	14,94
0 2 6		1.02.1.02.01.00 .32.026 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan APBD (Puskesmas Pal Lima)	6 0	1.034.334. 100,31	1 2	172.588.40 5	3	27.215.900,0 0	3	34.160.595	3	42.472.182, 00	3	47.816.079	12	151.664.756,0 0	87,88	1 2	151.664.756, 00	20,00	14,66
0 2 7		1.02.1.02.01.00 .32.027 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Pal Tiga	6 0	3.817.047. 214,00	1 2	508.664.48 6	3	19.993.416,0 0	3	127.411.31 2	3	152.051.832 ,00	3	135.430.876	12	434.887.436,0 0	85,50	1 2	434.887.436, 00	20,00	11,39
0 2 8		1.02.1.02.01.00 .32.028 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan APBD (Puskesmas Pal Tiga)	6 0	1.026.798. 581,48	1 2	164.469.66 6	3	22.573.336,0 0	3	38.759.055	3	33.471.535, 00	3	37.610.770	12	132.414.696,0 0	80,51	1 2	132.414.696, 00	20,00	12,90
0 2 9		1.02.1.02.01.00 .32.029 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Paris Dua	6 0	3.196.960. 223,11	1 2	429.319.33 0	3	22.700.652,0 0	3	122.031.57 2	3	71.185.325, 00	3	167.597.327	12	383.514.876,0 0	89,33	1 2	383.514.876, 00	20,00	12,00



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

030	1.02.1.02.01.00 .32.030 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan APBD (Puskesmas Paris Dua)	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan APBD Puskesmas Paris Dua	6 0	1.230.436. 443,66	1 2	206.277.98 7	3	29.385.881,0 0	3	47.785.307	3	39.170.304, 00	3	68.735.115	12	185.076.607,0 0	89,72	1 2	185.076.607, 00	20,00	15,04
031	1.02.1.02.01.00 .32.031 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Parit Mayor	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Parit Mayor	6 0	2.240.440. 758,57	1 2	322.567.72 3	3	15.286.180,0 0	3	114.411.62 4	3	35.540.124, 00	3	98.218.257	12	263.456.185,0 0	81,67	1 2	263.456.185, 00	20,00	11,76
032	1.02.1.02.01.00 .32.032 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan APBD (Puskesmas Parit Mayor)	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan APBD Puskesmas Parit Mayor	6 0	1.650.986. 784,30	1 2	284.697.00 0	3	40.231.828,0 0	3	65.598.942	3	77.079.449, 00	3	62.771.705	12	245.681.924,0 0	86,30	1 2	245.681.924, 00	20,00	14,88
033	1.02.1.02.01.00 .32.033 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Perumnas Dua	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Perumnas Dua	6 0	3.526.572. 299,57	1 2	784.199.95 4	3	15.536.180,0 0	3	134.343.12 0	3	440.682.124 ,00	3	134.405.617	12	724.967.041,0 0	92,45	1 2	724.967.041, 00	20,00	20,56
034	1.02.1.02.01.00 .32.034 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan APBD (Puskesmas Perumnas Dua)	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan APBD Puskesmas Perumnas Dua	6 0	1.238.780. 218,68	1 2	204.588.00 0	3	31.681.125,0 0	3	47.781.641	3	45.277.592, 00	3	50.963.195	12	175.703.553,0 0	85,88	1 2	175.703.553, 00	20,00	14,18
035	1.02.1.02.01.00 .32.035 - Penyediaan Biaya	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan BLUD	6 0	4.526.450. 392,40	1 2	1.235.396.6 40	3	177.984.323, 00	3	299.362.52 1	3	290.863.681 ,00	3	425.410.024	12	1.193.620.549 ,00	96,62	1 2	1.193.620.54 9,00	20,00	26,37



0 4 6	1.02.1.02.01.00 .32.046 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Siantan Hulu	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Siantan Hulu	6 0	2.655.337. 190,43	1 2	545.883.83 9	3	15.786.180,0 0	3	201.824.41 4	3	95.191.524, 00	3	224.717.257	12	537.519.375,0 0	98,47	1 2	537.519.375, 00	20,00	20,24
0 4 7	1.02.1.02.01.00 .32.047 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan APBD (Puskesmas Siantan Hulu)	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan APBD Puskesmas Siantan Hulu	6 0	1.421.464. 218,56	1 2	237.249.20 0	3	43.298.632,0 0	3	48.382.003	3	73.119.003, 00	3	52.853.514	12	217.653.152,0 0	91,74	1 2	217.653.152, 00	20,00	15,31
0 4 8	1.02.1.02.01.00 .32.048 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Siantan Tengah	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Siantan Tengah	6 0	2.987.254. 140,31	1 2	719.574.15 1	3	22.950.652,0 0	3	228.155.13 2	3	114.172.832 ,00	3	229.599.785	12	594.878.401,0 0	82,67	1 2	594.878.401, 00	20,00	19,91
0 4 9	1.02.1.02.01.00 .32.049 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan APBD (Puskesmas Siantan Tengah)	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan APBD Puskesmas Siantan Tengah	6 0	1.858.529. 681,92	1 2	311.747.03 4	3	60.423.332,0 0	3	77.402.675	3	60.724.183, 00	3	78.147.885	12	276.698.075,0 0	88,76	1 2	276.698.075, 00	20,00	14,89
0 5 0	1.02.1.02.01.00 .32.050 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Tambelan Sampit	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Tambelan Sampit	6 0	2.157.461. 469,99	1 2	248.129.01 8	3	15.911.180,0 0	3	72.638.624	3	47.018.924, 00	3	100.788.157	12	236.356.885,0 0	95,26	1 2	236.356.885, 00	20,00	10,96



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

051	1.02.1.02.01.00 .32.051 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan APBD (Puskesmas Tambelan Sampit)	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan APBD Puskesmas Tambelan Sampit	60	1.135.296.196,63	12	189.080.000	3	24.308.086,00	3	45.929.306	3	44.539.868,00	3	57.672.053	12	172.449.313,00	91,20	12	172.449.313,00	20,00	15,19
052	1.02.1.02.01.00 .32.052 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Tanjung Hulu	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Tanjung Hulu	60	2.157.461.469,99	12	334.974.174	3	13.203.944,00	3	116.861.246	3	89.240.233,00	3	84.749.388	12	304.054.811,00	90,77	12	304.054.811,00	20,00	14,09
053	1.02.1.02.01.00 .32.053 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan APBD (Puskesmas Tanjung Hulu)	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan APBD Puskesmas Tanjung Hulu	60	1.065.132.200,69	12	178.162.085	3	28.262.246,00	3	47.742.388	3	38.463.543,00	3	53.379.970	12	167.848.147,00	94,21	12	167.848.147,00	20,00	15,76
054	1.02.1.02.01.00 .32.054 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Telaga Biru	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Puskesmas Telaga Biru	60	2.773.562.944,63	12	533.477.388	3	16.411.180,00	3	172.309.323	3	117.253.776,00	3	133.436.206	12	439.410.485,00	82,37	12	439.410.485,00	20,00	15,84
055	1.02.1.02.01.00 .32.055 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan APBD (Puskesmas Telaga Biru)	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan APBD Puskesmas Telaga Biru	60	1.272.985.892,26	12	213.978.365	3	37.045.344,00	3	51.984.372	3	54.113.590,00	3	56.962.004	12	200.105.310,00	93,52	12	200.105.310,00	20,00	15,72



056	1.02.1.02.01.00 .32.056 - Penanggulangan Masalah Kesehatan	1) Persentase event atau kegiatan yang didampingi 118, 2) Pelayanan Posko 118 per hari(jumlah jam)	60	982.429.60 8,10			12	392.005.00 0	3	28.865.000,0 0	3	65.728.500	3	94.005.300, 00	3	127.689.200	12	316.288.000,0 0	80,68	12	316.288.000, 00	20,00	32,19
057	1.02.1.02.01.00 .32.057 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Puskesmas Alianyang (BLUD))	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan BLUD Alianyang	60	7.503.289. 623,99			12	1.741.909,5 97	3	163.436.002, 00	3	361.612.54 3	3	346.763.090 ,00	3	782.046.224	12	1.653.857.859 ,00	94,95	12	1.653.857.85 9,00	20,00	22,04
058	1.02.1.02.01.00 .32.058 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Puskesmas PalTiga (BLUD))	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan BLUD Pal Tiga	60	3.274.066. 495,05			12	852.331.97 7	0	68.597.846,0 0	3	131.578.61 6	3	138.985.910 ,00	3	385.045.269	9	724.207.641,0 0	84,97	9	724.207.641, 00	15,00	22,12
059	1.02.1.02.01.00 .32.059 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Puskesmas Karya Mulia (BLUD))	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan BLUD Karya Mulia	60	3.364.360. 194,33			12	595.375.68 7	3	57.790.359,0 0	3	122.930.97 4	3	120.838.002 ,00	3	223.899.041	12	525.458.376,0 0	88,26	12	525.458.376, 00	20,00	15,62
060	1.02.1.02.01.00 .32.060 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Puskesmas Kampung Dalam (BLUD))	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan BLUD Kampung Dalam	60	7.448.279. 157,88			12	1.510.013,0 40	3	175.979.870, 00	3	498.276.52 1	3	289.257.248 ,00	3	504.970.382	12	1.468.484.021 ,00	97,25	12	1.468.484.02 1,00	20,00	19,72
061	1.02.1.02.01.00 .32.061 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Puskesmas Tambelan Sampit (BLUD))	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan BLUD Tambelan Sampit	60	1.421.551. 413,02			12	323.370.18 8	3	38.930.472,0 0	3	84.686.683	3	57.972.502, 00	3	117.298.490	12	298.888.147,0 0	92,43	12	298.888.147, 00	20,00	21,03



Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022

062	1.02.1.02.01.00 .32.062 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Puskesmas Parit Mayor (BLUD))	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan BLUD Parit Mayor	6 0	1.277.678. 662,40	1 2	228.204.76 6	0	7.205.000,00	3	65.059.840	3	49.336.356, 00	3	81.995.172	9	203.596.368,0 0	89,22	9	203.596.368, 00	15,00	15,93
063	1.02.1.02.01.00 .32.063 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Puskesmas Tanjung Hulu (BLUD))	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan BLUD Puskesmas Tanjung Hulu	6 0	2.238.689. 122,41	1 2	563.674.30 1	3	68.187.625,0 0	3	102.054.54 2	3	95.996.231, 00	3	183.955.912	12	450.194.310,0 0	79,87	1 2	450.194.310, 00	20,00	20,11
064	1.02.1.02.01.00 .32.064 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Puskesmas Banjar Serasan (BLUD))	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan BLUD Banjar Serasan	6 0	2.055.400. 883,70	1 2	396.617.57 9	3	35.769.700,0 0	3	118.356.26 5	3	89.803.229, 00	3	124.697.129	12	368.626.323,0 0	92,94	1 2	368.626.323, 00	20,00	17,93
065	1.02.1.02.01.00 .32.065 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Puskesmas Perumnas Dua (BLUD))	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan BLUD Puskesmas Perumnas Dua	6 0	7.739.078. 233,46	1 2	1.340.954.5 98	3	181.770.185, 00	3	295.683.73 5	3	306.031.060 ,00	3	472.471.102	12	1.255.956.082 ,00	93,66	1 2	1.255.956.08 2,00	20,00	16,23
066	1.02.1.02.01.00 .32.066 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Puskesmas Pal Lima (BLUD))	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan BLUD Puskesmas Pal Lima	6 0	2.137.800. 174,40	1 2	490.407.55 8	3	68.493.625,0 0	3	100.307.42 0	3	92.630.903, 00	3	210.553.882	12	471.985.830,0 0	96,24	1 2	471.985.830, 00	20,00	22,08
067	1.02.1.02.01.00 .32.067 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Puskesmas Sudarso)	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan BLUD Puskesmas Kom Yos Sudarso	6 0	3.935.710. 603,72	1 2	922.804.13 5	3	72.972.504,0 0	3	232.538.76 1	3	136.892.270 ,00	3	442.142.378	12	884.545.913,0 0	95,85	1 2	884.545.913, 00	20,00	22,47



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

1. Struktur Organisasi

Keberadaan Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak dan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 66 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
 - 2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
 - 2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian
 - 3.1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan
 - 3.2. Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
 - 3.3. Kepala Seksi Sistem Informasi, Sarana dan Prasarana Kesehatan
4. Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 - 4.1. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit
 - 4.2. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit
 - 4.3. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan
5. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
 - 5.1. Kepala Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
 - 5.2. Kepala Seksi Gizi
 - 5.3. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu



Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a Perumusan kebijakan dibidang kesehatan
- b Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan
- c Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan
- d Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan
- e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Tersedianya Sumber Daya manusia yang cukup dan berkualitas, sampai dengan 31 Desember 2019 ini, jumlah seluruh pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan sebanyak 896 orang dengan rincian sesuai dengan unit tempat tugas adalah sebagai berikut :

Dinkes Kota Pontianak	:	99 orang
23 Puskesmas	:	608 orang
BP Gigi dan BP Mata	:	17 orang
Pusat Lab. Kesehatan	:	8 orang
RSUD	:	235 orang
Jumlah		967 orang

Dari pegawai yang ada tersebut 36 orang merupakan Pejabat Struktural dengan rincian sebagai berikut :

Pejabat Eselon II B	:	1 orang
Pejabat Eselon III A	:	1 orang
Pejabat Eselon III B	:	7 orang
Pejabat Eselon IV A	:	22 orang
<u>Pejabat Eselon IV B</u>	:	<u>7 orang</u>
Jumlah		38 orang



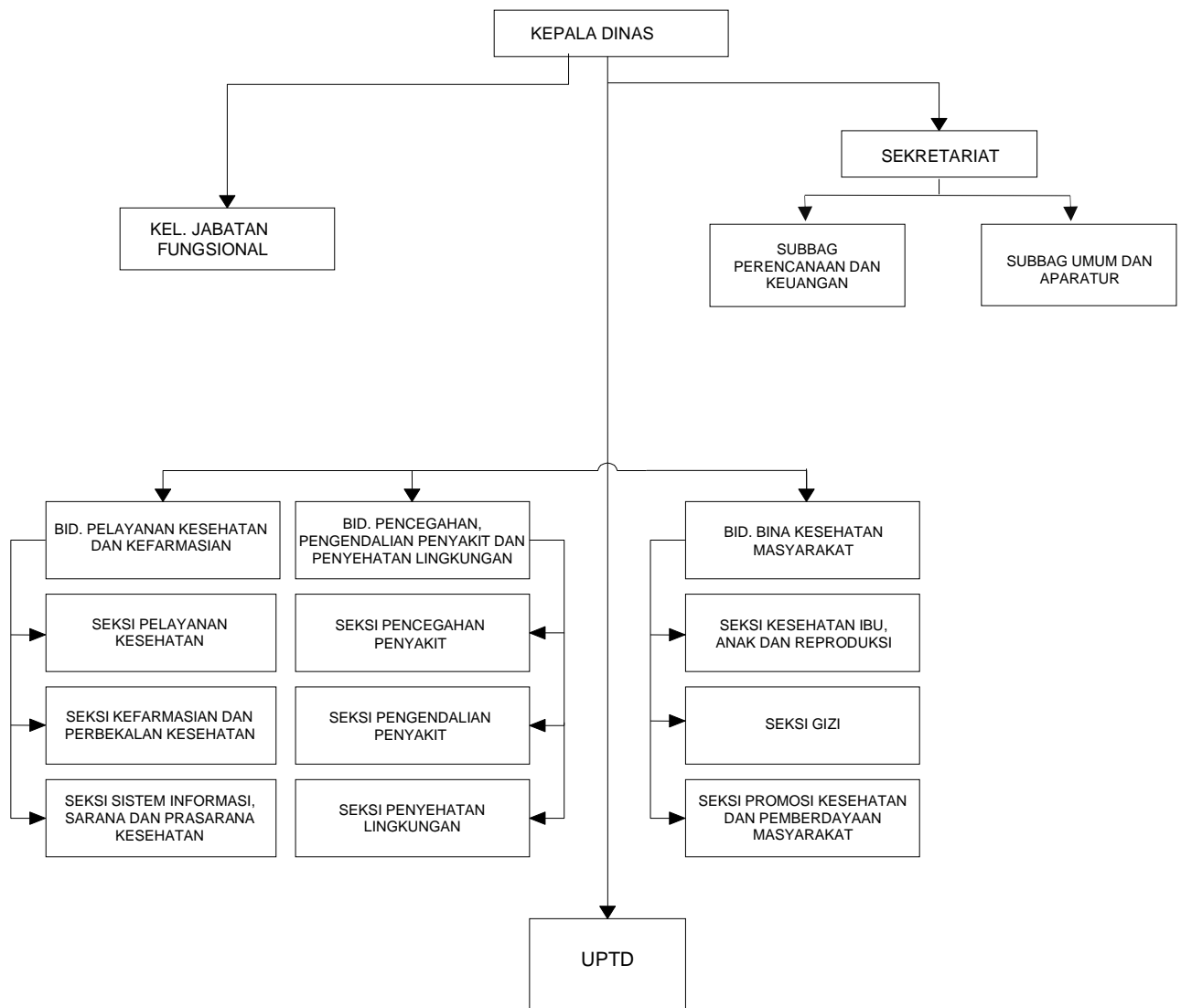
Sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak, maka Dinas Kesehatan Kota Pontianak memiliki 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Kecamatan yang membawahi 17 Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Puskesmas. Dalam menjalankan fungsinya UPTD Puskesmas di pimpin oleh 1 (satu) pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD, sedangkan Kasubbag Tata Usahanya adalah pejabat Struktural Eselon IV b.

Disamping UPTD dan UPK Puskesmas yang dibawah Dinas Kesehatan Kota Pontianak, pada tahun 2016 terdapat penambahan UPTD di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 83 tahun 2016 tentang Pembentukan UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak, sehingga terhitung mulai Tanggal 1 Januari Tahun 2017 RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie ditetapkan menjadi UPTD dibawah Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Selain UPTD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, sebelumnya terdapat 2 (dua) UPTD lainnya dibawah Dinas Kesehatan Kota Pontianak sesuai Peraturan Walikota nomor 12 Tahun 2003 tentang pembentukkan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Mata dan Gigi pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Peraturan Walikota nomor 24 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pusat Laboratorium dan Informasi Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Sehingga total keseluruhan UPTD dan UPK pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak adalah sebanyak 26 unit.

Adapun bagan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2
Struktur Dinas Kesehatan



b. Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana kesehatan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan akan menentukan keberhasilan organisasi. Sarana pendukung pelayanan kesehatan yang mempunyai peranan cukup penting adalah tersedianya bangunan (gedung) yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kebutuhan.



Sampai dengan tanggal 1 Maret 2021, Dinas Kesehatan memiliki bangunan gedung antara lain :

- Rumah Dinas bagi tenaga medis dan paramedis
Puskesmas :16 buah
- Rumah Dinas bagi tenaga medis dan paramedis
Rumah Sakit Umum Daerah :10 buah
- Gedung Puskesmas :23 buah
- Gedung Puskesmas Pembantu : 9 buah
- Gedung Rumah Sakit Umum Daerah : 1 buah
- Gedung Pengelola Farmasi : 1 buah
- Gedung Laboratorium Kesehatan : 1 buah
- Gedung Balai Kesehatan Mata Masyarakat : 1 buah
- Posyandu Permanen :52 buah

Luas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak beserta UPTD nya adalah seluruh wilayah Kota Pontianak, sehingga diperlukan sarana penunjang berupa kendaraan dinas. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 kendaraan dinas yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

- Kendaraan puskesmas keliling : 6 buah
- Ambulance : 21 buah
- Mobil Jenazah : 1 buah
- Mini Bus : 25 buah
- Mobil Pick Up : 3 buah
- Kendaraan dinas roda dua : 117 buah

3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran Tahun 2020, sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2020. Adapun pengukuran dilakukan terhadap target sasaran indikator kinerja utama (IKU) dan indikator program yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan tahun 2020. Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap



pelayanan kesehatan, target yang telah dicapai, faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hal ini dapat ditemukan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik. Berikut Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020 :

Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Uraian Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar	Angka Kematian Ibu	49,50 per 100.000 KH	72,12 per 100.000 KH
		Angka Kematian Bayi	2,40 per 1000 KH	2,16 per 1000 KH
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita	14,00 %	7,06 %
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Bawah Dua Tahun	21 %	8,73%
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang memenuhi Persyaratan sesuai standar	100 %	0%
		Menurunnya Kesakitan Penderita DBD	< 49 Per 100.000 penduduk	4,04 per 100.000 penduduk
		Menurunnya Kesakitan Penderita HIV	< 0,015% penduduk	0.017% penduduk
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Rumah Sakit di Kota Pontianak yang Terakreditasi	75%	92,31%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2021

Dari tabel diatas jumlah keseluruhan Indikator Sasaran sebanyak 2 (dua) Sasaran, yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran keseluruhan adalah 134,96%. Adapun sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar meliputi beberapa indikator



utama yaitu Menurunnya Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup, Menurunnya Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup, Menurunnya Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada Anak Balita, Menurunnya Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Anak dibawah Dua Tahun, Persentase FKTP yang memenuhi persyaratan sesuai standar, Menurunnya kesakitan penderita DBD, serta Menurunnya kesakitan penderita HIV. Dan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan meliputi indikator utama yaitu Persentase Rumah Sakit di Kota Pontianak yang terakreditasi.

Analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada masing-masing Indikator sebagai berikut:

1) Angka Kematian Ibu per 100.000 KH

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Target pada Indikator Kinerja Utama pada sasaran Angka Kematian Ibu sebesar 49,50 per 100.000 KH, dimana persentasenya sebesar 54,31 %, permasalahan pada Tahun 2020 disebabkan karena adanya Kasus Kematian Ibu Tahun 2020 menjadi 8 (delapan) kasus, sedangkan Tahun 2019 yaitu 5 (lima) kasus. Namun dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah melakukan beberapa upaya untuk menurunkan kejadian tersebut diantaranya :

- a) Mengoptimalkan peran Jejaring Kesehatan Ibu dan Anak.
- b) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA), Kualitas Pelayanan Bidan Praktek swasta dan Rumah Sakit.
- c) Pendekatan Keluarga untuk memantau Faktor Resiko
- d) Mengoptimalkan Kegiatan Audit Maternal, sehingga mampu menganalisis penyebab Kematian Ibu, dan upaya pencegahan agar tidak terjadi kejadian serupa.



2) Angka Kematian Bayi per 1000 KH

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Target Indikator Angka Kematian Bayi Tahun 2020 sebesar 2,40 per 1000 KH, dengan Capaian indikator sebesar 109,85%. Adapun permasalahannya disebabkan karena masih ada kasus Kematian Bayi di Tahun 2020 sebanyak 24 (dua puluh empat) kasus, dan di Tahun 2019 sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus.

Solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak terkait permasalahan kematian Bayi, sebagai berikut :

- a) Mengoptimalkan peran Jejaring Kesehatan Ibu dan Anak.
- b) Melaksanakan Kegiatan Audit Maternal
- c) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA), Kualitas Pelayanan Bidan Praktek swasta dan Rumah Sakit.
- d) Pendekatan Keluarga untuk memantau Faktor Resiko

3) Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita

Target pada Indikator Kinerja Utama Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita Tahun 2020 sebesar 14%. Adapun realisasinya sebesar 7,06% dengan Capaian indikator sebesar 149,56%. Beberapa permasalahan pada peningkatan Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita antara lain:

- a. Kurang teridentifikasinya balita yang tidak pernah ditimbang oleh puskesmas dan kader posyandu dan balita tersebut menjadi sampel survey PSG; hal ini dimungkinkan karena di beberapa puskesmas kader kurang aktif merujuk balita Bawah Garis Merah ke Puskesmas sehingga saat menjadi sampel survey, balita



- balita tersebut sudah terlanjur dalam keadaan kurang gizi (Underweight). Semakin turunnya partisipasi masyarakat untuk membawa anaknya pemantauan tumbuh kembang ke posyandu juga menjadi salah satu hal yang berkontribusi
- b. Balita sering sakit sehingga susah makan. Penyakit yang sering diderita antara lain demam, batuk, pilek, diare.
 - c. Belum banyak ibu yang mengetahui Pemberian Makan bagi Bayi dan Anak yang benar, sehingga praktek pemberian makan pada balita kurang baik
 - d. Semakin banyak balita yang tidak diasuh sendiri oleh ibu atau keluarga inti dikarenakan orang tua harus bekerja; pengasuhan dialihkan ke keluarga lain atau tempat penitipan anak dan tidak diketahui apakah pengasuhan seperti ini menjamin balita terpantau pertumbuhannya seperti tampak dari perubahan Berat Badan.

Solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak terkait Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita, yaitu :

- a) Pendampingan oleh Kader Kadarzi
- b) Pemantauan Status Gizi (PSG) di Puskesmas.
- c) Pendekatan Keluarga untuk memantau Status Gizi Balita sehingga apabila terdapat masalah segera dapat diintervensi.

4) Prevalensi Stunting (Pendek atau Sangat Pendek) pada Anak Usia Dua Tahun (Baduta)

Target pada Indikator Kinerja Utama pada sasaran Prevalensi Stunting (Pendek atau Sangat Pendek) pada Anak Usia Dua Tahun (Baduta) adalah 21%, dengan Capaian Indikatornya sebesar 158,4%. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih



pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Beberapa permasalahan terkait stunting, diantaranya :

- a. Kekurangan gizi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran). Penyebabnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani.
- b. Faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktek pemberian makan kepada anak.
- c. Ibu yang masa remaja dan masa kehamilannya kurang nutrisi, sehingga terjadi penurunan produksi laktasi.

Beberapa solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak, adalah :

- a) Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui Sosialisasi dan Koordinasi Lintas Sektor

5) Persentase FKTP yang memenuhi Persyaratan sesuai standar

Target Indikator Kinerja Utama Persentase FKTP yang memenuhi Persyaratan sesuai standar tahun 2020 sebesar 100%, sedangkan Capaian indikatornya sebesar 100%. Namun pelaksanaan akreditasi FKTP di tahun 2020 tidak bisa dilakukan dikarenakan pandemic Covid-19. Secara umum capaian telah mencapai target yang ditetapkan namun masih ditemukan kendala teknis yang tidak signifikan diantaranya :

- a) Pemenuhan dan peningkatan SDM, Sarana Prasarana, Alat Kesehatan, dan penyediaan yang belum memadai untuk Operasional Puskesmas dan pelayanan Puskesmas.



- b) Pengisian formulir Instrument FKTP belum memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014

6) Menurunnya Kesakitan Penderita DBD

Indikator Kinerja Utama Menurunnya Kesakitan Penderita DBD memiliki Target di tahun 2020 sebesar < 49 Per 100.000 Penduduk. Capaian indikatornya sebesar 191,60%, permasalahan disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang penularan DBD dimasyarakat, seperti pemberantasan sarang nyamuk yang efektif dan efisien melalui kegiatan 3-M, yaitu menguras, menutup/menabur abate di tempat penampungan air, dan mengubur/menyingsingkan barang-barang bekas yang memungkinkan dijadikan tempat perindukan dan perkembangbiakan jentik nyamuk *Aedes aegypti*, dan kebersihan lingkungan. Adapun Solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak, adalah pengendalian DBD yang dilakukan secara terus menerus, bentuk kegiatan yaitu :

- a) Pelaksanaan PSN-PJB secara kontinyu
- b) Sosialisasi Gerakan 1 (satu) Rumah 1(satu) Jumantik (G1R1J)

7) Menurunnya Kesakitan Penderita HIV

Target Indikator Kinerja Utama Menurunnya Kesakitan Penderita HIV Tahun 2020 sebesar < 0,015 % Penduduk. Namun untuk Capaian Indikatornya baru mencapai 86,16 %. Adapun solusi yang dilakukan Dinas Kesehatan antara lain :

- a) Pelaksanaan sosialisasi Pencegahan HIV melalui jejaring kerja (PKBI, Yayasan Pontianak Plus, RBM, WPA, PE Remaja, MahaDwipa, Wisma Rahayu, Wes Borneo Eaction, KDS Sahabat, Wisma siri, Aisyah).



- b) Sosialisasi melalui Peringatan Hari AIDS Sedunia yang dimotori oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pontianak.

8) Persentase Rumah Sakit di Kota Pontianak yang Terakreditasi

Indikator Kinerja Utama Persentase Rumah Sakit di Kota Pontianak yang Terakreditasi Tahun 2020 memiliki Target sebesar 100%, dengan realisasi pada akhir tahun 2019 adalah sebesar 92,31%, sedangkan tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan kegiatan akreditasi rumah sakit dikarenakan pandemic covid-19. Adapun Capaian Indikator Kinerjanya sebesar 123,08%. Solusi yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk lebih meningkatkan kinerja peningkatan persentase rumah sakit terakreditasi adalah yaitu :

- a) Pertemuan Pembinaan Rumah Sakit, fasilitasi pertemuan untuk mendorong dan memonitor proses Akreditasi yang sudah berjalan di RS.
- b) Kunjungan lapangan ke Rumah Sakit untuk mengetahui kondisi lapangan dan progres Akreditasi yang sudah dijalankan.

Beberapa keberhasilan dari Sasaran Dinas Kesehatan Kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh adanya partisipasi aktif dari masyarakat, kesadaran untuk hidup sehat dan dukungan dari Petugas Kesehatan. Adapun gambaran kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel, sebagai berikut :



Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Pontianak Tahun 2020

No	Indikator	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Satuan	Target	Capaian		Realisasi 2020	%Capa ian Kinerja
							Pembilang	Penyebut		
1	2	3	4	5	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR KINERJA SASARAN										
1	Angka Kematian Ibu	v			Per 100.000 KH	49,50	8	11.093	72,12	54,31
2	Angka Kematian Bayi		v		Per 1000 KH	2,40	24	11.093	2,16	109,85
3	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		v		%	100,00	3.733	8.100	46,09	46,09
4	Insiden Rate HIV			v	%	<0,015	112	655.865	0,017	86,16
5	Insiden Rate DBD			v	%	<49	27	655.865	4,12	191,60
6	Prevalensi Penderita Hipertensi di Kota Pontianak			v	%	30,00	41.014	161.600	0,25	199,15
7	Prevalensi Penderita Diabetes Melitus di Kota Pontianak	v			%	2,60	5.630	13.295	0,42	183,71
8	Angka Stunting Balita				%	21,00	2.741	31.381	8,73	158,4
9	Angka Wasting Balita				%	12,00	1.101	31.414	3,50	170,79
10	Angka Underweight Balita				%	14,00	2.266	32.091	7,06	149,56
11	Akreditasi Fasilitas Kesehatan				%	100% (Utama/ Paripurna=1 Puskesmas	-	-		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)										
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)				%	100	11.334	12.576	90	90,12
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)				%	100	11.033	12.005	92	91,90
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)				%	100	10.483	11.433	92	91,69



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

4	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik				%	9	709	11.656	6,1	67,59
5	Cakupan komplikasi neonatus yang ditangani				%	100	1.249	1.715	73	72,83
6	Cakupan komplikasi kebidanan ditangani				%	100	2.404	2.515	96	95,59
7	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (SPM)				%	100	30.954	44.413	70	69,70
8	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)				%	100	45.846	96.441	48	47,54
9	Persentase upaya kesehatan yang mendapatkan dukungan operasional				%	100	23	23	100	100,00
10	Angka Bebas Jentik				%	95	32.673	45.006	73	76,42
11	Cakupan Penemuan Terduga TBC yang dilakukan screening				%	100	3.733	8.100	46	46,09
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)				%	100	13.884	15.880	87	87,43
13	Persentase penderita kusta yang Release From Treatment (RFT)				%	100	1	1	100	100,00
14	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)				%	100	2	29	7	6,90
15	Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap				%	93,5	6.438	11.822	54	58,24
16	Persentase Jamaah Calon Haji yang terdeteksi faktor resiko kesehatan				%	100	619	619	100	100,00
17	Cakupan Penemuan kasus non polio AFP				Kasus	3	1	3	1	33,33
18	Persentase Penyelidikan Epidemiologi (PE) < 24 jam pada Kelurahan yang mengalami KLB				%	100	3.843	3.843	100	100,00
19	Persentase Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)				%	44,82	16	29	55	123,10



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

20	Persentase Sarana Air Minum yang memenuhi persyaratan sesuai standar				%	100	33	33	100	100,00
21	Persentase Tempat Fasilitas Umum yang memenuhi syarat kesehatan				%	77,52	57	76	75	96,75
22	Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan				%	34	244	406	60	176,76
23	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)				%	100	41.014	161.600	25	25,38
24	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)				%	100	5.630	13.295	42	42,35
25	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)				%	100	924	1.377	67	67,10
26	Persentase WUS Usia 30-50 Tahun yang Melakukan Pemeriksaan Deteksi Dini kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim				%	10	1.441	99.816	1	14,44
27	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)				%	100	162.017	435.308	37	37,22
28	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)				%	100	29.578	57.076	52	51,82
29	Cakupan Keluarga yang ber PHBS				%	60	1.139	1.752	65	108,35
30	Persentase Sekolah yang melaksanakan PHBS				%	50	134	185	72	144,86
31	Persentase Posyandu Purnama Mandiri				%	65	208	294	71	108,84
32	Indeks Keluarga Sehat				%	22	28.266	131.357	22	97,81
33	Persentase Balita dengan masalah gizi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar				%	100	2.094	2.506	84	83,56



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

34	Persentase Bayi dengan Berat badan lahir rendah (BBLR) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar				%	1,80	353	355	99	5.524,26
35	Persentase Balita yang ditimbang Berat Badannya (D/S)				%	71	21.009	56.235	37	52,62
36	Persentase Remaja Putri dapat tablet tambah darah				%	56	5.478	17.304	32	56,53
37	Persentase Ibu hamil KEK dapat makanan tambahan				%	86	697	709	98	114,31
38	Persentase Balita kurus dapat makanan tambahan				%	74	655	671	98	131,91
39	Cakupan industri pangan Rumah tangga yang memiliki sertifikat PIRT				%	80	446	504	88	110,62
40	Persentase Sarana farmasi sesuai standar				%	100	319	319	100	100,00
41	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan kefarmasian sesuai standar				%	100	23	23	100	100,00
42	Persentase Puskesmas yang menggunakan obat secara rasional				%	100	23	23	100	100,00
43	Cakupan masyarakat miskin dan kelompok tertentu yang mendapat jaminan kesehatan				%	100	19.625	20.313	97	96,61
44	Persentase Sarana bangunan UPTD/UPK dan jaringannya yang memenuhi syarat				%	40	12	35	34	85,71
45	Persentase jenis pelayanan kesehatan yang memiliki SP dan SOP				%	100	25	25	100	100,00
46	Persentase puskesmas dan UPTD dengan ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan sesuai standar				%	100	23	23	100	100,00
47	Jumlah UPTD/UPK yang memberikan pelayanan sesuai standar				UPK/ UPTD	25	25	25	25	100,00



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

48	Persentase kecukupan data dan informasi kesehatan				%	100	1	1	100	100,00
49	Persentase FKTP yang melaksanakan sistem informasi kesehatan				%	100	25	25	100	100,00
50	Persentase kecukupan Sarana dan prasarana RSUD				%	100	29	29	100	100,00
51	Persentase Sistem informasi RS dan Media Promosi Penyuluhan sesuai standar				%	71,43	16	21	76	106,66
52	Persentase Sarana dan prasarana RSUD berfungsi dengan baik				%	100	29	29	100	100,00
53	Persentase Rumah Sakit yang sudah melakukan simulasi Akreditasi Nasional				%	100	-	1	-	
54	Persentase Tenaga kesehatan RS yang profesional, dan memenuhi standar kompetensi				%	81	180	180	100	123,46
55	Terwujudnya tata kelola administrasi dan manajemen RS				%	100	3	3	100	100,00
56	Nilai tingkat kepuasan masyarakat				%	100	83	88	94	94,32
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)										
1	Persentase ketersediaan bahan pendukung kegiatan pelayanan kesehatan maternal, Neonatal, Bayi				%	100	100	100	100	100,00
2	Jumlah evaluasi program KIA				Kali	9	2	9	2	22,22
3	Jumlah Audit Maternal Perinatal yang dilaksanakan				Kali	3	1	3	1	33,33
4	Jumlah puskesmas yang dilaksanakan standarisasi				Puskesmas	4	4	4	4	100,00
5	Jumlah Petugas yang terlatih Asuhan Persalinan Normal				org	15	15	15	15	100,00
6	Jumlah Petugas yang terlatih penatalaksanaan Asfeksia				org	12	-	-		
7	Jumlah Petugas yang memahami Pelayanan KIA				org	12	-	12		



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

8	Persentase ibu hamil dan ibu bersalin dan neonatal yang mendapatkan jaminan persalinan				%	100	419	436	96	96,10
9	Jumlah Petugas yang terlatih Pelayanan Anak Balita, Anak Usia Sekolah, dan Remaja				org	90	-	90		
10	Persentase ketersediaan bahan pendukung pelayanan kesehatan anak balita, anak usia sekolah dan remaja				%	100	100	100	100	99,50
11	Jumlah petugas kesehatan yang terampil dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				Kali Kegiatan	2	-	12	-	
12	Jumlah Kader kesehatan yang terlatih Pelayanan Anak Balita, Anak Usia Sekolah, dan Remaja				org	55	-	55	-	
13	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				%	55	-	55	-	
14	Jumlah Kelompok remaja yang mendapatkan pendampingan				Kelompok	3	-	3	-	
15	Persentase Puskesmas yang mendapatkan Dukungan Manajemen Satuan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal				%	100	4	4	100	100,00
16	Jumlah petugas yang terlatih aspek sia				org	36	12	36	12	33,33
17	Jumlah petugas yang memahami ANC dan PNC				org	150	63	150	63	42,00
18	Jumlah koordinasi lintas sektoral terkait dengan kesehatan anak usia sekolah dan remaja				Kali	1	1	1	1	100,00
19	Jumlah petugas kesehatan yang terlatih penatalaksanaan gizi buruk				org	26	-	-	-	
20	Jumlah petugas kesehatan				org	107	-	-	-	



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	yang terlatih imunisasi									
21	Jumlah petugas kesehatan yang terlatih program Pengendalian penyakit tidak menular			org	70	-	-	-		
22	Jumlah lokasi yang dilaksanakan fogging			Lokasi	1000	419	1.000	419	41,90	
23	Persentase ketersediaan bahan penunjang kegiatan fogging			%	100	100	100	100	100,00	
24	Jumlah mesin fogging yang diadakan			Mesin	4	4	4	4	100,00	
25	Persentase ketersediaan bahan pendukung program penyakit menular			%	100	100	100	100	100,00	
26	Jumlah petugas kesehatan yang terlatih pengelolaan Program TB			Orang	32	32	32	32	100,00	
27	Kampanye TB			Kegiatan	1	-	-	-	0,00	
28	Jumlah kader japati yang ditingkatkan kapasitasnya			Kader	25	-	-	-	0,00	
29	Jumlah kader yang melaksanakan Pendampingan Minum Obat			Kader	400	-	-	-	0,00	
30	Jumlah kunjungan pelayanan			Kunjungan	250	-	-	-	0,00	
31	Jumlah Kampanye HIV AIDS			Kegiatan	3	3	3	3	100,00	
32	Jumlah kader yang terlatih penanganan HIV AIDS			Kader	48	125	55	125	260,42	
33	Jumlah Orang Dengan HIV AIDS yang mendapatkan pendampingan			Orang	112	105	105	105	93,75	
34	Jumlah sosialisasi HIV AIDS			Kali Sosialisasi	1272	258	1.895	258	20,28	
35	Jumlah pertemuan koordinasi Program HIV			Kali Pertemuan	4	1	6	1	25,00	
36	Terlaksananya survey cepat perilaku			Kali Survey	0	-		-		
37	Persentase ketersediaan bahan pendukung dan media promosi imunisasi			%	100					
38	Jumlah evaluasi dan sosialisasi kegiatan imunisasi			Pertemuan	47	47	47	47	100,00	



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

39	Jumlah fasilitas kesehatan dan institusi yang mendapatkan pembinaan imunisasi				Fasilitas	81	81	81	81	100,00
40	Persentase Jamaah Calon Haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar				%	100	619	619	100	100,00
41	Jumlah tenaga kesehatan haji yang mendapatkan pelatihan				Tenaga Kesehatan	47	47	47	47	100,00
42	Jumlah pertemuan evaluasi pelayanan kesehatan jamaah haji				Kali Pertemuan	0			-	
43	Persentase ketersediaan bahan pendukung surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah				%	100	100	100	100	100,00
44	Jumlah Pertemuan Review dan Evaluasi Surveilans dan Penanggulangan Wabah				Kali	3	3	3	3	100,00
45	Jumlah petugas yang terlatih Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah				Petugas	57	57	57	57	100,00
46	Persentase kasus berpotensi KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi				%	100	100	100	100	100,00
47	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan pembinaan				Fasyankes	34	34	34	34	100,00
48	Jumlah Kelurahan yang dilakukan verifikasi ODF				Kelurahan	6	4	6	4	66,67
49	Jumlah kader yang terlatih STBM				Kader	60	-	60	-	0,00
50	Persentase ketersediaan bahan pendukung program kesehatan lingkungan				Paket	1	1	1	1	100,00
51	Jumlah sarana air minum yang dilakukan pengawasan				Sarana	33	33	33	33	100,00
52	Jumlah petugas sanitasi yang terlatih program kesehatan lingkungan				Petugas	23	23	23	23	100,00
53	Jumlah petugas kesehatan yang memahami program				Orang	23	23	23	23	100,00



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	kesehatan lingkungan									
54	Jumlah Tempat Tempat Umum Yang dilakukan Pengawasan			TTU	76	57	76	57	75,00	
55	Jumlah pertemuan/sosialisasi kegiatan pembinaan Tempat-tempat umum			Pertemuan	1	1	1	1	100,00	
56	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan Yang dilakukan Pengawasan			Kecamatan	406	162	406	162	39,90	
57	Jumlah penjamah makanan dan minuman yang mendapatkan pelatihan hygiene sanitasi			%	120	83	120	69	57,64	
58	Jumlah pelayanan mobile service PTM			Lokasi	100	-	-	-	0,00	
59	Jumlah petugas yang terlatih pelayanan PTM			Petugas	46	46	46	46	100,00	
60	Jumlah evaluasi program PTM			Kali	4	4	4	4	100,00	
61	Persentase ketersediaan bahan habis pakai pemeriksaan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim			%	100	100	100	100	100,00	
62	Persentase ketersediaan bahan pendukung kegiatan pemeriksaan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim			%	100	100	100	100	100,00	
63	Jumlah kampanye IVA dan Sadarnis			Kali	6	6	6	6	100,00	
64	Jumlah Kader kesehatan yang terlatih pelayanan PTM			Kader	0	-	-	-		
65	Persentase ketersediaan bahan pendukung kegiatan pengendalian PTM			%	100	100	100	100	100,00	
66	Jumlah Kegiatan Tipiring KTR			Kali	2	-	-	-	0,00	
67	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengawasan implementasi penerapan KTR			Puskesmas	23	-	23	-	0,00	



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

68	Jumlah puskesmas yang mendapatkan monev Program PTM				Puskesmas	23	23	23	23	100,00
69	Jumlah petugas puskesmas yang terlatih kesehatan jiwa				Petugas	23	23	23	23	100,00
70	Persentase ketersediaan bahan pendukung promosi kesehatan				%	100	100	100	100	100,00
71	Jumlah event promosi kesehatan yang dilaksanakan				Event	4	3	4	3	75,00
72	Jumlah kerjasama dengan mass media				Media	4	4	4	4	100,00
73	Jumlah pelaksanaan jambore (Posyandu dan Kota Sehat)				Kegiatan	2	-	2	-	
74	Jumlah kader posyandu yang mengikuti kaji banding				Kader	5	-	5	-	
75	Jumlah kegiatan Saka Bhakti Husada (rakornis, bhakti masyarakat, latihan gabungan dan perkemahan tingkat daerah)				Kegiatan	4	-	4	-	
76	Jumlah penyuluhan pola hidup sehat				Penyuluhan Pola Hidup Sehat	6	6	6	6	100,00
77	Jumlah Guru UKS yang dilatih				Orang	60	-	60	-	
78	Jumlah evaluasi PIS PK				Kali	2	2	2	2	
79	Jumlah dokumen profil promosi kesehatan				Dokumen	1	-	1	-	
80	Survey Pemantauan status gizi balita				Kegiatan	1	-	-	-	
81	Persentase tersedianya Alat dan Bahan peningkatan Gizi Masyarakat				%	100	6	7	86	85,71
82	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Program Gizi				Orang	400	400	400	400	100,00
83	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih program gizi masyarakat				Orang	23	-	-	-	
84	Jumlah kader terlatih program gizi masyarakat				Orang	0	-	-	-	
85	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan				Puskesmas	23	23	23	23	100,00



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	pembinaan Program gizi									
86	Jumlah evaluasi Program gizi				Kali	3	2	3	2	66,67
87	Jumlah pelaku usaha/industri rumah tangga yang diberikan sertifikat PIRT				IRTP	50	58	50	58	116,00
88	Persentase tersedianya bahan pendukung pengawasan dan pembinaan sarana kelarmasian				%	100	20	100	20	20,00
89	Jumlah fasilitas kesehatan yang diberikan pembinaan				Faskes	228	12	228	12	5,26
90	Jumlah penduduk yang mendapatkan pembayaran premi PBI Kota Pontianak				Peserta	20.313	19.625	20.313	19.625	96,61
91	Jumlah koordinasi TIM Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat				Kali	6	1		1	16,67
92	Jumlah dokumen Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat yang dihasilkan				Dokumen	1	1		1	100,00
93	Jumlah Puskesmas jaringannya yang dibangun				Puskesmas	1			-	
94	Jumlah Posyandu yang dibangun				Posyandu	2			-	
95	Jumlah Puskesmas dan Jaringannya yang dilakukan Renovasi dan Revitalisasi				Puskesmas	3	9	3	9	300,00
96	Jumlah Posyandu yang dilakukan Renovasi dan Revitalisasi				Posyandu	0			-	
97	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				Puskesmas	1	1	1	1	100,00
98	Jumlah Posyandu yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				Posyandu	0			-	
99	Jumlah UPTD dan UPK yang mendapatkan monitoring evaluasi Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas				UPTD/UPK	25	17		17	68,00
100	Jumlah dokumen Standar Pelayanan dan				Dokumen	100	100	100	100	100,00



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	Standar Operasional Prosedur									
101	Jumlah FKTP yang melaksanakan Survey Akreditasi				Puskesmas	6	-	6	-	
102	Jumlah FKTP yang mendapatkan Pendampingan Pra Akreditasi				Puskesmas	6	6	6	6	100
103	Jumlah FKTP yang mendapatkan Pendampingan Pasca Akreditasi				Puskesmas	23	23	23	23	100
104	Persentase tersedianya bahan pendukung pengawasan dan pembinaan sarana kesehatan dasar				%	100	12	12	100	100,00
105	Persentase fasilitas kesehatan yang dilakukan audit				%	100	100	100	100	100
106	Jumlah UPTD dan UPK yang mendapatkan pembinaan				UPK/UPTD	25	25	25	25	100
107	Jumlah pimpinan Faskes yang mendapatkan sosialisasi peningkatan mutu klinik dan RS				Orang	89	-	-	-	
108	Jumlah UPTD dan UPK mendapatkan penilaian pelayanan publik dan kinerja				UPK/UPTD	25	25	25	25	100
109	Survei Verifikasi RSUD				%	92,30	-	-		
110	Persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan				%	100	23	23	100	100
111	Jumlah UPTD dan UPK yang mendapatkan distribusi obat				UPK/UPTD	24	24	24	24	100
112	Jumlah koordinasi pengelola obat dan perbekalan kesehatan Faskes				Pertemuan	7	4	7	4	57,14
113	Persentase UPTD dan UPK yang melaksanakan Pola pengelolaan Keuangan BLUD				%	100	25	25	100	100,00
114	Persentase pemenuhan Biaya Operasional yang bersumber DAK				%	100	25	25	100	100,00
115	Penyediaan Pemenuhan Biaya Operasional yang				%	100	25	25	100	100,00



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	bersumber APBD									
116	Persentase ketersediaan bahan pendukung penanggulangan masalah kesehatan				%	100	12	12	100	100,00
117	Cakupan pelayanan gawat darurat 118				%	100	589	589	100	100,00
118	Persentase Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan				%	100	56	56	100	100,00
119	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan perbekalan kesehatan				%	100	32	37	86	86,49
120	Survey kesehatan daerah				Survey	1			-	
121	Jumlah petugas terlatih pengelolaan data dan informasi kesehatan				Orang	50			-	
122	Jumlah koordinasi pengelolaan data dan informasi				Kali	8	3		3	37,50
123	Jumlah Dokumen Profil OPD				Dokumen	1	1	1	1	100,00
124	Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan SIK				Orang	46			-	
125	Jumlah evaluasi pengelolaan dan pengembangan sistem informasi				Kali	2	1		1	50,00
126	Jumlah updating aplikasi				Aplikasi	1	1		1	100,00
127	Jumlah aplikasi yang dikembangkan				Aplikasi	1			-	
128	Persentase Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana RSUD Sultan Syarif Mohamad Al Kadrie				%	100	1	1	100	100,00
129	Persentase Terselenggaranya pengadaan peralatan kesehatan rumah sakit				%	100	8	17	47	47,06
130	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang rumah sakit				%	100	1	1	100	100,00
131	Persentase pengadaan barang cetakan Rekam Medik				%	100	70	75	93	93,33



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

132	Persentase pengadaan logistik				%	100	7	7	100	100,00
133	Persentase pengadaan dan perbekalan kesehatan di RSUD Tipe. D				%	0				
134	Jumlah Rumah Sakit yang dibangun				Rumah Sakit	1			-	
135	Jumlah dokumen AMDAL				Dokumen	1	1	1	1	100,00
136	Persentase tersedianya bahan pendukung penyuluhan kesehatan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Al Kadrie				%	100	8	8	100	100,00
137	Jumlah kerjasama dengan massmedia				Media Massa	5	5	5	5	100,00
138	Persentase sistem informasi dan manajemen RSUD Sultan Syarif Mohamad Al Kadrie				%	100	13	13	100	100,00
139	Jumlah sarana yang dilakukan pemeliharaan				Sarana	1	1	1	1	100,00
140	Jumlah prasarana yang dilakukan pemeliharaan				Prasarana	7	7	7	7	100,00
141	Persentase Biaya Operasional RS Tipe D				%	100				
142	Persentase kebutuhan operasional pelayanan RSUD Sultan Syarif Mohamad Al Kadrie				%	100	73	100	73	73,00
143	Jumlah Dokumen Profil RSUD Kota Pontianak				Dokumen	1	1	1	1	100,00
144	Survei indeks Kepuasan Masyarakat - RSUD Sultan Syarif Mohamad Al Kadrie				Kali	2	1	2	1	50,00
145	Jumlah Koordinasi Pengembangan Pelayanan Publik				Kegiatan	2	2	2	2	100,00
146	Jumlah Petugas yang mengikuti Diklat Formal				Petugas	88	22	88	22	25,00
147	Jumlah Profesi yang dilakukan Penilaian Angka Kredit				Profesi	11	11	11	11	100,00
148	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional RSUD yang di adakan				Kendaraan	3	3	3	3	100,00
149	Jenis Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor RSUD				%	100	7	7	100	100,00



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	yang di adakan									
150	Persentase Tersedianya Alat Tulis Kantor RSUD				%	100	42	42	100	100,00
151	Persentase Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor RSUD				%	100	29	29	100	100,00
152	Persentase Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RSUD				%	100	12	12	100	100,00
153	Persentase Tersedianya Jasa Tenaga Kesehatan RSUD				%	100	178	178	100	100,00
154	Persentase Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Pengamanan Kantor RSUD				%	100	65	65	100	100,00
155	Persentase Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor RSUD				%	100	45	45	100	100,00
156	Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan RSUD				%	100	12	12	100	100,00
157	Persentase Tersedianya Makanan dan Minuman RSUD				%	100	13.605	21.966	62	61,94
158	Persentase Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah RSUD				%	100	1	1	100	100,00
159	Persentase Terlaksananya pelayanan surat menyurat				%	100	100	100	100	100,00
160	Persentase Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran RSUD				Laporan	5	3	5	3	60,00
161	Jumlah Laporan Capaian Kinerja RSUD yang dihasilkan				Laporan	5	3	5	3	60,00
162	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja RSUD				Kegiatan	1	1	1	1	100,00
163	Jumlah kunjungan pelayanan Persentase Terlaksananya pengelolaan BLUD RSUD				%	100	1	1	100	100,00



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi:
 - a. Permasalahan Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
 - 1) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang sesuai standar masih belum optimal
 - 2) Masih ditemukannya Kasus Kematian Ibu sebanyak 8 kasus atau 72,12 per 100.000 kelahiran hidup, Kematian Bayi sebanyak 24 atau 2,16 per 1000 KH, Kasus dan Kasus Gizi Buruk sebanyak 2.266 Kasus pada Tahun 2020 atau 7,06%.
 - 3) Penurunan Angka stunting yang masih jauh dari target
 - 4) Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh
 - 5) Belum optimalnya pengorganisasian terhadap masyarakat
 - b. Permasalahan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian
 - 1) Belum adanya pemetaan terhadap pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun Swasta di Kota Pontianak
 - 2) Belum optimalnya penggunaan obat secara rasional dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas
 - 3) Masih rendahnya masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Prabayar
 - 4) Belum optimalnya Pencapaian akreditasi Puskesmas
 - 5) Masih Kurangnya SDM Kesehatan, baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan di Kota Pontianak
 - 6) Masih seringnya pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan yang terkait dengan kedisiplinan petugas, ketidakjelasan jadwal layanan dokter, kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Keramahan Petugas Pelayanan.
 - 7) Perkembangan metode dan teknologi medis yang berlangsung cepat dan dinamis namun belum diikuti dengan peningkatan profesionalisme pelayanan, etos kerja dan komitmen pelayanan secara optimal.
 - 8) Banyak pengobat tradisional yang dalam menjalankan prakteknya hanya di tempat dan kurun waktu tertentu dan



bukan penduduk yang berdomisili di Pontianak. Mereka biasanya praktek di hotel-hotel dan sulit dimonitor karena biasanya dalam menjalankan aktifitasnya menggunakan brosur atau melalui iklan media sosial.

c. Permasalahan Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

- 1) Masih adanya potensi timbulnya peningkatan penyakit menular dan tidak menular yang ada dan timbulnya penyakit menular baru
- 2) Meningkatnya pandemic Penyakit Influenza jenis baru Corona Virus Disease (COVID-19) yang cukup menyita perhatian dunia sejak Desember 2019 hingga awal tahun 2020, termasuk Indonesia. Berdasarkan pengumuman resmi Presiden Republik Indonesia tanggal 2 Maret 2020, bahwa Hingga maret tahun 2020, diketahui terdapat 2 (dua) pasien suspect flu yang positif di diagnosa menderita penyakit Corona Virus Disease (COVID-19). Corona Virus diketahui merupakan jenis penyakit baru dengan gejala menyerupai influenza pada umumnya dan pertama kali muncul di Kota Wuhan Tiongkok pada Desember tahun 2019. Hingga maret 2020, belum teridentifikasi terapi yang teruji secara klinis untuk mengatasi dan menyembuhkan pasien corona virus. Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dini dan informasi update terkait Corona Virus, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah menyediakan akses data terkait perkembangan prevalensi penyakit Corona Virus melalui laman web berikut [www.https://covid19.pontianakkota.go.id/peta-persebaran](https://covid19.pontianakkota.go.id/peta-persebaran)
- 3) Universal Child Immunization (UCI) yang belum tercapai berpotensi timbulnya kasus-kasus penyakit P3I
- 4) Program Penyakit Tidak Menular terutama pemeriksaan Infeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) baru mencapai 5 % dari target 85% terhadap Wanita Usia Subur (WUS) sehingga berpotensi peningkatan penyakit Ca. Cerviks



- 5) Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) di Rumah Sakit belum berfungsi optimal
- 6) Pemecahan permasalahan lingkungan sangat memerlukan peran serta masyarakat dan lintas sektor sementara dukungan yang selama ini didapatkan belum seperti yang diharapkan
- 7) Koordinasi linier beberapa indikator kinerja antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kota kurang lancar dikarenakan perbedaan SOTK antara Dinas Kesehatan Kota Pontianak dengan KEMENKES dan Dinas Kesehatan Provinsi. Indikator Kinerja tersebut antara lain : Angka Bebas Jentik (ABJ), Indikator Pemberdayaan Masyarakat, Sanitasi Umum dan Sanitasi Pemukiman

2. Penentuan Isu-Isu Strategis

a. Kekuatan (*Strenght*)

1) Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan proses kebijakan kesehatan di Kota Pontianak dilakukan secara optimal dengan mengacu pada kebijakan pembangunan nasional, penetapan skala prioritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kebijakan pembangunan kesehatan terus mengalami perubahan yang fundamental, tidak hanya kebijakan mengenai pemerataan pembangunan kesehatan, namun lebih pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional tahun 2020 dipaparkan arah kebijakan kesehatan Pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan tahun 2020-2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya



promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Upaya penguatan Primary Health Care sejatinya merupakan upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi puskesmas dengan mengembalikan kiprah Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang berparadigma promotif dan preventif, artinya Puskesmas seyogyanya harus kembali pada fungsi dasarnya pada pelayanan yang bersifat edukatif dan mencegah terjadinya penyakit di masyarakat, atas dasar hal tersebut, Menteri kesehatan mencetuskan perspektif Puskesmas Perawatan untuk diganti menjadi Puskesmas dengan Tempat Tidur. Perubahan nomenklatur tersebut bermakna bahwa Puskesmas bukanlah tempat untuk merawat pasien, bukan tempat untuk mengobati pasien layaknya rawat inap di rumah sakit, namun Puskesmas hanya menjadi tempat transit sementara untuk mempersiapkan pasien berobat ke Rumah sakit rujukan jika dibutuhkan. Paradigma ini menjelaskan kembalinya Puskesmas pada fungsi hakikinya sebagai Primary Health Care bukan Sarana layanan kuratif. Isu strategis lainnya yang menjadi strengness dalam pembangunan bidang kesehatan sebagaimana disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2020 bahwa prioritas pembangunan kesehatan masih menekankan pada upaya kesehatan terkait peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diantaranya penurunan angka stunting (26,67% SSGBI 2019), penurunan AKI (7,5% di tahun 2024) dan penurunan angka AKB (12 per 1000 KH di tahun 2024), penguatan sistem jaminan kesehatan nasional, penguatan pelayanan kesehatan khususnya pada kesiapan obat dan alat kesehatan, peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia pada peningkatan angka harapan hidup (71,06 di tahun 2017),



perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada angka 70,81 tahun 2017 (Rakerkesnas Kemenkes, 2020).

2) Dukungan Pembiayaan

Pembiayaan Kesehatan adalah upaya untuk menjamin ketersediaan biaya kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi dan equity serta termanfaatkan dengan optimal guna menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Menurut UU Sistem Kesehatan Nasional Tahun 2004 bahwa pembiayaan kesehatan terbagi menjadi pembiayaan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Pembiayaan kesehatan perorangan (UKP). Pada prinsipnya pembiayaan kesehatan merupakan tanggungjawab pemerintah melalui APBD/APBN. Namun menurut Mukti (2007) bahwa system pembiayaan kesehatan berdasarkan sumber pembiayaan menjadi 4 (empat) yakni 1. Sistem pelayanan kesehatan nasioanal / national health service (NHS) yang sumber pembiayaannya bertumpu pada pajak sebagaimana diterapkan di kerajaan Inggris. 2. Sistem pembiayaan yang mekanismenya diserahkan pada pasar dengan mekanisme asuransi komersil, 3. Sistem pembiayaan sosialis yang diterapkan di Negara komunis, 4. Sistem pembiayaan kesehatan yang bersumber dari masyarakat dengan mekanisme Asuransi sosial. Sistem ke-4 ini diterapkan di Indonesia melalui program Jaminan Kesehatan nasional (JKN) dengan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaranya / asuradur/operator Program JKN (Mukti, 2007). Pembiayaan kesehatan di Kota Pontianak terus meningkat dari tahun ke tahun. Dukungan pembiayaan merupakan dukungan pengalokasian dan pembelanjaan dana



kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dukungan pembiayaan kesehatan di Kota Pontianak, tidak hanya bersumber dari Pemerintah Kota Pontianak tapi juga dari masyarakat maupun swasta serta sumber pembiayaan lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Pontianak. Secara umum Kota Pontianak telah melaksanakan system pembiayaan kesehatan berbasis Pemerintah, swasta dan masyarakat. Sumber pembiayaan kesehatan di Kota Pontianak juga turut mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan pengalokasian belanja premi asuransi warga kurang mampu dalam program Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1) Mutu Pelayanan Kesehatan

Sekalipun jumlah dan sarana kesehatan dinilai telah memadai, namun jika ditinjau dari aspek mutu layanan masih perlu ditingkatkan. Mutu pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan standar merupakan tantangan bagi pelayanan kesehatan di Kota Pontianak, terutama penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang sepenuhnya dilaksanakan secara profesional. Kondisi demikian menuntut sinergisitas antara ketersediaan sarana dan fasilitas yang mampu mendukung profesionalisme sumber daya manusia kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Iklm yang kondusif bagi peningkatan peran serta swasta dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan dari segi perijinan dan peraturan yang



mendukung partisipasi sektor swasta dalam pembangunan kesehatan.

2) Tenaga Kesehatan

Kelemahan pembangunan kesehatan di Kota Pontianak dari sudut pandang tenaga kesehatan adalah jumlah tenaga kesehatan, mutu pendidikan yang memadai, komposisi tenaga kesehatan secara proporsional (antara tenaga medis dan non medis/pendukung). Salah satu isu pengembangan tenaga kesehatan adalah pendayagunaan tenaga kesehatan dan pengembangan karir tenaga kesehatan baik sektor publik maupun sektor swasta. Untuk itu diperlukan dukungan sistem informasi tenaga yang menyeluruh, terpadu dan berdaya guna. Tahun 2021, Kebijakan Pemerintah akan berupaya meningkatkan ketahanan sistem kesehatan, utamanya dalam aspek deteksi dini penyakit melalui peningkatan kapasitas laboratorium Kesehatan sehingga dapat mendukung ketahanan sistem kesehatan kedepannya.

3) Perbekalan Kesehatan

Aksesibilitas kepada semua lapisan masyarakat yang membutuhkan diupayakan dengan pola penyediaan obat dari pelayanan sektor publik/ pemerintah. Pada sektor publik yaitu pemerintah Kota Pontianak, perlu dilakukan pengelolaan obat yang efisien termasuk pengadaan, perencanaan dan distribusi obat untuk menjamin/menjaga mutu pelayanan kefarmasian. Sehingga prinsip cara pengadaan obat yang baik (*Good Procurement Practices*) dan cara distribusi obat yang baik (*Good Distribution Practices*) dapat berjalan seperti seharusnya. Dalam hal ini kemampuan analisa kebutuhan obat esensial yang menggunakan pendekatan *bottom up planning* sesuai dengan pola penyakit merupakan masalah utama.



Disamping itu pula tantangan kompleksitas koordinasi dan akuntabilitas. Kelemahan lain adalah menyangkut pemeliharaan perbekalan kesehatan, disamping standarisasi dan kalibrasi.

4) Manajemen Kesehatan

Manajemen kesehatan yang meliputi administrasi kesehatan, sistem informasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan belum sepenuhnya dapat menunjang pembangunan kesehatan. Sistem informasi dipengaruhi banyak faktor, antara lain ketersediaan jaringan, input dari *entry point* di Sarana Pelayanan Kesehatan serta pemanfaatan informasi kesehatan.

c. Peluang (*Opportunities*)

1) Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Pontianak yang besar dengan struktur umur produktif merupakan pangsa pasar dan sumber daya yang potensial untuk pengembangan upaya kesehatan. Transisi demografi, dengan terus bertambahnya jumlah penduduk telah dapat diprediksi sebagai dampak dari pembangunan baik dalam bidang ekonomi, keluarga berencana dan kesehatan, serta gizi. Dalam piramida kependudukan, terlihat adanya kecenderungan mengecilnya jumlah penduduk usia muda/balita dan meningkatnya jumlah segmen angkatan kerja dan usia lanjut secara bermakna di tahun-tahun mendatang.

Perubahan yang terjadi pada karakteristik demografi sebagai pengaruh keberhasilan pembangunan seperti pendidikan dan sosial ekonomi di Kota Pontianak akan membuka peluang bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien dan bermutu.

2) Hukum dan Politik



Reformasi Birokrasi semua bidang yang merupakan tuntutan rakyat membuka peluang yang besar bagi perbaikan sistem dan tata nilai di bidang kesehatan. Peluang ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menghasilkan sistem pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) yang berwawasan kesehatan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini juga memberikan peluang pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam mempercepat pemerataan dan keadilan pelayanan kesehatan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

3) Kemajuan Teknologi dan Transportasi

Kemajuan Teknologi dalam bidang komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin baik member peluang untuk mempercepat pencapaian pelayanan kesehatan. Sedangkan kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan dan kedokteran memberi peluang bagi peningkatan mutu upaya pelayanan kesehatan.

4) Kerjasama dan Kemitraan

Masalah kesehatan adalah masalah nasional yang tidak dapat terlepas dari kebijakan sektor lain sehingga upaya pemecahannya harus melibatkan sektor terkait. Isu utamanya adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan kerjasama lintas sektor agar lebih efektif. Meningkatnya secara bermakna kerja sama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan merupakan peluang dalam memberikan kontribusi positif sektor lain terhadap kesehatan. Kemitraan yang setara, terbuka dan saling menguntungkan ini merupakan peluang yang baik khususnya dalam pengembangan usaha swasta baik dalam skala daerah dan nasional dalam membangun pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.



d. Ancaman (*Threats*)

1) Derajat Kesehatan

Morbiditas akibat pandemic Covid-19 menjadi ancaman serius sejak penetapannya sebagai bencana nasional pada 2 maret 2020. Perkembangan morbiditas Covid-19 di Provinsi Kalimantan Barat hingga 28 Juli 2020, tercatat Jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 381 orang, 255 orang diantaranya sembuh, dan 4 orang dinyatakan meninggal. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 32% (122 kasus) merupakan kasus Covid-19 di Kota Pontianak (Dinkes Kalbar, 2020). Pantauan Covid-19 khusus di Kota Pontianak, berdasarkan data dari Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Dinas Kesehatan Kota Pontianak, per tanggal 13 September 2020 terdapat 195 orang terkonfirmasi positif Covid-19, 941 Kasus Kontak erat, dan 269 merupakan suspek kasus. Dari 195 kasus tersebut, 169 kasus diantaranya dinyatakan sembuh, 20 kasus masih dalam perawatan / isolasi, dan 6 kasus dinyatakan meninggal.

Disamping ancaman potensi Mortalitas akibat Covid-19, kasus-kasus lama juga masih menjadi perhatian utama, baik mortalitas kematian bayi dan balita, maupun kematian Ibu. AKI dan AKB masih menjadi indikator sensitif yang mengukur keberhasilan Pembangunan Kesehatan di Kota Pontianak. Meskipun Angka Kematian Ibu (AKI) sudah mengalami penurunan di Kota Pontianak bahkan angka tersebut dibawah target MDG'S tahun 2015 dan target SDG's 2017 dimana Sustainable Development Goals (SDG's) yang menetapkan angka maksimal kematian Ibu adalah dibawah 70 per 100.000 KH. Demikian halnya dengan Angka Kematian Bayi (AKB), namun kasus kematian ini masih terjadi di Kota Pontianak dan menjadi



tantangan terhadap Pelayanan Kesehatan di Kota Pontianak, meskipun juga masih jauh dibawah batas yang ditetapkan dalam SDG's yakni 25 per 1000 KH.

Morbiditas beberapa penyakit menular diamati secara umum terjadi penurunan. Namun penularan infeksi penyakit menular utama yaitu AIDS/HIV dan TBC, Tifoid, Demam Berdarah dan Hepatitis masih merupakan masalah kesehatan yang menonjol. Disamping itu terbukanya Kota Pontianak terhadap dunia luar dan kemudahan transportasi, terdapat potensi timbulnya penyakit menular baru. Perilaku konsumsi masyarakat Kota Pontianak yang cenderung memilih makanan siap jadi, menjamurnya warung kopi/Café, budaya “ngopi di Café, Pola konsumsi makanan “siap jadi” juga berpotensi memicu terjadinya penyakit degeneratif, penyakit tidak menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian.

Target cakupan imunisasi belum tercapai. Akibat dari cakupan *Universal Child Immunization* (UCI) yang belum tercapai akan berpotensi timbulnya kasus-kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yang dapat menimbulkan wabah.

Melihat kecepatan transisi epidemiologi yang berbeda, jenis penyakit, dan bobot beban di Kota Pontianak akan berdampak pada beban ganda (*double burden*) atau bahkan beban multipel (*multiple burden*) terhadap upaya pelayanan kesehatan. Diperkirakan penyakit infeksi dan non-infeksi masih menjadi penyebab utama kematian untuk masa yang cukup lama, karena adanya determinan penyakit yang beragam di tingkat individu, keluarga, masyarakat.



2) Rendahnya Perilaku Kesehatan, Moral dan Etika

Perilaku hidup sehat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduk Kota Pontianak. Tingkat pendidikan yang masih rendah merupakan salah satu penyebab rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi kesehatan dan perilaku sehat. Penyalahgunaan narkoba, obat psikotropika dan zat adiktif cenderung meningkat, bahkan menyentuh masyarakat yang tidak mampu dan anak sekolah dasar dengan eskalasi permasalahan yang semakin luas dan kompleks. Demikian juga produksi dan penggunaan minuman beralkohol dan zat adiktif lainnya termasuk rokok cenderung terus meningkat dengan dampak negatif yang luas terhadap masyarakat. Disamping itu, konsumsi makanan yang berlebihan dan tak seimbang dapat menjadi ancaman bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Penggunaan bahan-bahan kimia terlarang untuk bahan tambahan makanan dan masalah sanitasi serta hygiene pengolahan terutama pada industri rumah tangga juga merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat konsumen.

3) Budaya

Kota Pontianak sangat kaya akan budaya. Hal tersebut terlihat dari beragam suku yang ada di Kota ini. Pendekatan dari aspek budaya perlu dilakukan dalam pembangunan kesehatan agar program kesehatan dapat mudah diterima oleh masyarakat terutama program kesehatan yang bersinggungan langsung dengan ada budaya masyarakat setempat.

4) Pencemaran Lingkungan dan Iklim Global

Perubahan keseimbangan ekologi, eksploitasi alam yang berlebihan, meningkatnya bencana alam dan sebagainya



akan membawa dampak negatif yang makin serius pada kesehatan masyarakat dimasa mendatang. Pencemaran udara, air dan tanah serta perubahan lingkungan biologis, penggunaan pestisida, insektisida, dan fungisida yang berlebihan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Perubahan lingkungan biologis juga menyebabkan rangsangan patogenesis terhadap beberapa jenis bakteri, virus dan jasad renik lainnya yang akan mengancam kesehatan masyarakat dimasa mendatang.

Pencemaran udara di dalam ruangan makin perlu diwaspadai karena masih tingginya kebiasaan merokok di masyarakat. Penanganan limbah rumah tangga perkotaan, baik limbah padat maupun cair dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Pencemaran lingkungan yang mengancam kesehatan dapat pula terjadi akibat bencana, baik bencana oleh kegiatan alam maupun akibat ulah manusia. Terbatasnya ketersediaan air bersih merupakan ancaman bagi kesehatan penduduk.

e. Isu Strategis

1) Lingkungan Sehat

Sejalan dengan perkembangan kota yang sedemikian pesatnya, saat ini Kota Pontianak dihadapkan dengan berbagai permasalahan pencemaran baik udara, air maupun tanah. Pencemaran udara sering terjadi pada musim kemarau disebabkan oleh asap akibat pembakaran lahan-lahan perkebunan ataupun ladang yang berada disekitar Kota Pontianak. Akhir tahun 2019, kualitas pencemaran udara di Kota Pontianak masuk kategori berbahaya. Menurut BMKG berdasarkan hasil pantauan pada September 2019, Kualitas udara di Kota Pontianak melebihi batas ambang minial dari $150 \mu\text{gram}/\text{m}^3$. Polusi asap seakan telah menjadi bencana rutin tahunan di Kota



Pontianak, hal tersebut menimbulkan dampak yang luar biasa bagi Kesehatan warga Kota Pontianak, selain memicu munculnya ISPA (infeksi saluran pernafasan akut) bagi penduduk, juga menyebabkan turunnya produktifitas akibat terganggunya penerbangan, terkendalanya proses produksi, hingga mengganggu aktifitas perekonomian masyarakat secara umum.

Disisi lain, pencemaran air saat ini sudah menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Kondisi ini dapat dilihat secara langsung dari kualitas air di saluran drainase kota. semuanya melebihi baku mutu yang ditetapkan melalui PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadinya pencemaran air. Hal ini disebabkan oleh air limbah domestik (rumah tangga), komersial dan industri (UMKM) berupa sisa-sisa pencucian dan air mandi dibuang langsung pada saluran drainase.

Output/luaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan. Output ini dijabarkan dengan beberapa indikator penting antara lain pencapaian akses terhadap air minum yang berkualitas, air minum harus berkualitas (memenuhi syarat kesehatan), pencapaian penggunaan jamban sehat, fasilitasi kegiatan STBM untuk mencapai stop buang air besar sembarangan, rumah sehat serta tempat umum dan tempat pengolahan makanan (TTU-TPM) memenuhi syarat kesehatan.

Oleh karena itu strategi yang dirumuskan untuk mengatasi isu-isu diatas adalah meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan baik lingkungan pemukiman maupun lingkungan TTU-TPM. Arah kebijakan yang diambil adalah pada peningkatan kualitas sarana sanitasi dan air minum



dan peningkatan pembinaan dan pengawasan TTU-TPM agar memenuhi syarat kesehatan.

2) Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat

Proses penyadaran diposisikan sebagai kegiatan yang bersifat *bottom-up*, di mana masyarakat diposisikan selaku subyek dan pelaku pembangunan kesehatan. Craig dan Mayo mengatakan *empowerment is road to participation*. Terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan, memerlukan suatu pra-kondisi yakni keberdayaan masyarakat. Partisipasi akan tercipta jika masyarakatnya telah berdaya (*World Bank Study, Education in Indonesia: From Crisis to Recovery, Education Sector Unit, East Asia and Pasific Regional Office, 1998*). Isu utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan peran, fungsi, dan kemampuan perorangan dalam membuat keputusan untuk memelihara kesehatan. Target minimal yang diharapkan adalah untuk diri sendiri yakni mempraktekkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang diteladani oleh anggota keluarga dan masyarakat sekitar. Upaya meningkatkan peran, fungsi, dan kemampuan kelompok-kelompok di masyarakat termasuk swasta sehingga di satu pihak dapat mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi dan di pihak lain dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa program pengabdian (*to serve*), memperjuangkan kepentingan masyarakat di bidang kesehatan (*to advocate*), atau melakukan pengawasan sosial terhadap pembangunan kesehatan (*to watch*).

Selama ini upaya kesehatan masih kurang mengutamakan/memprioritaskan pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta



pengecahan penyakit, serta kurang didukung oleh sumber daya pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa keterbatasan dana pemerintah dan masyarakat merupakan ancaman yang besar bagi kelangsungan program pemerintah serta ancaman terhadap pencapaian derajat kesehatan yang optimal.

Dengan demikian maka diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan sumber daya pembiayaan dari sektor publik yang diutamakan untuk kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit.

Sumber daya pembiayaan untuk upaya penyembuhan dan pemulihan perlu digali lebih banyak dari sumber-sumber yang ada di masyarakat dan diarahkan agar lebih rasional, dan lebih berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintah Kota Pontianak akan mendorong langkah strategis dalam menciptakan sistem pembiayaan yang bersifat pra upaya yang sudah dikenal sebagai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

3) Kerjasama Lintas Sektor

Sebagian dari masalah kesehatan merupakan masalah Kota Pontianak yang tidak dapat terlepas dari berbagai kebijakan dari sektor lain sehingga upaya pemecahan ini harus secara strategis melibatkan sektor terkait. Isu utama adalah upaya meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan selama ini sering kurang berhasil.

Perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan peningkatan mutu lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai sektor



yang terkait dengan sektor kesehatan. Demikian pula peningkatan upaya dan manajemen pelayanan kesehatan tidak dapat terlepas dari peran sektor-sektor yang membidangi pembiayaan, pemerintahan dan pembangunan daerah, ketenagaan, pendidikan, perdagangan, dan sosial budaya.

4) Mutu Pelayanan Kesehatan

Dipandang dari segi fisik persebaran sarana pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit serta sarana kesehatan lainnya termasuk sarana penunjang upaya kesehatan telah dapat dikatakan merata di Kota Pontianak. Namun harus diakui bahwa persebaran fisik tersebut masih belum diikuti sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan.

Mutu pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana fisik, jumlah dan jenis tenaga yang tersedia, obat, alat kesehatan dan sarana penunjang lainnya, proses pemberian pelayanan, dan kompensasi yang diterima serta harapan masyarakat pengguna. Dengan demikian maka peningkatan kualitas fisik serta faktor-faktor tersebut diatas merupakan prakondisi yang harus dipenuhi.

Selanjutnya proses pemberian pelayanan ditingkatkan melalui peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya kesehatan. Sedangkan harapan masyarakat pengguna diselaraskan melalui penyuluhan kesehatan dan komunikasi yang baik antara pemberi pelayanan dan masyarakat. Dalam jangka panjang, memerlukan pemberdayaan organisasi profesi, asosiasi pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan pembinaan standarisasi, akreditasi, dan penegakan peraturan perundangan. Pelayanan kesehatan memerlukan perubahan pendekatan



berorientasi kepada pasien, dengan memperhatikan *clinical governance*.

5) Sumber Daya Manusia Kesehatan

Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan sangat menentukan keberhasilan upaya dan manajemen kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan yang bermutu harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berusaha untuk menguasai IPTEK yang mutakhir. Di samping itu mutu sumber daya tenaga kesehatan ditentukan pula oleh nilai-nilai moral yang dianut dan diterapkan dalam menjalankan tugas. Disadari bahwa jumlah sumber daya tenaga kesehatan di Kota Pontianak yang mengikuti perkembangan IPTEK dan menerapkan nilai-nilai moral dan etika profesi masih terbatas.

Dengan memperhatikan kecenderungan keadaan epidemiologis dan upaya kesehatan di Kota Pontianak pada tahun-tahun mendatang, serta dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, perlu dikembangkan dokter spesialis, dokter keluarga, dokter gigi keluarga, dan perawat keluarga.

Di samping itu tenaga tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas jejaring surveilans epidemiologi dalam rangka peningkatan pelayanan *case management* yang diikuti dengan pengadaan tenaga lapangan P3-PL sebagai ujung tombak dalam mengamati, menganalisis, menyusun bahan masukan perencanaan operasional Puskesmas bersama masyarakat guna mengendalikan faktor risiko penyebaran penyakit dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kasus dalam situasi KLB/wabah maupun bencana atau tidak.



Dalam rangka peningkatan upaya kesehatan masyarakat, di Kota Pontianak dibutuhkan tenaga ahli terutama dalam bidang promosi dan perilaku kesehatan, epidemiologi, administrasi dan kebijakan kesehatan, perencanaan kesehatan dan ekonomi kesehatan.

Di tingkat kecamatan untuk mewujudkan paradigma sehat, perlu ada tenaga epidemiolog, administrator kesehatan, tenaga statistik kesehatan, penyuluh kesehatan, asisten ahli gizi, dan sanitarian. Sejalan dengan peningkatan perkembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan paradigma sehat di masa mendatang, maka keberadaan dan peran tenaga non kesehatan seperti ahli hukum kesehatan, akuntan, psikolog, antropolog, sosiolog dan tenaga penunjang yang bertanggung jawab atas tugas-tugas kesekretariatan dan tata usaha.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2021 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Kesehatan Kota Pontianak sesuai tabel sebagai berikut :





Tabel 2.4
Review terhadap RKPD tahun 2022
Kota Pontianak

No	Program / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Rancangan Awal		Hasil Analisis		Catan Anali si	
			Hasil Program	Target Keluaran	Pagu Indikatif		Kebutuhan Dana			
					Tolok Ukur	APBD Kota	DAK	APBD Kota		DAK
1	3		4	5	7	9	10	11	12	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan								
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah sekolah ber PHBS	224 Sekolah	449.765.000	273.346.478	449.765.000	273.346.478		
			Jumlah RT ber PHBS	2790 RT						
			Jumlah keluarga sehat	30.887 KK						
			Jumlah penyuluhan pola hidup sehat	6 penyuluhan						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Persentase ketersediaan bahan pendukung kegiatan pelayanan kesehatan maternal, Neonatal, Bayi	100%	228.257.316		228.257.316			



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

			Monitoring dan evaluasi program Kesehatan Keluarga	10 Kali				
			Audit kematian Ibu Hamil dan Bersalin	4 Kali				
			Jumlah Petugas yang terlatih Pelayanan kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin	120 Orang				
			Jumlah Kader kesehatan yang terlatih Pelayanan kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin	65 Orang				
			Koordinasi Pelayanan Kesehatan Program Kesehatan Keluarga	5 Kali				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Jampersal DAK)		Persentase ibu hamil dan ibu bersalin dan neonatal yang mendapatkan jaminan persalinan	100%		3.989.500.000		3.989.500.000
	Pengelolaan Bayi baru Lahir		Audit kematian Bayi	4 Kali	177.937.621		177.937.621	
			Jumlah Petugas yang terlatih Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	46 Orang				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Petugas yang terlatih Pelayanan kesehatan anak Balita dan pra sekolah	120 Orang	241.515.094		241.515.094	



			Persentase ketersediaan bahan pendukung pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolah	100%					
			Jumlah Kader kesehatan yang terlatih Pelayanan kesehatan Anak Balita dan pra sekolah	65 Orang					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Petugas yang terlatih Pelayanan kesehatan pada anak Usia Pendidikan Dasar	69 Orang	154.430.683		154.430.683		
			Persentase ketersediaan bahan pendukung pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar	100%					
			Jumlah Kader kesehatan yang terlatih Pelayanan kesehatan pada anak Usia Pendidikan Dasar	75 Orang					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Persentase ketersediaan bahan pendukung kegiatan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	100%	70.944.059		70.944.059		
			Monitoring dan evaluasi pada Usia Lanjut	3 Kali					
			Jumlah Petugas yang terlatih Pelayanan	46 Orang					



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

			kesehatan pada Usia Lanjut					
			Jumlah Kader kesehatan yang terlatih Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	90 Orang				
			Koordinasi Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3 Kali				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah evaluasi program gizi	2 kali	1.991.756.448	236.391.960	1.991.756.448	236.391.960
	- BOK Stunting					310.303.740		310.303.740
	Operasional Pelayanan 25 UPTD/UPK	25 UPT Puskesmas/Lab/ BKMMM	Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (APBD)	100%	44.349.008.559		44.349.008.559	
			Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (DAK)	100%				
			Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (BLUD)	100%				
	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang dibangun	5	34.792.509.187	18.069.480.000	34.792.509.187	18.069.480.000
	Pengembangan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pengembangan	1	12.734.200.500		12.734.200.500	



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Lainnya yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Posyandu, Pustu)	3	1.728.460.000		1.728.460.000		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	8	1.178.760.000		1.178.760.000		
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit yang dibangun	1 RS	27.952.741.333		27.952.741.333		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah FKTP Pemerintah yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan	60%	243.204.000		243.204.000		
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Profil	1 Dokumen	240.422.000		240.422.000		
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah penduduk yang mendapatkan pembayaran premi PBI Kota Pontianak	52.545 Peserta	11.691.391.400	0	11.691.391.400	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar	8100 orang	150.046.482	167.582.590	150.046.482	167.582.590	
			Jumlah penderita TBC yang ditemukan	1500 orang					
			Jumlah penderita TBC yang dilakukan contac tracing	1500 orang					
			Jumlah kader yang melaksanakan Pendampingan Minum Obat	1500 Kader					



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

			Jumlah petugas kesehatan yang terlatih pengelolaan Program TB	32 orang					
			Jumlah Kegiatan Kampanye TB	1 Kegiatan					
			Jumlah kader TBC yang ditingkatkan kapasitasnya	60 Kader					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Unit KPA)		Jumlah Jenis Kegiatan Kampanye HIV AIDS	5 Kegiatan	440.117.337	0	440.117.337	0	
			Jumlah kader yang terlatih penanganan HIV AIDS	200 Kader					
			Jumlah Orang Dengan HIV AIDS yang mendapatkan pendampingan	120 Orang					
			Jumlah peserta sosialisasi HIV AIDS	1020 orang					
			Jumlah pertemuan koordinasi Program HIV	6 Kali					
			Jumlah orang beresiko HIV yang dilakukan penjangkaran	1700 orang					
			Jumlah ibu hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV, Sipilis, dan Hepatitis	12.576 orang					
			Jumlah Frekuensi kegiatan sosialisasi HIV dengan media secara virtual/ online	12 Kali					



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

			Jumlah Tempat Layanan Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP) HIV di Fasyankes	6 Lokasi					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Tempat dan Fasilitas Umum Yang dilakukan Pengawasan	76 TFU	453.555.653	130.325.520	453.555.653	130.325.520	
			Jumlah pertemuan/sosialisasi kegiatan pembinaan Tempat-tempat umum	1 pertemuan					
			Jumlah Kelurahan yang dilakukan verifikasi ODF	9 kelurahan					
			Jumlah kader yang terlatih STBM	40 kader					
			Jumlah ketersediaan sarana pendukung program kesehatan lingkungan	23 Puskesmas					
			Jumlah sarana air minum yang dilakukan pengawasan	33 Sarana					
			Jumlah petugas sanitasi yang terlatih program kesehatan lingkungan	23 Petugas					
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara Lain : Jasaboga Rumah makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang dilakukan pengawasan	200 TPM	294.928.000		294.928.000		



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (PSN)		Jumlah lokasi yang dilaksanakan fogging	200 Lokasi	965.060.000		965.060.000		
			Persentase ketersediaan bahan penunjang kegiatan fogging	100%					
			Jumlah mesin fogging yang diadakan	5 Mesin					
			Persentase ketersediaan bahan pendukung dan media promosi imunisasi	100%					
			Jumlah evaluasi dan sosialisasi kegiatan imunisasi	6 kl					
			Jumlah fasilitas kesehatan dan institusi yang mendapatkan pembinaan imunisasi	74 Fasilitas					
			Jumlah Sosialisasi dan Kampanye Japanese Encephalitis (BOK/DAK)	1 kali					
			Jumlah Kegiatan Supervisi Pelaksanaan Imunisasi Japanese Encephalitis (BOK/DAK)	23 kali					
	Pengelolaan Upaya Kes Khusus (Haji)		Persentase Jamaah Calon Haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar	100%	36.414.566		36.414.566		



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

			Jumlah tenaga kesehatan haji yang mendapatkan pelatihan	47 tenaga kesehatan					
			Jumlah pertemuan evaluasi pelayanan kesehatan jamaah haji	2 kali					
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Imunisasi)		Jumlah lokasi yang dilaksanakan fogging	200 Lokasi	42.399.200	62.090.432	42.399.200	62.090.432	
			Persentase ketersediaan bahan penunjang kegiatan fogging	100%					
			Jumlah mesin fogging yang diadakan	5 Mesin					
			Persentase ketersediaan bahan pendukung dan media promosi imunisasi	100%					
			Jumlah evaluasi dan sosialisasi kegiatan imunisasi	6 kl					
			Jumlah fasilitas kesehatan dan institusi yang mendapatkan pembinaan imunisasi	74 Fasilitas					
			Jumlah Sosialisasi dan Kampanye Japanese Encephalitis (BOK/DAK)	0%					
			Jumlah Kegiatan Supervisi Pelaksanaan Imunisasi Japanese Encephalitis (BOK/DAK)	0%					



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah petugas kesehatan yang terlatih pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	46 Orang	35.490.432		35.490.432		
			Jumlah puskesmas yang mendapatkan monev pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	23 Puskesmas					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah petugas puskesmas yang terlatih kesehatan jiwa	23 Petugas	12.120.214		12.120.214		
			Jumlah Sosialisasi Gerakan Deteksi Dini FR PTM terkait masalah Jiwa-Napza (BOK/DAK)	1 kali					
			Jumlah monitoring, evaluasi, dan koordinasi petugas kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	4 kali					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Yankes Walikota,UA)		Jumlah pelayanan kesehatan Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Pontianak	1 Kali	153.400.000		153.400.000		
			Persentase ketersediaan bahan pendukung Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (P2))		Koordinasi Pelayanan Kesehatan pada calon pengantin	1 Kali	70.730.826		70.730.826		



			Monitoring evaluasi Pelayanan Kesehatan pada calon pengantin	2 Kali					
			Monitoring evaluasi Pelayanan Kesehatan pada Keluarga Berencana	2 Kali					
			Persentase ketersediaan bahan pendukung Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%					
			Jumlah petugas kesehatan yang terlatih pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	46 orang					
			Jumlah pelayanan mobile service PTM	50 LOKASI					
			Jumlah Kader kesehatan yang terlatih pelayanan PTM	46 Orang					
			Persentase ketersediaan bahan habis pakai dan bahan pendukung kegiatan pemeriksaan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim	100%					
			Jumlah kampanye IVA dan Sadamis	6 Kali					
			Monitoring dan Evaluasi terpadu terkait pelaksanaan Program (BOK/DAK)	0 Kali					



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Persentase ketersediaan bahan pendukung surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	100%	24.431.770		24.431.770		
			Jumlah Pertemuan Review dan Evaluasi Surveilans dan Penanggulangan Wabah	3 kali					
			Jumlah petugas yang terlatih Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	0					
			Jumlah Rujukan Pengujian Spesimen Rutin, Sentinel dan Dugaan KLB	100%					
			Jumlah Surveilans aktif kasus PD3I dan Penyakit Menular	48 kl					
			Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan pembinaan	34 fasyankes					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Diabetes Mellitus		Persentase ketersediaan bahan pendukung kegiatan pelayanan kesehatan	100%	25.397.221		25.397.221		
			Jumlah monitoring, evaluasi, dan koordinasi petugas kesehatan	4 Kali					



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah UPTD/ UPK yang memiliki minimal 60% alat kesehatan sesuai standar	25 UPT	15.444.596.917	5.054.558.112	15.444.596.917	5.054.558.112	
	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah UPTD/ UPK yang memenuhi capaian indikator 40 item obat wajib dan 5 vaksin Imunisasi Dasar Lengkap	23 UPT	2.035.972.111	1.615.997.545	2.035.972.111	1.615.997.545	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah Puskesmas yang memiliki ketersediaan BHP medis sesuai standar	23 UPT	861.236.384	1.758.398.844	861.236.384	1.758.398.844	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah frekuensi alat kesehatan yang dilakukan pemeriksaan	23 kali	32.285.773	99.100.000	32.285.773	99.100.000	
			Jumlah UPTD/ UPK Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Kalibrasi Alat Kesehatan	25 UPT					
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah FKTP yang melaksanakan Survey Akreditasi	9 puskesmas	0	692.328.000	0	692.328.000	
			Jumlah FKTP yang mendapatkan Pendampingan Pra Akreditasi	9 puskesmas					
			Jumlah FKTP yang mendapatkan Pendampingan Pasca Akreditasi	23 puskesmas					
			Jumlah RS rujukan Kab/Kota yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	13 RS					
			Jumlah RS di dibina dan dipersiapkan akreditasinya	13 RS					



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Yankes)		Jumlah dokumen Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	100 Dokumen	233.635.872		233.635.872		
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Subbag UA)				163.772.945		163.772.945		
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis kesehatan		Persentase ketersediaan bahan pendukung penanggulangan masalah kesehatan	100%	249.197.482		249.197.482		
			Cakupan pelayanan gawat darurat 119	100%					
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah sakit Kelas C, D dan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Persentase tersedianya bahan pendukung pengawasan dan pembinaan sarana kesehatan dasar	100%	43.322.197		43.322.197		
			Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan audit	13 RS					
			Jumlah UPTD dan UPK yang mendapatkan pembinaan	25 UPTD/UPK					
			Jumlah pimpinan Faskes yang mendapatkan sosialisasi peningkatan mutu klinik dan RS	Orang					
			Jumlah UPTD dan UPK mendapatkan penilaian pelayanan publik dan kinerja	25 UPTD/UPK					
			Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	2 dokumen					



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

			Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 Orang					
			Jumlah Kegiatan Rohani yang diadakan	6 Kali					
			Jumlah Kegiatan Kebugaran Jasmani yang diadakan	40 kali					
	Jumlah Program UKP UKM Dinkes				159.993.414.582	32.459.403.221	159.993.414.582	32.459.403.221	
	RSUD SSMA (Prog UKP UKM)	RSUD SSMA							
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah sarana prasarana yang dilakukan rehabilitasi	1 Unit	3.041.455.900,00		3.041.455.900,00		
			Jumlah sarana prasarana yang dilakukan pemeliharaan	4 Unit					
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Unit	848.770.000,00	19.742.000	848.770.000,00	19.742.000	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah pengadaan prasarana penunjang Rumah Sakit	1 Unit	1.437.852.400,00		1.437.852.400,00		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah jenis peralatan kesehatan Rumah sakit	50 Jenis	2.000.000.000,00	5.999.006.770	2.000.000.000,00	5.999.006.770	
	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah ketersediaan jenis obat	30 Jenis	5.000.000.000,00	5.000.000.000	5.000.000.000,00	5.000.000.000	



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah ketersediaan jenis bahan habis pakai RSUD Sultan Syarif Moehammad Al-Kadrie	6 Jenis	2.826.000.000,00	2.826.000.000	2.826.000.000,00	2.826.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah tenaga harian lepas pengolah makanan	8 Orang	950.000.000		950.000.000		
			Persentase ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥90					
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Persentase tersedianya bahan pendukung penyuluhan kesehatan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Al Kadrie	100%	139.640.000		139.640.000		
			Jumlah kerjasama dengan mass media	5 Media massa					
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Persentase kebutuhan operasional pelayanan RSUD Sultan Syarif Mohamad Al Kadrie	100%	56.913.301.882		56.913.301.882		
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah standar pelayanan dan SOP yang disusun dan dilakukan review	200 SP dan SOP	43.907.753		43.907.753		
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Profil RSUD Kota Pontianak	1 Dokumen	9.826.580		9.826.580		



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah aplikasi sistem informasi dan manajemen RSUD Sultan Syarif Mohamad Al Kadrie yang dikelola	2 Aplikasi	238.104.500		238.104.500		
	Jumlah Program UKP UKM RSUD				73.448.859.015	13.844.748.770	73.448.859.015	13.844.748.770	
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan							
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak lanjut Pengawasan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase tersedianya bahan pendukung sarana kesehatan yang diberikan pengawasan, tindak lanjut pengawasan perizinan, dan pembinaan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal	100%	47.800.565	0	47.800.565	0	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang diterbitkan sertifikat	50 IRTP	34.132.948	34.132.948	34.132.948	34.132.948	



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dilakukan pengendalian dan pengawasan serta rencana tindak lanjut	60 IRTP	30.000.000	505.783.000	30.000.000	505.783.000	
			Jumlah sampel yang dilakukan	37 sampel					
	Jumlah Program Sediaan Farmasi Dinkes				111.933.513	539.915.948	111.933.513	539.915.948	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan							
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 Orang	989.649.492		989.649.492		
			Jumlah Kegiatan Rohani yang diadakan	6 Kali					
			Jumlah Kegiatan Kebugaran Jasmani yang diadakan	40 kali					
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota yang Terpilih	15 orang	146.690.000		146.690.000		
			Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Teladan yang terpilih	16 Orang					



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

			Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis yang Diselenggarakan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Kesehatan	2 Kegiatan				
			Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Formal	30 Orang				
	Jumlah Program Kapasitas SDM Dinkes				1.136.339.492		1.136.339.492	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan						
	Peningkatan Upaya promosi kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah pelaksanaan jambore (Posyandu dan Kota Sehat)	2 Kegiatan	309.580.000		309.580.000	
			Jumlah kader posyandu yang mengikuti kaji banding	5 Kader				
			Jumlah kegiatan Saka Bhakti Husada (rakornis, bhakti masyarakat, latihan gabungan dan	4 Kegiatan				



			perkemahan tingkat daerah)					
			Persentase ketersediaan bahan pendukung promosi kesehatan	100%				
			Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih PIS PK	46 Orang				
			Jumlah kerjasama dengan mass media	4 Media				
			Jumlah Peserta yang mengikuti KIE (Komuniikasi , Informasi dan Edukasi) Keamanan Pangan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	110 orang				
	Jumlah Program Pemberdayaan Masy Dinkes				309.580.000		309.580.000	
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 dokumen	52.381.500		52.381.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	68.321.150		68.321.150	



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	28 Laporan	256.653.238		256.653.238		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	5.758.827.419		5.758.827.419		
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Kali	216.250.000		216.250.000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	27.413.680		27.413.680		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Unit	82.846.895		82.846.895		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	18 unit	33.074.049		33.074.049		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	78.250.000		78.250.000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	41.497.550		41.497.550		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5.000.000		5.000.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan	184.290.000		184.290.000		



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 Unit	558.900.000		558.900.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 Bulan	402.052.303		402.052.303		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	46 unit	490.076.562		490.076.562		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 unit	76.200.000		76.200.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	216.017.060		216.017.060		
	Jumlah Program Rutin Dinkes				8.548.051.406		8.548.051.406		
	Gaji dan Tunjangan TPP				155.669.000.000		155.669.000.000		
	RSUD SSMA (Prog Rutin)								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen	17.042.205		17.042.205		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	69.655.913		69.655.913		



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	839.000.000		839.000.000		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	5.393.490.000		5.393.490.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	28 Laporan	91.296.319		91.296.319		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				700.000.000		700.000.000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie		Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	145.000.000		145.000.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17 Unit	490.000.000		490.000.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	1.293.000.000		1.293.000.000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	426.227.455		426.227.455		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan	50.000.000		50.000.000		



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	300.000.000		300.000.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 Bulan	1.951.000.000		1.951.000.000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	5.600.000.000		5.600.000.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	46 Unit	1.035.060.000		1.035.060.000		
	Jumlah Program Rutin RSUD SSMA				18.400.771.892		18.400.771.892		
	Total Pagu Tentatif Dinkes				325.768.318.993	32.999.319.169	325.768.318.993	32.999.319.169	
	Total Pagu Tentatif RSUD				91.849.630.907	13.844.748.770	91.849.630.907	13.844.748.770	
	Jumlah (Dinkes + RSUD)				417.617.949.900	46.844.067.939	417.617.949.900	46.844.067.939	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2021



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka PD Dinas Kesehatan Kota Pontianak termasuk kedalam tipologi Dinas daerah Kabupaten/Kota tipe B dan memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas yang terdiri dari 23 UPTD Puskesmas, 1 Balai Klinik Mata, 1 Unit Laboratorium Kesehatan Daerah dan 1 UPTD RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie.



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kesehatan Kota Pontianak akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan hingga forum gabungan SKPD T.A 2022 Kota Pontianak.



Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan untuk Tahun Anggaran 2022
Kota Pontianak

Program	Usulan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Sasaran	APBD Kota	Kec/Kel
1	2	3	4	5	6
	Aspirasi Masyarakat pada SIPD				
Program UKM UKP	Sosialisasi gerakan hidup bersih dan sehat	Lingkungan RW. 28, Siantan Hulu	peningkatan kesadaran gerakan hidup bersih dan sehat		Lurah Siantan Hulu
	Pelatihan remaja, ibu hamil dan bersalin dan KB	Posyandu Hidayah, Jl. Hidayah RT. 3 RW. 36, Siantan Hulu	Peningkatan kapasitas kader Posyandu Hidayah		Lurah Siantan Hulu
	Pelatihan toga	Taman Toga PKK, Komp. Pemda RW. 24, , Siantan Hulu	Peningkatan kapasitas Kader TP. PKK Kelurahan Siantan Hulu dan Masyarakat		Lurah Siantan Hulu
	[Kec. Ptk Utara] Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dan pengumpul sampah (Tosa, gerobak, mesin tebas, dll)	Lingkungan RW. 5, Siantan Hulu	Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah (1 Unit TOSA)		Lurah Siantan Hulu
		Lingkungan RW. 4, Siantan Hulu			Lurah Siantan Hulu
		Lingkungan RW. 31, Siantan Hulu			Lurah Siantan Hulu
		Lingkungan RW. 35, Siantan Hulu			Lurah Siantan Hulu
		Lingkungan RW. 11, Siantan Hulu			Lurah Siantan Hulu
		Lingkungan RW. 37, Siantan Hulu			Lurah Siantan Hulu
		Lingkungan RW. 26, Siantan Hulu			Lurah Siantan Hulu



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

POKIR DPRD					
Pokir DPRD (Fraksi PKS)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Posyandu)	Jalan Hidayah Parit Nanas Dalam RT.004/RW.036, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu			
					Hj. SITI RUKASIH, S.Sos
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Posyandu)	Jl.Apel Komplek Pemda,Komplek Yuka Jalur I, Gg.Jeruju 3 Dalam, Komplek Arthaland Blok CD,Gg.Srikaya, Gg.Selamat Dalam., Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pontianak Barat, Seluruh Kelurahan/Desa			MUJIONO, S.Pd, S.Mn, M.Ak

Sumber : SIPD Kemendagri Kota Pontianak 2021



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Secara nasional, arah kebijakan pembangunan kesehatan saat ini dan beberapa tahun kedepan, cenderung mengarah pada konteks penanganan dan pemulihan masa pandemic covid-19, Presiden RI mengarahkan pada perlu mempersiapkan upaya dan langkah pemulihan mitigasi dampak kesehatan maupun ekonomi serta langkah-langkah pemulihan jika penyebaran Covid-10 sudah bisa dikendalikan. Masa Pandemi Covid-19 mengharuskan orientasi pembangunan kesehatan agar lebih fokus pada Health Reform dan Health Security sebagai upaya membangun ketahanan bersama terhadap potensi bencana melalui sistem peringatan dini, pemberdayaan masyarakat, dan kelembagaan kolaboratif serta sinergitas pembiayaan kesehatan yang terintegrasi dalam *Health System Reform*.

Dalam lingkup Pembangunan Kesehatan di Daerah, Fokus *Health System Reform* ditekankan pada 8 (delapan) aspek diantaranya teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat melalui urgensi pemanfaatan telemedicine terutama di daerah 3 T, integrasi kebijakan JKN dan Pelayanan Gratis, Pengendalian Penyakit melalui peningkatan angka cakupan imunisasi terutama di daerah tertinggal, pentingnya isu kesehatan di daerah dalam ketahanan kesehatan nasional, pemerataan SDM Kesehatan yang berorientasi pada penempatan berbasis asal daerah setempat, penguatan puskesmas, peningkatan layanan RS melalui pengendalian pola rujukan, serta kemandirian farmasi dan alkes di daerah. ketahanan Kesehatan di daerah yang terintegrasi dalam. Delapan area reformasi system kesehatan diatas menjadi strategi



kunci dalam kaitannya untuk mereformasi sistem ketahanan bencana (Bappenas RI, 2020).

Merespon kebijakan nasional bidang kesehatan dalam paparan Bappenas diatas, Kementerian Kesehatan menindaklanjuti dengan pengarusutamaan kebijakan kesehatan yang berfokus pada perbaikan / reformasi sistem kesehatan di daerah, baik dalam aspek penguatan puskesmas, maupun perbaikan ketersediaan fasilitas deteksi dini penyakit pada laboratorium kesehatan. Berdasarkan garis besar arah kebijakan kesehatan nasional tersebut, Dinas Kesehatan Kota Pontianak merumuskan korelasi kebijakan kesehatan pusat dengan kebijakan kesehatan di daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya akan menjadi fokus kebijakan kesehatan di Kota Pontianak sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Keterkaitan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

No	KEBIJAKAN	
	ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PROVINSI
1	2	3
	Peningkatan Sistem Kesehatan Nasional dengan penekanan pada penguatan fungsi UKM-Promotif, Preventif Non Ranap Perkotaan dan Daerah tertingga, serta penguatan integrasi Sistem Informasi Kesehatan dan Koordinasi Faskes Primer dengan Fasyankes lain.	Peningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, derajat kesehatan, dan memperkuat nilai-nilai keagamaan (Indikator IPM)
	Penguatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan peningkatan pemenuhan Sarpras Puskesmas sesuai standar dan SDM Kesehatan	Upaya penurunan Angka kematian Ibu dan Angka kematian Bayi/balita, percepatan penurunan angka stunting dengan strategi perbaikan Gizi masyarakat.
	Penguatan Surveilans Real Time Penyakit Berbasis Laboratorium dengan memperkuat Laboratorium Kesehatan, guna meningkatkan analisa potensi resiko dan Investigasi KLB Penyakit Zoonosis menggunakan Pendekatan One Health	Peningkatan upaya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan melalui upaya penerbitan pengakuan PBF cabang, cabang PAK.



	Peningkatan PSM dan Sektor Swasta dalam penurunan AKI AKB, Revitalisasi Posyandu serta penguatan pemberdayaan masyarakat guna mendukung Implementasi Kabupaten/Kota Sehat.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui peran lintas sektor bidang kesehatan, tokoh masyarakat, swadaya dan dunia usaha.
--	--	--

Rencana Kerja (Renja) mengandung pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*) yang diharapkan. Kebijakan Dinas Kesehatan merupakan arah/tindakan berupa ketentuan-ketentuan, peraturan yang dijadikan petunjuk pelaksanaan bagi setiap kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai akhir tahun 2024. Kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, dengan rumusan kebijakan berupa 4 (empat) program wajib dan 1 (satu) program Rutin, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 95 (Sembilan Puluh Lima) Sub Kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :



I. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

Program UKP dan UKM ini terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kota, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2. Pembangunan Puskesmas
3. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4. Pengembangan Puskesmas
5. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
6. Rehabilitasi dan pemeliharaan RS (RSUD Sultan Syarif Moehammad Al Kadrie).
7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas.
8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
9. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
10. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie.
11. Pengadaan Obat, Vaksin.

I.2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita.
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.



5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
15. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie.
16. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
17. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
18. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
19. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (119).
20. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
21. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
22. Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Pus. Siantan Hilir)
23. Operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
24. Operasional Pelayanan pada 23 UPTD / UPK Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan serta BKMM
25. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
26. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie.



I.3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
2. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
3. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

I.4 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie

II. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pada Program ini terdiri dari beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

II.1 Kegiatan Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia

II.2 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan.



III. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

Pada Program Sediaan Kefarmasian ini terdiri dari beberapa Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

III.1 Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), yang mana sub kegiatannya adalah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

III.2. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), dengan sub kegiatannya adalah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM).

IV. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

IV.1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dimana sub kegiatannya adalah Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

V. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

V.1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub kegiatannya terdiri dari :

1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
3. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan



4. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
5. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
6. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie.

IV.2. Kegiatan Administrasi Keuangan, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
2. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
3. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
4. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

IV.3. Kegiatan Administrasi Umum, sub kegiatannya adalah :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan RSUD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie
11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17. Penyediaan Bahan Logistik Kantor RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
18. Penyediaan Makanan dan Minuman
19. Penyediaan Makanan dan Minuman RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
20. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
21. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie.
22. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
23. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie.
24. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
25. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
27. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie.
29. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
30. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
31. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
32. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
33. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional.

IV.4. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan sub kegiatannya sebagai berikut :

1. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Pendidikan dan pelatihan formal RSUD Sultan Syarif Mohamad Al Kadrie.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Penentuan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan kota Pontianak mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun Visi, Misi, Walikota Pontianak yang merupakan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Walikota Pontianak

a. Visi Walikota

Visi Walikota Pontianak terpilih selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

***“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan,
Cerdas dan Bermartabat”***

Penjabaran dari Visi :

Pontianak Kota Khatulistiwa : Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa.



- Berwawasan Lingkungan : Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau, dan teduh
- Cerdas : Memiliki pengertian kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi.
- Bermartabat : Bermartabat artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang berbudaya, toleran, terhadap keragaman didukung tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparansi dan akuntabel.

b. Misi Walikota Pontianak

Misi Walikota Pontianak terpilih selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

- 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
- 2) Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih, dan cerdas.
- 4) Mewujudkan masyarakat sejahtera, yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing;



- 5) Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Pontianak berkaitan dengan Misi ke - 1 Walikota Pontianak yaitu **“Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berbudaya”**. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Sebagai penjabaran Visi dan Misi RPJMD Kota Pontianak, maka tujuan yang ditetapkan Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024 adalah :

“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”.

Adapun Indikator tujuan Dinas Kesehatan, sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup
2. Angka Stunting Balita

b. Sasaran

Sasaran yang akan di capai oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak, selama 5 (lima) tahun ke depan adalah :

“Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat”

Adapun Indikator sasaran Dinas Kesehatan, sebagai berikut:

1. Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
2. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
3. Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
4. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
5. Insiden Rate DBD per 100.000 Penduduk



6. Persentase Prevalensi Penderita Hipertensi di Kota Pontianak
7. Persentase Prevalensi Penderita Diabetes Melitus di Kota Pontianak
8. Persentase Angka Wasting Balita
9. Persentase Angka Underweight Balita
10. Persentase Angka Stunting Balita



Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-					Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	3	3	4					5	6	7				
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	72,37 Tahun	72,80 Tahun	72,85 Tahun	72,87 Tahun	72,84 Tahun	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian ibu	49,50 per 100.000 KH	49,66 per 100.000 KH	48,50 per 100.000 KH	48,00 per 100.000 KH	47,50 per 100.000 KH
		Angka Stunting Balita	21%	17,04 %	18,40 %	16,00 %	14,00 %		Angka Kematian Bayi	2,40 per 1000 KH	2,48 per 1000 KH	3,00 per 1000 KH	2,50 per 1000 KH	2,00 per 1000 KH
									Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
									Insiden Rate HIV	< 0,015%	< 0,016%	< 0,35%	< 0,35%	< 0,35%
									Insiden Rate DBD	< 49 per 100.000 pddk	< 30,58 per 100.000 pddk	< 49 per 100.000 pddk	< 49 per 100.000 pddk	< 49 per 100.000 pddk



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

				Prevalensi Penderita Diabetes Melitus di Kota Pontianak	2,60%	2,70%	2,40%	2,30%	2,20%
				Angka Stunting Balita	21%	17,04%	18,40%	16,00%	14,00%
				Angka Wasting Balita	12%	21,54%	8%	6%	5%
				Angka Underweight Balita	14%	14,25%	12%	11%	10%
				Akreditasi Fasilitas Kesehatan	100% (utama/paripurna = 1 Pusk	100% (utama/paripurna = 2Pusk	100% (utama/paripurna = 4Pusk	100% (utama/paripurna = 5Pusk	100% (utama/paripurna = 6Pusk

Sumber :Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2021



Tabel 3.3

Keterkaitan (*interpelasi*) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024

VISI	<i>Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat</i>		
MISI	<i>Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu kesehatan masyarakat	Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatkan fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar
			2. Meningkatkan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			3. Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
			3. Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Melakukan Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
			2. Meningkatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1. Melakukan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMO)



			2. Melakukan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Meningkatkan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
			2. Meningkatkan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
		Meningkatkan Pemenuhan Upaya penunjang urusan Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
			2. Tersedianya Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pontianak
			3. Tersedianya Administrasi Umum Dinas Kesehatan Kota Pontianak
			4. Meningkatkan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Sumber :Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2021



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

4.1 Program dan Kegiatan

Dengan mengacu pada tujuan, sasaran, dan strategi untuk mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Dinas Kesehatan Kota Pontianak menetapkan Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Kesehatan kurun waktu 2020 – 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka klasifikasi program dan kegiatan berikut indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak dapat duraikan sebagai berikut :

4.1.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator Sasaran Program Persentase indikator SPM yang mencapai target. Untuk mencapai indikator tersebut maka kegiatan yang dilakukan beserta target indikator hingga Tahun 2024, sebagai berikut :

- 1). Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kota.

Indikator kegiatan yang di ingin dicapai adalah Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standard. Untuk mencapai target indikator kegiatan dimaksud maka ditetapkan beberapa upaya kesehatan yang dijabarkan dalam sub kegiatan – sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya. Indikatornya adalah Jumlah Unit Rumah Sakit yang dibangun.



2. Pembangunan Puskesmas. Indikatornya Jumlah unit Puskesmas dan jaringannya yang dibangun
3. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya. Indikatornya Jumlah Unit Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun
4. Pengembangan Puskesmas. Indikatornya Jumlah Puskesmas yang dilakukan pengembangan.
5. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya. Indikatornya Jumlah Unit Fasilitas Kesehatan lainnya yang dilakukan Pengembangan.
6. Rehabilitasi dan pemeliharaan RS (RSUD Sultan Syarif Moehammad Al Kadrie). Indikatornya : 1). Jumlah sarana yang dilakukan pemeliharaan, 2). Jumlah prasarana yang dilakukan pemeliharaan.
7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas. Indikatornya Jumlah Unit Puskesmas yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan,
8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya. Indikatornya Jumlah Fasilitas Lainnya yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan.
9. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Indikatornya Persentase Terselenggaranya pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan.
10. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie. Indikator : Persentase Terselenggaranya pengadaan peralatan kesehatan rumah sakit.
11. Pengadaan Obat, Vaksin. Indikatornya 1). Persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan, 2). Jumlah UPTD dan UPK yang mendapatkan distribusi obat, 3) Jumlah koordinasi pengelola obat dan perbekalan kesehatan Faskes.



2). Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan yang di ingin dicapai adalah : 1. Persentase UPT Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar. 2. Akreditasi Fasilitas Kesehatan, 3. Persentase kegiatan pelayanan kesehatan dengan pendekatan siklus hidup sesuai standar, 4. Persentase penderita PTM (hipertensi dan DM) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, 5. Persentase penderita PM (TB dan HIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, 6. Persentase pelaksanaan PE kasus DBD yang ditangani, 7. Persentase anak usia 0- 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, 8. persentase jemaah calon haji yang terdeteksi faktor resiko kesehatan, 9. Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam, 10. Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk, 11. Persentase RS rujukan tingkat Kab/Kota yang terakreditasi.

Untuk mencapai target indikator kegiatan diatas, maka disusun sub - sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Indikator sub kegiatan ini adalah Persentase ibu hamil (100%) mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM).
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin. Indikator sub kegiatan ini adalah Persentase ibu bersalin (100%) mendapatkan pelayanan persalinan (SPM).
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita. Indikatornya Persentase Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar hingga 100% (SPM).
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar. Indikatornya Persentase anak usia pendidikan dasar (100%) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM),



5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif. Indikatornya 1) Persentase orang usia 15–59 tahun (100%) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dan 2) Jumlah pelayanan kesehatan Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Pontianak.
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Indikatornya Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (100%).
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Indikator : 100% penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus. Indikator : Persentase penderita DM (100%) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat. Indikator : Persentase ODGJ (100%) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis. Indikator sub kegiatannya ini : Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (100%).
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV. Indikatornya Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (100%).
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat . Indikatornya : 1) Jumlah kegiatan Survey Pemantauan status gizi balita. 2) Persentase tersedianya Alat dan Bahan peningkatan Gizi Masyarakat. 3) Jumlah kegiatan sosialisasi Program Gizi, 4) Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan Program gizi, 5) Jumlah evaluasi Program gizi.



13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie, indikatornya Persentase tersedianya makanan dan minuman pasien RSUD.
 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Indikatornya :
 - 1) Jumlah Tempat dan Fasilitas Umum Yang dilakukan Pengawasan,
 - 2) Jumlah pertemuan/sosialisasi kegiatan pembinaan Tempat- tempat umum,
 - 3) Jumlah Kelurahan yang dilakukan verifikasi ODF,
 - 4) Jumlah kader yang terlatih STBM,
 - 5) Persentase ketersediaan bahan pendukung program kesehatan lingkungan,
 - 6) Jumlah sarana air minum yang dilakukan pengawasan,
 - 7) Jumlah petugas sanitasi yang terlatih program kesehatan lingkungan,
 - 8) Jumlah petugas kesehatan yang memahami program kesehatan lingkungan.
 15. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie, Indikatornya :
 - 1) Persentase tersedianya bahan pendukung penyuluhan kesehatan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Al Kadrie,
 - 2) Jumlah kerjasama dengan massmedia.
 16. Pengelolaan Surveilans Kesehatan, dengan indikator sub kegiatannya sebagai berikut :
 - 1) Persentase ketersediaan bahan pendukung surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah,
 - 2) Jumlah Pertemuan Review dan Evaluasi Surveilans dan Penanggulangan Wabah,
 - 3) Jumlah petugas yang terlatih Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah,
 - 4) Persentase kasus berpotensi KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi,
 - 5) Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan pembinaan.
 17. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya. Indikatornya :
 - 1) Persentase Puskesmas yang mendapatkan Dukungan Manajemen Satuan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal,
 - 2) Jumlah petugas yang terlatih
-



aspeksia, 3) Jumlah petugas yang memahami ANC dan PNC, 4) Jumlah koordinasi lintas sektoral terkait dengan kesehatan anak usia sekolah dan remaja, 5) Jumlah petugas kesehatan yang terlatih penatalaksanaan gizi buruk, 6) Jumlah petugas kesehatan yang terlatih imunisasi, 7) Jumlah petugas kesehatan yang terlatih program Pengendalian penyakit tidak menular.

18. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus. Indikatornya : 1) Persentase Jamaah Calon Haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar, 2) Jumlah tenaga kesehatan haji yang mendapatkan pelatihan, 3) Jumlah pertemuan evaluasi pelayanan kesehatan jamaah haji.

19. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (119), Indikatornya 1) Persentase ketersediaan bahan pendukung penanggulangan masalah kesehatan, 2) Cakupan pelayanan gawat darurat 119.

20. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Indikator sub kegiatan ini yakni :

- 1) Jumlah lokasi yang dilaksanakan fogging
- 2) Persentase ketersediaan bahan penunjang kegiatan fogging
- 3) Jumlah mesin fogging yang diadakan
- 4) Persentase ketersediaan bahan pendukung dan media promosi imunisasi
- 5) Jumlah evaluasi dan sosialisasi kegiatan imunisasi
- 6) Jumlah fasilitas kesehatan dan institusi yang mendapatkan pembinaan imunisasi
- 7) Jumlah pelayanan mobile service PTM
- 8) Jumlah petugas yang terlatih pelayanan PTM
- 9) Jumlah evaluasi program PTM
- 10) Persentase ketersediaan bahan habis pakai pemeriksaan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim



-
- 11) Persentase ketersediaan bahan pendukung kegiatan pemeriksaan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim
 - 12) Jumlah kampanye IVA dan Sadarnis
 - 13) Jumlah Kader kesehatan yang terlatih pelayanan PTM
21. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Indikatornya :
- 1) Jumlah penduduk yang mendapatkan pembayaran premi PBI Kota Pontianak
 - 2) Jumlah koordinasi TIM Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
 - 3) Jumlah dokumen Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat yang dihasilkan
22. Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Pusk. Siantan Hilir), Indikator sub kegiatan ini adalah Persentase Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan RSUD Tipe D
23. Operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie, Indikatornya Persentase kebutuhan operasional pelayanan RSUD Sultan Syarif Mohamad Al Kadrie
24. Operasional Pelayanan pada UPT Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan serta BKMM.
- Operasionalisasi fasilitas pelayanan kesehatan berupa UPTD/UPK di Kota Pontianak mencakup 25 UPT sebagai berikut :
- 1) Puskesmas Kampung Bali;
 - 2) Puskesmas Alianyang;
 - 3) Puskesmas Pal Tiga;
 - 4) Puskesmas Karya Mulia;
 - 5) Puskesmas Saigon;
 - 6) Puskesmas Kampung Dalam;
 - 7) Puskesmas Tambelan Sampit;
 - 8) Puskesmas Parit Mayor;
-



- 9) Puskesmas Tanjung Hulu;
- 10) Puskesmas Banjar Serasan;
- 11) Puskesmas Perumnas Satu;
- 12) Puskesmas Perumnas Dua;
- 13) Puskesmas Pal Lima;
- 14) Puskesmas Kom Yos Sudarso;
- 15) Puskesmas Siantan Hilir;
- 16) Puskesmas Siantan Hulu;
- 17) Puskesmas Siantan Tengah;
- 18) Puskesmas Telaga Biru;
- 19) Puskesmas Khatulistiwa;
- 20) Puskesmas Kampung Bangka;
- 21) Puskesmas Paris Dua;
- 22) Puskesmas Gang Sehat;
- 23) Puskesmas Purnama;
- 24) Laboratorium Kesehatan (Labkes).
- 25) Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)

Adapun Indikator sub kegiatan operasional pelayanan pada 25 UPT di Kota Pontianak ini adalah

- 1) Persentase tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT bersumber dana APBD murni Kota Pontianak
- 2) Persentase tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat.
- 3) Persentase tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT bersumber dana dari pengelolaan unit faskes menggunakan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).



25. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, Indikator sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah FKTP yang melaksanakan Survey Akreditasi
- 2) Jumlah FKTP yang mendapatkan Pendampingan Pra Akreditasi
- 3) Jumlah FKTP yang mendapatkan Pendampingan Pasca Akreditasi
- 4) Jumlah RS rujukan Kab/Kota yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar
- 5) Jumlah RS di dibina dan dipersiapkan akreditasinya

26. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie, Indikatornya Pelaksanaan Akreditasi RSUD

3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Pada kegiatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi ini ditetapkan target capaian Indikator kegiatan yakni Persentase FKTP yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan. Untuk mencapai target Indikator kegiatan diatas, maka disusun sub kegiatan beserta indikator sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, indikatornya berupa : 1) Jumlah dokumen Profil, 2) Jumlah Dokumen Penelitian Survei, 3) Jumlah data dan Informasi yang di kelola.
2. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie, dengan indikatornya berupa Jumlah Dokumen Profil RSUD Kota Pontianak.
3. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, indikatornya Jumlah FKTP Pemerintah yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan.



4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pada kegiatan penerbitan izin RS dan faskes ini ditetapkan 2 (dua) indikator target kegiatan yakni Persentase Rumah Sakit Kota Pontianak yang terakreditasi, dan Persentase Penyediaan Biaya Operasional RS. Adapun sub kegiatan yang ditetapkan untuk menunjang pencapaian target kegiatan diatas beserta indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, indikator sub kegiatan ini adalah :
 - 1) Persentase tersedianya bahan pendukung pengawasan dan pembinaan sarana kesehatan dasar
 - 2) Persentase fasilitas kesehatan yang dilakukan audit
 - 3) Jumlah UPTD dan UPK yang mendapatkan pembinaan
 - 4) Jumlah pimpinan Faskes yang mendapatkan sosialisasi peningkatan mutu klinik dan RS
 - 5) Jumlah UPTD dan UPK mendapatkan penilaian pelayanan publik dan kinerja
 - 6) Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, Indikator sub kegiatan ini adalah Terwujudnya tata kelola administrasi dan manajemen RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie.

4.1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan adalah Ratio Dokter, Perawat, Bidan sesuai dengan standar yakni 2,3 per 1000 Penduduk, dan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar yakni 90%. Untuk mencapai target indikator



program dimaksud, maka ditetapkan beberapa kegiatan dan indikatornya hingga tahun 2024 sebagai berikut :

1) Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota adalah Jumlah Frekuensi kegiatan pembinaan dan pengawasan praktek tenaga. Untuk mewujudkan indikator kegiatan tersebut maka disusun rincian sub kegiatan beserta indikatornya sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia, indikatornya terdiri dari 8 (Delapan) indikator sub kegiatan yakni : 1) Jumlah puskesmas yang dilaksanakan standarisasi, 2) Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, 3) Jumlah Kelompok remaja yang mendapatkan pendampingan, 4) Jumlah evaluasi PIS PK, 5) Jumlah dokumen profil promosi kesehatan, 5) Jumlah dokumen profil promosi kesehatan, 6) Persentase Tersedianya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 7) Jumlah Petugas yang terlatih Asuhan Persalinan Normal, 8) Jumlah Petugas yang terlatih pelatihan neonatal esensial.

2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan tersebut adalah Persentase pelaksanaan UKOM bagi Tenaga Kesehatan. Untuk mencapai target dan indikator kegiatan diatas, maka disusun rincian sub kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, indikator : Jumlah 1) kegiatan Pelatihan Gizi, 2) Jumlah Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota yang Terpilih, 3) Indikator sub kegiatan ini sebanyak 4 (empat) indikator yakni : 1) Jumlah kegiatan Pelatihan Gizi, 2) Jumlah Tenaga Kesehatan



Teladan Tingkat Kota yang Terpilih, 3) Persentase Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Dinas Kesehatan, 4) Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis yang Diselenggarakan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Kesehatan.

4.1.3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

Indikator Target Program sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman adalah Persentase Fasilitas Kesehatan yang telah memenuhi jumlah dan kualitas peralatan sesuai standar ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan) sampai 90%. Untuk mewujudkan target indikator program tersebut maka disusun kegiatan dan indikator kegiatannya yakni :

- 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dengan indikatornya Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai standar (100%).

Untuk mencapai target indikator tersebut, disusun sub kegiatan dan indikatornya sebagai berikut :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), indikatornya : 1) Persentase tersedianya bahan pendukung pengawasan dan pembinaan sarana kefarmasian, dan 2) Jumlah fasilitas kesehatan yang diberikan pembinaan.
- 2) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM). Indikator kegiatan ini adalah Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat sebesar 70%.



Untuk mencapai target indikator tersebut, maka disusun sub kegiatan rinci beserta indikator sub kegiatannya sebagai berikut :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM), Indikator sub kegiatan : 1). Jumlah pelaku usaha / industry Rumah tangga yang diberikan Sertifikat PIRT (Sebanyak 50 IRTP).

4.1.4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Indikator Target Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan adalah terwujudnya tatanan kota Sehat dengan target sebesar 90%. Adapun kegiatan untuk mencapai indikator program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan diantaranya :

- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator kegiatan pemberdayaan kemitraan ini adalah persentase kegiatan advokasi pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor bidang kesehatan.

Untuk mencapai target kegiatan maka disusun sub kegiatan beserta indikatornya sebagai berikut :

1. Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, indikator sub kegiatan ini adalah : 1) Jumlah pelaksanaan jambore (Posyandu dan Kota Sehat), 2) Jumlah kader posyandu yang mengikuti kaji banding, 3) Jumlah kegiatan Saka Bhakti Husada (rakornis, bhakti masyarakat, latihan gabungan dan perkemahan tingkat daerah), 4) Jumlah penyuluhan pola hidup sehat, 5) Jumlah Guru UKS yang dilatih.
2. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat. Indikator sub kegiatan ini yakni : 1) Persentase ketersediaan bahan pendukung promosi



kesehatan, 2) Jumlah event promosi kesehatan yang dilaksanakan, 3) Jumlah kerjasama dengan mass media.

4.1.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada program penunjang ini terdapat 4 (empat) Kegiatan, dengan indikator programnya adalah Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100%. Adapun kegiatan – kegiatan yang disusun untuk mencapai indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Jangka waktu pemenuhan operasional perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yakni selama 12 bulan dimana sub kegiatannya adalah :

1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, indikatornya Jumlah dokumen perencanaan yang disusun yakni sebanyak 14 Dokumen
2. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie, Indikatornya Jumlah dokumen perencanaan yang disusun RSUD Sultan Syarif Mohamad Al Kadrie yakni sebanyak 5 Dokumen
3. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan dengan indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan yang dihasilkan sebanyak 6 Dokumen
4. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie, Indikatornya Jumlah Laporan Capaian Kinerja RSUD yang dihasilkan (5 Laporan)
5. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah, Indikatornya Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (19 Dokumen)
6. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie. Indikator sub kegiatan ini adalah



Jumlah dokumen evaluasi yang disusun - RSUD Sultan Syarif Mohamad Al Kadrie (5 Dokumen)

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikatornya Jumlah laporan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang disusun (5 Laporan)
8. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie. Indikatornya adalah Jumlah laporan evaluasi kinerja RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie yang disusun (2 Laporan).

2) Administrasi Keuangan

Indikator kegiatan administrasi keuangan adalah Jangka waktu pemenuhan operasional administrasi keuangan yakni selama 12 bulan. Adapun sub kegiatan yang disusun untuk mencapai target indikator kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan. Indikator sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan adalah jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN yakni selama 12 bulan
2. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Indikatornya adalah Jumlah laporan yang disusun yang berjumlah 15 Laporan
3. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan yang disusun RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie yakni sebanyak 5 Laporan
4. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran. Indikatornya Jumlah Kegiatan Pemusnahan Aset serta Monitoring Pengelolaan Aset yang dilaksanakan (2 kegiatan).

3) Administrasi Umum

Indikator kegiatan administrasi umum ini adalah jangka waktu pelayanan administrasi umum yakni selama 12 bulan. Adapun upaya untuk mencapai target indikator kegiatan administrasi umum



ini diuraikan dalam sub – sub kegiatan beserta indikator sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikatornya adalah Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik (12 bulan)
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie (12 bulan)
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Indikatornya Jangka waktu penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie, indikatornya Jangka waktu penyediaan jasa administrasi keuangan RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Indikatornya Jangka waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (12 bulan)
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie. Indikatornya Jangka waktu penyediaan jasa kebersihan kantor RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie (12 bulan).
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Indikatornya Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan.
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie, Indikatornya Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie
9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Indikatornya Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
10. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan RSUD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie. Indikatornya Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie.



11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Indikatornya Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie. Indikatornya Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie.
 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie. Indikatornya Jenis peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor RSUD yang diadakan
 14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Indikatornya Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie, Indikatornya Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie.
 16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Indikatornya Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor
 17. Penyediaan Bahan Logistik Kantor RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie. Indikatornya Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie.
 18. Penyediaan Makanan dan Minuman. Indikatornya Jangka waktu penyediaan makanan dan minuman
 19. Penyediaan Makanan dan Minuman RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie, Indikatornya Jangka waktu penyediaan makanan dan minuman RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie
 20. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah, indikatornya Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-



21. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie, Indikatornya Jangka waktu pemenuhan/fasilitas kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie
22. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional , Indikatornya Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie
23. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Indikatornya Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor
24. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Indikatornya Jumlah unit peralatan gedung kantor
25. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie, Indikatornya Jumlah unit peralatan gedung kantor RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie
26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, Indikatornya Jumlah rumah dinas yang dipelihara
27. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Indikatornya jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie, Indikatornya jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie
29. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor, Indikatornya Jangka waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dipelihara.
30. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie Indikatornya Jangka waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor RSUD Sultan Syarif Mohamad Al-Kadrie yang dipelihara



31. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas, Indikatornya Jumlah unit rumah dinas yang direhabilitasi sedang/berat
 32. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor, Indikatornya Jumlah unit rumah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat rumah
 33. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional, Indikatornya Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi sedang/berat kendaraan.
- 4) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Indikator kegiatan ini adalah Jangka waktu pelayanan peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur. Adapun sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
1. Pendidikan dan pelatihan formal, indikatornya Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal
 2. Pendidikan dan pelatihan formal RSUD Sultan Syarif Mohamad Al Kadrie, Indikatornya adalah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal.





Tabel 4.1

Rumusan Program, dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 serta Perkiraan Maju Tahun 2023
Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kota Pontianak

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target Capaian	Lok	Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Catatan Penting		
	Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan			APBD	APBD Prov	DAK	Target	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah sekolah ber PHBS	224 Sekolah		321.560.000			224 Sekolah	321.560.000			
			Jumlah RT ber PHBS	2790 RT					2790 RT				
			Jumlah keluarga sehat	30.887 KK					30.887 KK				
			Jumlah penyuluhan pola hidup sehat	6 penyuluhan					6 penyuluhan				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ketersediaan bahan pendukung kegiatan pelayanan kesehatan maternal, Neonatal, Bayi	100%			244.076.900		742.697.896	100%	986.774.796	
				Monitoring dan evaluasi program Kesehatan Keluarga	10 Kali						11 Kali		
		Audit kematian Ibu Hamil dan Bersalin	4 Kali						5 Kali				



			Jumlah Petugas yang terlatih Pelayanan kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin	120 Orang				122 Orang		
			Jumlah Kader kesehatan yang terlatih Pelayanan kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin	65 Orang				70 Orang		
			Koordinasi Pelayanan Kesehatan Program Kesehatan Keluarga	5 Kali				6 Kali		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Jampersal DAK)	Persentase ibu hamil dan ibu bersalin dan neonatal yang mendapatkan jaminan persalinan	100%		0	1.123.389.000	100%		
		Pengelolaan Bayi baru Lahir	Audit kematian Bayi	4 Kali				5 Kali	242.547.370	
			Jumlah Petugas yang terlatih Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	46 Orang				48 Orang		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Petugas yang terlatih Pelayanan kesehatan anak Balita dan pra sekolah	120 Orang				125 Orang	247.620.000	
			Persentase ketersediaan bahan pendukung pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolah	100%				100%		



			Jumlah Kader kesehatan yang terlatih Pelayanan kesehatan Anak Balita dan pra sekolah	65 Orang				70 Orang		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Petugas yang terlatih Pelayanan kesehatan pada anak Usia Pendidikan Dasar	69 Orang				70 Orang	127.133.607	
			Persentase ketersediaan bahan pendukung pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar	100%				100%		
			Jumlah Kader kesehatan yang terlatih Pelayanan kesehatan pada anak Usia Pendidikan Dasar	75 Orang				80 Orang		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase ketersediaan bahan pendukung kegiatan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	100%				100%	139.838.607	
			Monitoring dan evaluasi pada Usia Lanjut	3 Kali				4 Kali		
			Jumlah Petugas yang terlatih Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	46 Orang				48 Orang		



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

			Jumlah Kader kesehatan yang terlatih Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	90 Orang				95 Orang	
			Koordinasi Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3 Kali				4 Kali	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah evaluasi program gizi	2 kali	Kota Pontianak	891.224.381	211.243.500	2 kali	935.785.600
		Operasional Pelayanan 25 UPTD/UPK (APBD)	Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (APBD)	100%		7.000.000.000		100%	98.977.736.816
		Operasional Pelayanan 25 UPTD/UPK (DAK)	Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (DAK)				12.712.360.000		
			Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (BLUD)	100%		22.476.535.440		100%	
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	5	siantan Hilir	6.500.000.000	8.902.891.500	3 Pusk	12.000.000.000
		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pengembangan	1		0		2 unit	500.000.000
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Lainnya yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Posyandu, Pustu)	3				2 unit	55.000.000



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	8					2 unit	2.500.000.000	
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit yang dibangun	1 RS	Pontianak Utara	27.952.800.000					
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Antropometri dan IPAL)	Jumlah Prasarana yang berhasil dibangun	3				646.215.000			
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah FKTP Pemerintah yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan	60%		306.859.062			60%	199.675.592	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil	1 Dokumen		55.970.000			1 dokumen	273.996.030	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk yang mendapatkan pembayaran premi PBI Kota Pontianak	52.545 Peserta		8.952.736.000	2.081.000.000		53,545 peserta	15.380.424.895	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar	8100 orang		121.083.492		127.669.247	8100 orang	240.293.648	
		Jumlah penderita TBC yang ditemukan	1500 orang					1500 orang		
		Jumlah penderita TBC yang dilakukan contac tracing	1500 orang					1500 orang		
		Jumlah kader yang melaksanakan Pendampingan Minum Obat	1500 Kader					1500 Kader		



			Jumlah petugas kesehatan yang terlatih pengelolaan Program TB	32 orang				34 orang	
			Jumlah Kegiatan Kampanye TB	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
			Jumlah kader TBC yang ditingkatkan kapasitasnya	60 Kader				60 Kader	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Unit KPA)	Jumlah Jenis Kegiatan Kampanye HIV AIDS	5 Kegiatan	440.117.337	0	0	5 Kegiatan	584.129.162
			Jumlah kader yang terlatih penanganan HIV AIDS	200 Kader				200 Kader	
			Jumlah Orang Dengan HIV AIDS yang mendapatkan pendampingan	120 Orang				120 Orang	
			Jumlah peserta sosialisasi HIV AIDS	1020 orang				1020 orang	
			Jumlah pertemuan koordinasi Program HIV	6 Kali				6 Kali	
			Jumlah orang beresiko HIV yang dilakukan penjangkaran	1700 orang				1700 orang	
			Jumlah ibu hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV, Sipilis, dan Hepatitis	12.576 orang				12.576 orang	
			Jumlah Frekuensi kegiatan sosialisasi HIV dengan media secara virtual/ online	12 Kali				12 Kali	



			Jumlah Tempat Layanan Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP) HIV di Fasyankes	6 Lokasi				6 Lokasi	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Tempat dan Fasilitas Umum Yang dilakukan Pengawasan	76 TFU	311.279.895		199.825.100	76 TFU	2.750.000.000
			Jumlah pertemuan/sosialisasi kegiatan pembinaan Tempat- tempat umum	1 pertemuan				1 pertemuan	
			Jumlah Kelurahan yang dilakukan verifikasi ODF	9 kelurahan				9 kelurahan	
			Jumlah kader yang terlatih STBM	40 kader				40 kader	
			Jumlah ketersediaan sarana pendukung program kesehatan lingkungan	23 Puskesmas				23 Puskesmas	
			Jumlah sarana air minum yang dilakukan pengawasan	33 Sarana				33 Sarana	
			Jumlah petugas sanitasi yang terlatih program kesehatan lingkungan	23 Petugas				23 Petugas	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara Lain : Jasaboga Rumah makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang dilakukan pengawasan	200 TPM	311.279.895			300 TPM	101.323.981



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (PSN)	Jumlah lokasi yang dilaksanakan fogging	200 Lokasi		678.214.700		200 Lokasi	1.004.572.800	
		Persentase ketersediaan bahan penunjang kegiatan fogging	100%				100%		
		Jumlah mesin fogging yang diadakan	5 Mesin				5 Mesin		
		Persentase ketersediaan bahan pendukung dan media promosi imunisasi	100%				100%		
		Jumlah evaluasi dan sosialisasi kegiatan imunisasi	6 kl				6 kl		
		Jumlah fasilitas kesehatan dan institusi yang mendapatkan pembinaan imunisasi	74 Fasilitas				74 Fasilitas		
		Jumlah Sosialisasi dan Kampanye Japanese Encephalitis (BOK/DAK)	1 kali				0		
		Jumlah Kegiatan Supervisi Pelaksanaan Imunisasi Japanese Encephalitis (BOK/DAK)	23 kali				0		
	Pengelolaan Upaya Kes Khusus (Haji)	Persentase Jamaah Calon Haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar	100%		536.414.566		100%	45.114.069	



			Jumlah tenaga kesehatan haji yang mendapatkan pelatihan	47 tenaga kesehatan				47 tenaga kesehatan	
			Jumlah pertemuan evaluasi pelayanan kesehatan jamaah haji	2 kali				2 kali	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Imunisasi)	Jumlah lokasi yang dilaksanakan fogging	200 Lokasi		104.406.707		200 Lokasi	1.004.572.800
			Persentase ketersediaan bahan penunjang kegiatan fogging	100%				100%	
			Jumlah mesin fogging yang diadakan	5 Mesin				5 Mesin	
			Persentase ketersediaan bahan pendukung dan media promosi imunisasi	100%				100%	
			Jumlah evaluasi dan sosialisasi kegiatan imunisasi	6 kl				6 kl	
			Jumlah fasilitas kesehatan dan institusi yang mendapatkan pembinaan imunisasi	74 Fasilitas				74 Fasilitas	
			Jumlah Sosialisasi dan Kampanye Japanese Encephalitis (BOK/DAK)	0%				0	
			Jumlah Kegiatan Supervisi Pelaksanaan Imunisasi Japanese Encephalitis	0%				0	



			{BOK/DAK}							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah petugas kesehatan yang terlatih pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	46 Orang		23.490.432			46 Orang	278.933.039
			Jumlah puskesmas yang mendapatkan monev pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	23 Puskesmas					23 Puskesmas	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah petugas puskesmas yang terlatih kesehatan jiwa	23 Petugas		12.120.214			23 Petugas	144.915.027
			Jumlah Sosialisasi Gerakan Deteksi Dini FR PTM terkait masalah Jiwa-Napza {BOK/DAK}	1 kali					0 kali	
			Jumlah monitoring, evaluasi, dan koordinasi petugas kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	4 kali					5 kali	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Yankes Walikota,UA)	Jumlah pelayanan kesehatan Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Pontianak	1 Kali					2 Kali	142.411.500



			Persentase ketersediaan bahan pendukung Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%				100%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (P2))	Koordinasi Pelayanan Kesehatan pada calon pengantin	1 Kali		70.730.826		2 Kali	70.730.826
			Monitoring evaluasi Pelayanan Kesehatan pada calon pengantin	2 Kali				3 Kali	
			Monitoring evaluasi Pelayanan Kesehatan pada Keluarga Berencana	2 Kali				3 Kali	
			Persentase ketersediaan bahan pendukung Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%				100%	
			Jumlah petugas kesehatan yang terlatih pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	46 orang				48 orang	
			Jumlah pelayanan mobile service PTM	50 LOKASI				52 Lokasi	
			Jumlah Kader kesehatan yang terlatih pelayanan PTM	46 Orang				0	
			Persentase ketersediaan bahan habis pakai dan bahan pendukung kegiatan pemeriksaan deteksi dini kanker payudara	100%				100%	



			dan kanker leher rahim							
			Jumlah kampanye IVA dan Sadarnis	6 Kali				7 Kali		
			Moitoring dan Evaluasi terpadu terkait pelaksanaan Program (BOK/DAK)	0 Kali				0 Kali		
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase ketersediaan bahan pendukung surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	100%		204.486.227	201.304.879	100%		242.052.295
			Jumlah Pertemuan Review dan Evaluasi Surveilans dan Penanggulangan Wabah	3 kali				3 kali		
			Jumlah petugas yang terlatih Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	0				0		
			Jumlah Rujukan Pengujian Spesimen Rutin, Sentinel dan Dugaan KLB	100%				100%		
			Jumlah Surveilans aktif kasus PD31 dan Penyakit Menular	48 kl				48 kl		
			Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan pembinaan	34 fasyankes				34 fasyankes		



		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Diabetes Mellitus	Persentase ketersediaan bahan pendukung kegiatan pelayanan kesehatan	100%	25.397.221			100%	278.933.039	
			Jumlah monitoring, evaluasi, dan koordinasi petugas kesehatan	4 Kali				5 Kali		
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPTD/ UPK yang memiliki minimal 60% alat kesehatan sesuai standar	25 UPT	60.574.862		1.118.436.500	25 UPT	8.616.049.120	
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah UPTD/ UPK yang memenuhi capaian indikator 40 item obat wajib dan 5 vaksin Imunisasi Dasar Lengkap	23 UPT	1.748.716.554		2.763.396.156	23 UPT	4.645.535.757	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Puskesmas yang memiliki ketersediaan BHP medis sesuai standar	23 UPT	270.837.825		2.234.648.844	23 UPT	533.000.000	
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah frekuensi alat kesehatan yang dilakukan pemeriksaan	23 kali	32.319.034		99.100.000	25 UPT	48.478.551	
			Jumlah UPTD/ UPK Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Kalibrasi Alat Kesehatan	25 UPT						
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP yang melaksanakan Survey Akreditasi	9 puskesmas	0		1.536.644.000	6 puskesmas		
			Jumlah FKTP yang mendapatkan Pendampingan Pra Akreditasi	9 puskesmas				6 puskesmas		



			Jumlah FKTP yang mendapatkan Pendampingan Pasca Akreditasi	23 puskesmas				23 puskesmas	
			Jumlah RS rujukan Kab/Kota yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	13 RS				13 RS	
			Jumlah RS di bina dan dipersiapkan akreditasinya	13 RS				13 RS	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Yankes)	Jumlah dokumen Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	100 Dokumen	71.713.088		28.000.000	50 Dokumen	59.287.883
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Subbag UA)			91.540.714				
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis kesehatan	Persentase ketersediaan bahan pendukung penanggulangan masalah kesehatan	100%	249.187.482			100%	55.000.000
			Cakupan pelayanan gawat darurat 119	100%					
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah sakit Kelas C, D dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase tersedianya bahan pendukung pengawasan dan pembinaan sarana kesehatan dasar	100%	43.322.197			100%	82.950.945
			Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan audit	13 RS				13 RS	
			Jumlah UPTD dan UPK yang mendapatkan pembinaan	25 UPTD/UPK				25 UPTD/UPK	



			Jumlah pimpinan Faskes yang mendapatkan sosialisasi peningkatan mutu klinik dan RS	Orang				Orang	
			Jumlah UPTD dan UPK mendapatkan penilaian pelayanan publik dan kinerja	25 UPTD/UPK				25 UPTD/UPK	
			Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	2 dokumen				2 dokumen	
			Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 Orang				50 Orang	
			Jumlah Kegiatan Rohani yang diadakan	6 Kali				6 Kali	
			Jumlah Kegiatan Kebuagran Jasmani yang diadakan	40 kali				40 kali	
		Jumlah Program UKP UKM Dinkes				81.878.715.156		32.647.821.622	153.816.377.754
		RSUD SSMA (Prog UKP UKM)							
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana prasarana yang dilakukan rehabilitasi	1 Unit					3.041.455.900
			Jumlah sarana prasarana yang dilakukan pemeliharaan	4 Unit					



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Unit			19.742.000.000		848.770.000	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan prasarana penunjang Rumah Sakit	1 Unit					1.437.852.400	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis peralatan kesehatan Rumah sakit	50 Jenis			6.000.000.000		2.000.000.000	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah ketersediaan jenis obat	30 Jenis		1.500.000.000			5.000.000.000	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah ketersediaan jenis bahan habis pakai RSUD Sultan Syarif Moehamad Al-Kadrie	6 Jenis		2.737.474.772			2.826.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah tenaga harian lepas pengolah makanan	8 Orang		950.000.000			950.000.000	
		Persentase ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥90						
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase tersedianya bahan pendukung penyuluhan kesehatan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Al Kadrie	100%					139.640.000	
		Jumlah kerjasama dengan mass media	5 Media massa						
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (BLUD)	Persentase kebutuhan operasional pelayanan RSUD	100%		66.244.464.560			56.913.301.882	



			Sultan Syarif Mohamad Al Kadrie							
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah standar pelayanan dan SOP yang disusun dan dilakukan review	200 SP dan SOP						43.907.753
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil RSUD Kota Pontianak	1 Dokumen						9.826.580
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah aplikasi sistem informasi dan manajemen RSUD Sultan Syarif Mohamad Al Kadrie yang dikelola	2 Aplikasi						238.104.500
		Jumlah Program UKP UKM RSUD				5.187.474.772		25.742.000.000		73.448.859.015
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak lanjut Pengawasan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase tersedianya bahan pendukung sarana kesehatan yang diberikan pengawasan, tindak lanjut pengawasan perizinan, dan pembinaan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal	100%		25.199.289		20.477.267	100%	23.899.260
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah	Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang	50 IRTP		24.390.000		94.040.493	50 IRTP	92.112.710



		Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	diterbitkan sertifikat							
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dilakukan pengendalian dan pengawasan serta rencana tindak lanjut	60 IRTP	0	105.800.000	60 IRTP			
			Jumlah sampel yang dilakukan	37 sampel			37 sampel			
		Jumlah Program Sediaan Farmasi Dinkes			49.589.289	220.317.760		92.112.710		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (UA)	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 Orang	42.249.382		50 Orang	381.482.351		
			Jumlah Kegiatan Rohani yang diadakan	6 Kali			6 Kali			
			Jumlah Kegiatan Kebugran Jasmani yang diadakan	40 kali			40 kali			



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UA)	Jumlah Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota yang Terpilih	15 orang	69.360.000			15 orang	515.291.007	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (KIA)	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Teladan yang terpilih	16 Orang	170.565.000			16 Orang		
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (Farmasi)	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis yang Diselenggarakan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Kesehatan	2 Kegiatan	14.464.000		189.745.040	2 Kegiatan		
			Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Formal	30 Orang				30 Orang		
		Jumlah Program Kapasitas SDM Dinkes			296.638.382		189.745.040		896.773.358	



4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan Upaya promosi kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Promkes)	Jumlah pelaksanaan jambore (Posyandu dan Kota Sehat)	2 Kegiatan	47.606.380	273.346.378	2 Kegiatan	349.690.000
		Peningkatan Upaya promosi kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Farmasi)	Jumlah kader posyandu yang mengikuti kaji banding	5 Kader	15.760.000	95.720.200	5 Kader	
			Jumlah kegiatan Saka Bhakti Husada (rakornis, bhakti masyarakat, latihan gabungan dan perkemahan tingkat daerah)	4 Kegiatan			4 Kegiatan	
			Persentase ketersediaan bahan pendukung promosi kesehatan	100%			100%	
			Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih PIS PK	46 Orang			46 Orang	
			Jumlah kerjasama dengan mass media	4 Media			4 Media	
			Jumlah Peserta yang mengikuti KIE (Komuniikasi , Informasi dan Edukasi) Keamanan Pangan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	110 orang			110 orang	
			Jumlah Program Pemberdayaan Masy Dinkes			63.366.380	369.066.578	



5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 dokumen		52.381.500			7 Dokumen	52.381.500
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan		68.321.150			3 Laporan	68.321.150
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	28 Laporan		256.586.09 2			28 Laporan	256.653.238
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan		5.493.877.4 20			12 bulan	5.758.827.419
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Kali		16.250.000			12 Kali	216.250.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan		20.422.078			12 Bulan	27.413.680
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Unit		66.712.470			15 Unit	82.846.895
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	18 unit		32.024.049			18 unit	33.074.049
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan		77.250.000			12 Bulan	78.250.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan		39.993.675			12 Bulan	41.497.550	



**Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022**

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan		4.000.000			12 Bulan	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan		30.412.000			12 Bulan	184.290.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 Unit		35.020.000			3 Unit	558.900.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 Bulan		335.000.000			12 Bulan	402.052.303	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	46 unit		490.076.562			46 unit	490.076.562	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 unit		76.200.000			8 unit	76.200.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit		81.610.465			4 unit	216.017.060	
	Jumlah Program Rutin Dinkes				7.176.137.461				8.548.051.406	
	Gaji dan Tunjangan TPP				144.507.790.000				144.507.790.000	



		RSUD SSMA (Prog Rutin)								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen				7 Dokumen	17.042.205	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan				3 Laporan	69.655.913	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan		1.019.000.000		12 Bulan	839.000.000	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan		4.935.150.000		12 Bulan	5.393.490.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	28 Laporan				28 Laporan	91.296.319	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							700.000.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan				12 Bulan	145.000.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17 Unit				17 Unit	490.000.000	



	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan					12 Bulan	1.293.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan					12 Bulan	426.227.455
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan					12 Bulan	50.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit					3 Unit	300.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 Bulan		1.951.000.000			12 Bulan	1.951.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan		5.300.000.000			12 Bulan	5.600.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	46 Unit					46 Unit	1.035.060.000
	Jumlah Program Rutin RSUD SSMA				13.205.150.000				18.400.771.892



		Jumlah Pagu APBD (Selain DAK)				329.055.541.000			308.210.795.228
		Jumlah Pagu DAK					58.922.736.000		
		Total Pagu				387.978.277.000			

Sumber :Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2021



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022 merupakan suatu dokumen yang disusun sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen adalah salah satu komponen dari Siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja (Renja) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja Tahunan memberikan gambaran detail dari kegiatan indikatif berikut anggaran pendanaan yang ditetapkan sebagai strategi untuk mencapai sasaran, sehingga dalam dokumen ini termuat rincian program, kegiatan hingga sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan.

Pelaksanaan Rencana Kerja ini merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan dalam upaya penyempurnaan Dokumen Rencana Kerja ini. Terimakasih.

WALIKOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO



Jl. Jend Ahmad Yani Telp. (0561) 760528 Fax. 732602 Pontianak 78121
Website : www.dinkeskotapontianak.net - email : dinkesptk@gmail.com

2021



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN

JL. Jend. Ahmad Yani Pontianak Telp. 760528 Fax. 732602
PONTIANAK 7 8 1 2 1

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : SPT/ 7351.1 /Dinkes-Prc-keu/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

MEMERINTAHKAN :

Nama : Andi Sulaimana, SKM.,MPH
NIP : 19830506 200312 1 007
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Analis Perencanaan

Untuk : Melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 06 Mei 2021

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak


dr. Sidiq Handanu Widoyono, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660506 199603 1 003